



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025



Hj. YULI HASTUTI, S.H.
BUPATI PURWOREJO

DION AGASI S, S.I.Kom., M.Si.
WAKIL BUPATI PURWOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengacu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sistematika Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 ini memberikan informasi tentang Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purworejo selama Tahun 2025. Melalui buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran capaian kinerja kepada semua pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan dan kewenangannya selama tahun anggaran 2025.

Purworejo, 30 Maret 2026

BUPATI PURWOREJO



DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. PENJELASAN UMUM	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	1
c. Jumlah Penduduk	4
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	6
e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	23
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	30
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	31
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	33
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.	98
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	105
2.1. Capaian Kinerja Makro	105
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	112
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	112
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	122
2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	125

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN.....	166
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	167
4.1 Urusan Pendidikan	167
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	167
4.1.2 Target Pencapaian	168
4.1.3 Realisasi	169
4.1.4 Alokasi Anggaran	172
4.1.5 Dukungan Personil	172
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	173
4.2 Urusan Kesehatan	174
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	174
4.2.2 Target Pencapaian	176
4.2.3 Realisasi	183
4.2.4 Alokasi Anggaran	195
4.2.5 Dukungan Personil	196
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	198
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	200
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	200
4.3.2 Target Pencapaian.....	200
4.3.3 Realisasi	202
4.3.4 Alokasi Anggaran	207
4.3.5 Dukungan Personil	207
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	208
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	209
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	209
4.4.2 Target Pencapaian.....	210
4.4.3 Realisasi	211
4.4.4 Alokasi Anggaran	214
4.4.5 Dukungan Personil	216
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	215
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	217

4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	217
4.5.2	Target Pencapaian.....	219
4.5.3	Realisasi	228
4.5.4	Alokasi Anggaran	259
4.5.5	Dukungan Personil	242
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	244
4.6	Urusan Sosial	247
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	247
4.6.2	Target Pencapaian	248
4.6.3	Realisasi	249
4.6.4	Alokasi Anggaran	259
4.6.5	Dukungan Personil	259
4.6.7	Permasalahan dan Solusi	259
4.7	Program dan Kegiatan	261
4.7.1	Urusan Pendidikan	262
4.7.2	Urusan Kesehatan	267
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	269
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	269
4.7.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	270
4.7.6	Urusan Sosial	274
BAB V	PENUTUP	276
	Kesimpulan	276
	Saran	277

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2025	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2025	5
Tabel 1.3	Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo	6
Tabel 1.4	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Dasar Hukum di Pemerintah Kabupaten Purworejo	7
Tabel 1.5	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan ...	8
Tabel 1.6	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025	11
Tabel 1.7	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025	13
Tabel 1.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025	14
Tabel 1.9	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025	15
Tabel 1.10	Rincian Program berdasarkan urusan.....	15
Tabel 1.11	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	31
Tabel 1.12	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	33
Tabel 1.13	Target penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	101
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025	105
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	112
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	122
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025	126
Tabel 2.5	Program dan Anggaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.....	128
Tabel 2.6	Kriteria Penilaian Kinerja.....	133
Tabel 2.7	Realisasi dan Capaian Kinerja Kepala Daerah	133
Tabel 2.8	Data Realisasi atau Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Realisasi atau Capaian Tahun 2024.....	136

Tabel 2.9	Data Realisasi atau Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target RPJMD	138
Tabel 4.1	Target dan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	168
Tabel 4.2	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	169
Tabel 4.3	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Purworejo Tahun 2025	169
Tabel 4.4	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .	170
Tabel 4.5	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	171
Tabel 4.6	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	172
Tabel 4.7	Alokasi anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	172
Tabel 4.8	Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	173
Tabel 4.9	Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	173
Tabel 4.10	Target Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	176
Tabel 4.11	Realisasi Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	183
Tabel 4.12	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	184
Tabel 4. 13	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Purworejo Tahun 2025	185
Tabel 4.14	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Purworejo Tahun 2025	186
Tabel 4.15	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	187
Tabel 4.16	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo Tahun 2025	188
Tabel 4.17	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kabupaten Purworejo Tahun 2025	189

Tabel 4.18	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Kabupaten Purworejo Tahun 2025	190
Tabel 4.19	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Purworejo Tahun 2025	190
Tabel 4.20	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Purworejo Tahun 2025	191
Tabel 4.21	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Kabupaten Purworejo Tahun 2025	192
Tabel 4.22	Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis berat Kabupaten Purworejo Tahun 2025	193
Tabel 4.23	Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	194
Tabel 4.24	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	195
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	195
Tabel 4.26	Sumber Daya Personil Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	196
Tabel 4.27	Permasalahan Dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	196
Tabel 4.28	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025...	200
Tabel 4.29	Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025	203
Tabel 4.30	Rekapitulasi Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	203
Tabel 4.31	Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Purworejo Tahun 2025	203
Tabel 4.32	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	205
Tabel 4.33	Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ...	206
Tabel 4.34	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025	207

Tabel 4.35	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	207
Tabel 4.36	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025...	207
Tabel 4.37	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025...	209
Tabel 4.38	Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	211
Tabel 4.39	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2025	211
Tabel 4.40	Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025	212
Tabel 4.41	Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025	213
Tabel 4.42	Capaian IP SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2025	214
Tabel 4.43	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	214
Tabel 4.44	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2025	215
Tabel 4.45	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2025	216
Tabel 4.46	Target Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025	221
Tabel 4.47	Target Pencapaian Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten Purworejo tahun 2025	223
Tabel 4.48	Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	228
Tabel 4.49	Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	229
Tabel 4.50	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Trantibum Kabupaten Purworejo Tahun 2025	229
Tabel 4.51	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025	232

Tabel 4.52	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025	234
Tabel 4.53	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	235
Tabel 4.54	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	239
Tabel 4.55	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Purworejo Tahun 2025....	241
Tabel 4.56	Alokasi Anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025	241
Tabel 4.57	Alokasi Anggaran BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	242
Tabel 4.58	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025	242
Tabel 4.59	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025	243
Tabel 4.60	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	243
Tabel 4.61	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Berdasarkan Jabatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025	243
Tabel 4.62	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025	244
Tabel 4.63	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025	246
Tabel 4.64	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	248
Tabel 4.65	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025.....	249
Tabel 4.66	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2025	250
Tabel 4.67	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2025	252
Tabel 4.68	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2025	253
Tabel 4.69	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial	

	Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.....	255
Tabel 4.70	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025	257
Tabel 4.71	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2025	258
Tabel 4.72	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2025	259
Tabel 4.73	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2025	259
Tabel 4.74	Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025	260
Tabel 4.75	Indek Pencapaian SPM pada masing-masing Bidang di Kabupaten Purworejo Tahun 2025	260
Tabel 4.76	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025.....	262
Tabel 4.77	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .	268
Tabel 4.78	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	269
Tabel 4.79	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2025	270
Tabel 4.80	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025	271
Tabel 4.81	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub urusan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025	273
Tabel 4.82	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2025	274

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Purworejo	2
Gambar 1.2	Peta Pola Ruang Kabupaten Purworejo	3
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2025	6
Gambar 2.1	Capaian IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2021- 2025	106
Gambar 2.2	Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2021- 2025	107
Gambar 2.3	Tingkat Pengangguran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025	108
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025	109
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2020- 2025 (juta rupiah)	110
Gambar 2.6	Indeks Gini Ratio Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025.....	111
Gambar 2.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	135
Gambar 2.8	Tingkat Ketercapaian Realisasi Indikator Kinerja.....	136
Gambar 2.9	Realisasi Atau Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2025	138
Gambar 2.10	Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	139
Gambar 4.1	Persentase Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	215

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4);

b. Data Geografis Wilayah

Secara administratif Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 16 kecamatan, 469 desa dan 25 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purworejo.

Secara geografis, Kabupaten Purworejo terletak pada posisi antara 109° 47' 28" - 110° 8' 20" Bujur Timur dan 7° 32' – 7° 54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.081,45 km². yang terdiri dari ± 2/5 daerah dataran dan ± 3/5

Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah selatan : Samudra Indonesia
Sebelah barat : Kabupaten Kebumen
Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

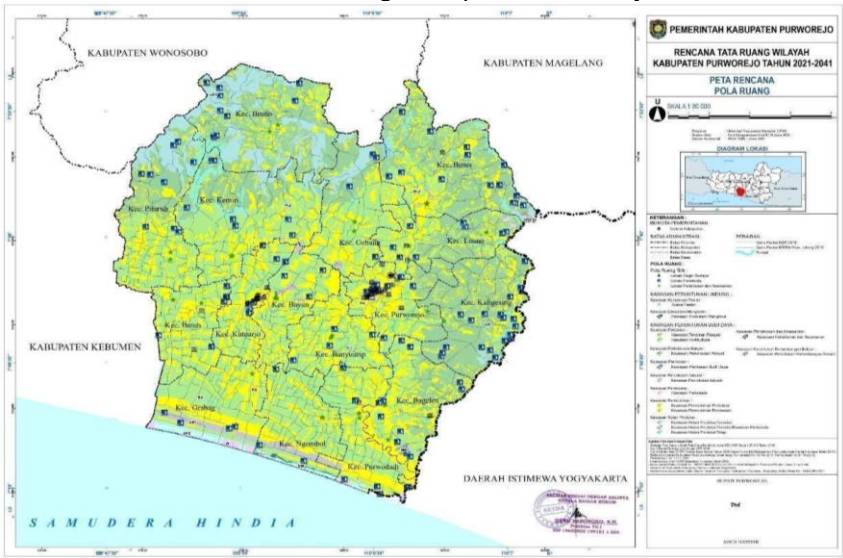
- 1) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo;
- 2) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
- 3) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
- 4) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- 2) Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi curah hujan intensitas relatif tinggi sering menyebabkan di beberapa daerah berpotensi banjir dan longsor.

Gambar 1.2
Peta Pola Ruang Kabupaten Purworejo



Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2044, Kabupaten Purworejo termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Keburejo yaitu kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Adapun dalam peraturan daerah tersebut Wilayah Pengembangan Keburejo memiliki arah pengembangan sebagai berikut:

1. Menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo Kutoarjo dengan Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
2. Pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang;

- 3. Pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
- 4. Meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai PKW;
- 5. Meningkatkan akses wisata pantai – Geopark Kebumen;
- 6. Mengembangkan Kawasan Industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otorita Borobudur;
- 7. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah;
- 8. Pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
- 9. Mengembangkan Pelabuhan Perikanan; dan
- 10. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 berjumlah 810.340 jiwa dengan komposisi 50,14% penduduk laki-laki dan 49,86% penduduk perempuan. Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.081,45 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 749 jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	GRABAG	26.529	26.098	52.627
2.	NGOMBOL	18.234	18.303	36.537
3.	PURWODADI	21.304	21.585	42.889
4.	BAGELEN	15.697	15.735	31.432
5.	KALIGESING	16.272	16.136	32.408
6.	PURWOREJO	44.314	44.952	89.266
7.	BANYUURIP	22.062	22.462	44.524
8.	BAYAN	26.812	26.997	53.809
9.	KUTOARJO	31.716	31.672	63.388
10.	BUTUH	21.712	21.892	43.604
11.	PITURUH	27.618	27.474	55.092
12.	KEMIRI	31.049	30.472	61.521
13.	BRUNO	29.519	28.039	57.558
14.	GEBANG	22.971	22.693	45.664
15.	LOANO	20.063	19.735	39.798
16.	BENER	30.429	29.794	60.223
	JUMLAH	406.301	404.039	810.340

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Purworejo 2026

Struktur usia penduduk Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

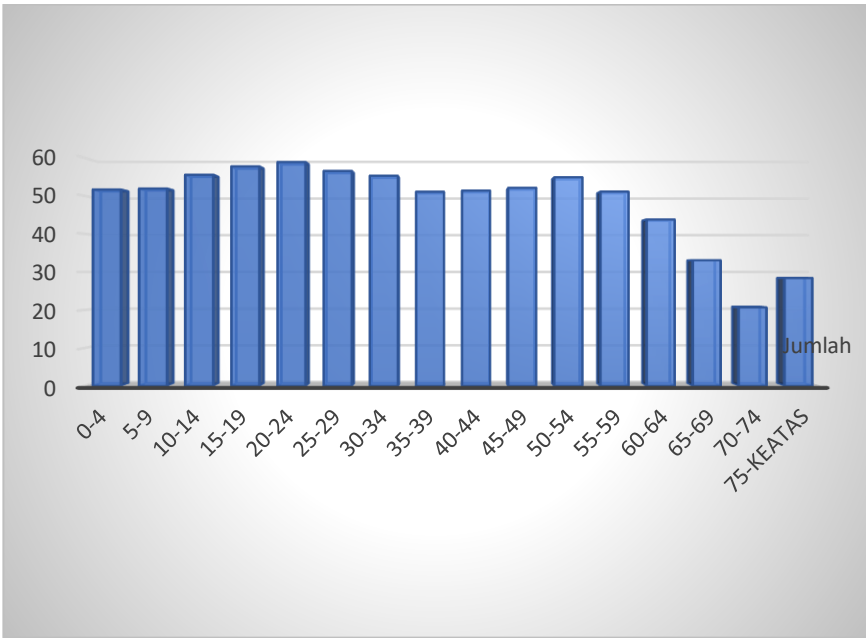
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	23.252	21.470	44.722
05-09	28.128	26.579	54.707
10-14	29.829	28.460	58.289
15-19	30.832	29.179	60.011
20-24	30.606	28.837	59.443
25-29	31.302	29.032	60.334
30-34	29.447	27.294	56.741
35-39	27.513	26.550	54.063
40-44	28.033	27.553	55.586
45-49	26.752	26.312	53.064
50-54	25.094	26.391	51.485
55-59	25.886	28.099	53.985
60-64	23.635	25.550	49.185
65-69	19.776	21.035	40.811
70-74	12.522	13.193	25.715
75 keatas	13.694	18.505	32.199
Jumlah	406.301	404.039	810.340

Sumber : DKB (Data Konsolidasi Bersih)
DISDUKCAPIL Semester 2 Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prosentase penduduk terbesar berada pada rentang usia 25-29 tahun dengan persentase sebesar 7,45%. Kemudian sebesar 68,35% Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun. Artinya bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 berada pada rentang usia produktif.

Gambar 1.3.
Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2025



Sumber : Diolah dari data DISDUKCAPIL Kab. Purworejo, 2026

Laju pertumbuhan dari tahun 2024 ke tahun 2025 adalah sebesar 0.08%. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2024 berjumlah 809,651 jiwa dan pada Tahun 2025 sebesar 810.340, mengalami kenaikan sejumlah 689 jiwa per Desember 2025.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah desa dan luas menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Desa dan Luas Kecamatan
Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	Jml Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Grabag	32	67,80
2.	Ngombol	57	59,33
3.	Purwodadi	40	56,15
4.	Bagelen	17	63,44
5.	Kaligesing	21	78,33
6.	Purworejo	25	53,25
7.	Banyuurip	27	47,78
8.	Bayan	26	44,66
9.	Kutoarjo	27	39,20
10.	Butuh	41	47,21
11.	Pituruh	49	89,01

No.	Kecamatan	Jml Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
12.	Kemiri	40	103,15
13.	Bruno	18	105,68
14.	Gebang	25	70,51
15.	Loano	21	53,51
16.	Bener	28	102,44
	Jumlah	494	1.081,45

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Dasar Hukum pembentukannya di Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Dasar Hukum di Pemerintah Kabupaten Purworejo

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2022
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022
3	Inspektorat Daerah	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2022
5	Dinas Kesehatan Daerah	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024
6	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 143 Tahun 2022
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2022
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Ddn Pertanahan	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2022
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 125 Tahun 2022
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 126 Tahun 2022
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022
14	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 128 Tahun 2022

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 129 Tahun 2022
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2022
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2022
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022
20	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022
22	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2024
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2022
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 138 Tahun 2022
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2022
27	Kecamatan	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023
43	Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2020

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo,
31 Desember 2025

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, penyelenggaraannya berdasarkan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			MANAJE RIAL	FUNGSI ONAL	PELAK SANA	
1	Sekretariat Daerah	Fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya	10	26	78	114
2	Sekretariat DPRD	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	5	3	27	35

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			MANAJE RIAL	FUNGSI ONAL	PELAK SANA	
3	Staf Ahli	Fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya	3	0	0	3
4	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	9	41	12	62
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	6	1	11	18
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan	7	13	9	29
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan	7	13	11	31
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana	7	4	40	51
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan	22	5	71	98
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan	9	5052	405	5466
11	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	11	8	37	56
12	Dinas Kesehatan Daerah	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	8	1261	128	1397
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	7	12	18	37
14	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi	7	22	21	50
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	7	1	19	27
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, bidang olahraga dan bidang pariwisata	9	1	40	50
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan	5	14	16	35
18	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Urusan pemerintahan bidang sosial bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana	11	3	20	34

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			MANAJE RIAL	FUNGSI ONAL	PELAK SANA	
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7	7	47	61
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian	11	139	48	198
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang Perdagangan	9	9	94	112
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta bidang Kelautan dan Perikanan	10	13	83	90
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	3	4	18	25
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	10	2	24	36
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	21	26	158	205
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran	13	50	44	107
27	RSUD dr. Tjitrowardojo	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	13	357	68	438
28	RSUD Raden Adipati Arya Tjokronegoro	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	11	273	33	317
29	Kecamatan Bagelen	Urusan Kewilayahan	7	2	6	15
30	Kecamatan Banyuurip	Urusan Kewilayahan	20	1	11	32
31	Kecamatan Bayan	Urusan Kewilayahan	12	2	10	24
32	Kecamatan Bener	Urusan Kewilayahan	7	1	4	12
33	Kecamatan Bruno	Urusan Kewilayahan	7	2	7	16
34	Kecamatan Butuh	Urusan Kewilayahan	8	3	11	22
35	Kecamatan Gebang	Urusan Kewilayahan	10	2	8	20
36	Kecamatan Grabag	Urusan Kewilayahan	8	2	6	16
37	Kecamatan Kaligesing	Urusan Kewilayahan	8	2	3	13
38	Kecamatan Kemiri	Urusan Kewilayahan	7	2	9	18
39	Kecamatan Kutoarjo	Urusan Kewilayahan	32	2	16	50
40	Kecamatan Loano	Urusan Kewilayahan	7	1	6	14
41	Kecamatan Ngombol	Urusan Kewilayahan	8	1	8	17
42	Kecamatan Pituruh	Urusan Kewilayahan	7	1	10	18
43	Kecamatan Purwodadi	Urusan Kewilayahan	6	2	5	13
44	Kecamatan Purworejo	Urusan Kewilayahan	65	2	21	88
JUMLAH			477	7388	1721	9586

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purworejo, 27 Februari 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ASN di Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 9.586 pegawai yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan rincian Pejabat Manajerial 477 orang, Pejabat Fungsional 7.388 orang dan Pejabat Pelaksana 1.721 orang.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel 1.6 di bawah ini :

Tabel 1.6
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.475.346.309.493,00	2.411.368.956.814,00	97,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	554.994.672.704,00	555.841.347.612,00	100,15
4.1.1	Pajak Daerah	168.432.135.537,00	156.150.266.963,00	92,71
4.1.2	Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	371.509.317.098,00	101,95
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.193.931.405,00	8.906.990.206,00	171,49
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.920.351.636.789,00	1.855.527.609.202,00	96,62
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.709.350.789,00	1.755.061.617.765,00	96,87
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	100
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	100
5	BELANJA DAERAH	2.558.567.067.871,00	2.361.944.653.660,00	92,32
5.1	BELANJA OPERASI	1.747.857.814.423,00	1.655.660.595.938,00	94,73
5.1.1	Belanja Pegawai	1.080.075.789.263,00	1.020.876.756.492,00	94,52
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	583.124.531.234,00	553.171.845.477,00	94,86
5.1.5	Belanja Hibah	77.578.953.926,00	74.999.495.519,00	96,68
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42
5.2	BELANJA MODAL	237.515.127.221,00	216.216.505.408,00	91,03
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.012.395.176,00	67.629.434.891,00	80,5
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,7
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	347.530.919,00	294.429.800,00	84,72
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.075.277.906,00	0	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.075.277.906,00	0	0
5.4	BELANJA TRANSFER	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
	Surplus / (Defisit)	-83.220.758.378,00	49.424.303.154,00	-59,39
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	100
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	132.645.061.532,00	100

Sumber : Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Per Tanggal 10 Februari 2026

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp85.220.758.378,00** (delapan puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar **Rp2.000.000.000,00** (dua milyar rupiah).

Dengan demikian, berarti terdapat relisasi pembiayaan netto sebagai selisih antara penerimaan pembiayan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar **Rp83.220.758.378,00** (delapan puluh tiga milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Karena dari realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah menyebabkan adanya defisit sebesar **(Rp49.424.303.154,00)** (empat puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah) ditambah pembiayaan netto sebesar **Rp83.220.758.378,00** (delapan puluh tiga milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) maka Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan terealisasi sebesar **Rp132.645.061.532,00** (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Rincian realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.7
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.475.346.309.493,00	2.411.368.956.814,00	97,42
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	554.994.672.704,00	555.841.347.612,00	100,15
4.1.1	Pajak Daerah	168.432.135.537,00	156.150.266.963,00	92,71
4.1.2	Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	371.509.317.098,00	101,95
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.193.931.405,00	8.906.990.206,00	171,49
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.920.351.636.789,00	1.855.527.609.202,00	96,62
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.709.350.789,00	1.755.061.617.765,00	96,87
4.2.1.05	Dana Desa	368.832.284.000,00	307.088.516.196,00	83,26
4.2.1.06	Insentif Fiskal	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	100
4.2.1.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	34.342.196.000,00	33.590.045.100,00	99,37
4.2.1.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.032.283.504.000,00	1.040.886.124.073,00	100,83
4.2.1.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	369.687.265.789,00	366.932.831.396,00	99,25
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	93.891.286.000,00	85.869.941.637,00	91,46
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	14.751.000.000,00	14.596.049.800,00	98,95
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	100,00

Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Tanggal 13 Feb 2026

Sesuai tabel 1.7 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp2.411.368.956.814,00** (Dua trilyun empat ratus sebelas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) dengan capaian **97,42%** dari target APBD **Rp2.475.346.309.493,00** (Dua trilyun empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Rincian realisasi pendapatan menurut jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.558.567.067.871,00	2.361.944.653.660,00	92,32
5.1	BELANJA OPERASI	1.747.857.814.423,00	1.655.660.595.938,00	94,73
5.1.1	Belanja Pegawai	1.080.075.789.263,00	1.020.876.756.492,00	94,52
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	583.124.531.234,00	553.171.845.477,00	94,86
5.1.5	Belanja Hibah	77.578.953.926,00	74.999.495.519,00	96,68
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42
5.2	BELANJA MODAL	237.515.127.221,00	216.216.505.408,00	91,03
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.012.395.176,00	67.629.434.891,00	80,5
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,7
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	347.530.919,00	294.429.800,00	84,72
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.075.277.906,00	0	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.075.277.906,00	0	0
5.4	BELANJA TRANSFER	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15
	Surplus / (Defisit)	-83.220.758.378,00	49.424.303.154,00	-59,39

Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Tanggal 13 Februari 2026

Secara keseluruhan realisasi belanja daerah dapat tercapai sebesar **92,32%** atau **Rp2.361.944.653.660,00** (Dua trilyun tiga ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) dari target yang dianggarkan sebesar **Rp2.558.567.067.871,00** (Dua trilyun lima ratus lima puluh delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Dengan demikian, berarti terdapat sisa belanja daerah sebesar **Rp196.622.414.211,00** (Seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sebelas rupiah).

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau

menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah.

Tabel 1.9
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	100,00
	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	100
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		132.645.061.532,00	

Sumber : BPKPAD Kab.Purworejo, Tanggal 13 Feb 2026

Dalam pelaksanaan program penganggaran tahun 2025 dijabarkan berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel I.10
Rincian Program berdasarkan urusan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan		742.965.050.815,00	703.563.459.992,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	598.425.959.726,00	563.888.022.817,00
b	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	144.482.039.889,00	139.643.565.675,00
c	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	20.944.500,00	6.976.400,00
d	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	662.000,00	662.000,00
e	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	7.147.300,00	3.005.700,00
f	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	28.297.400,00	21.227.400,00
2	Kesehatan		635.542.137.258,00	601.328.418.936,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	499.448.541.645,00	477.068.960.935,00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134.180.574.788,00	122.616.176.428,00
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	961.915.160,00	878.166.514,00
d	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	239.097.865,00	167.979.269,00
e	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	712.007.800,00	597.135.790,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		123.360.011.046,00	119.749.301.810,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.980.670.223,00	14.990.392.585,00
b	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.706.152.398,00	9.484.593.745,00
c	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	308.583.000,00	301.454.847,00
d	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.106.284.425,00	6.484.270.474,00
e	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	993.001.000,00	983.171.411,00
f	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	7.604.579.800,00	7.462.849.011,00
g	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0	0
h	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	80.843.271.800,00	79.296.669.511,00
i	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	152.598.000,00	124.319.168,00
j	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	664.870.400,00	621.581.058,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		7.980.027.259,00	7.638.158.017,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.717.505.759,00	3.657.267.895,00
b	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	238.933.100,00	234.167.702,00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	65.481.200,00	63.225.744,00
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	124.288.000,00	109.841.538,00
c	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	1.239.345.300,00	1.037.679.386,00
d	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.571.012.600,00	1.529.264.153,00
e	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.213.230.500,00	1.179.778.881,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		19.563.423.327,00	18.357.514.402,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.564.252.681,00	8.256.654.508,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
b	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.822.647.597,00	2.684.343.274,00
c	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.002.276.960,00	888.278.886,00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.998.901.413,00	3.687.213.608,00
e	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	3.175.344.676,00	2.841.024.126,00
6	Sosial		11.608.285.306,00	10.608.631.236,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.077.672.784,00	4.875.945.557,00
b	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	16.024.800,00	15.341.000,00
c	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	990.000,00	420.000,00
d	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	268.640.000,00	185.112.080,00
e	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.376.924.700,00	5.864.190.010,00
f	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	150.088.500,00	123.729.938,00
g	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80.270.100,00	78.941.581,00
8	Tenaga Kerja		2.233.980.602,00	2.204.410.996,00
a	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	13.009.400,00	13.003.203,00
b	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.887.270.902,00	1.872.390.063,00
c	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	71.693.300,00	71.244.934,00
d	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	262.007.000,00	247.772.796,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		5.387.288.474,00	5.117.483.388,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.468.716.004,00	4.261.290.357,00
b	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	181.705.300,00	181.691.700,00
c	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	432.511.000,00	415.718.248,00
d	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	8.127.600,00	8.127.600,00
e	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	13.450.000,00	13.362.244,00
f	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	124.707.900,00	124.179.559,00
g	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	191.443.400,00	181.722.700,00
9	Pangan		22.458.077.863,00	21.378.137.120,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.120.625.763,00	19.084.906.593,00
b	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan	1.231.619.700,00	1.207.387.839,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
		Ketahanan Pangan Masyarakat		
c	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	61.464.900,00	59.797.897,00
d	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	24.791.500,00	23.191.824,00
10	Pertanahan		189.769.200,00	173.067.282,00
a	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	65.481.200,00	63.225.744,00
b	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	124.288.000,00	109.841.538,00
11	Lingkungan Hidup		18.688.929.270,00	17.686.959.900,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.456.877.462,00	8.927.172.063,00
b	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	134.257.150,00	129.855.700,00
c	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	787.592.690,00	735.195.668,00
d	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.303.692.372,00	3.253.975.577,00
e	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	33.000.000,00	32.956.880,00
f	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	34.966.000,00	34.925.000,00
g	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	21.901.300,00	21.819.200,00
h	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	81.281.500,00	80.565.400,00
i	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56.879.900,00	56.428.900,00
j	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.645.300,00	3.645.300,00
k	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	4.774.835.596,00	4.410.420.212,00
12	Administrasi Kependudukan dan Capil		7.852.622.298,00	7.256.770.795,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.910.526.788,00	5.554.309.789,00
b	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	1.549.810.000,00	1.314.203.630,00
c	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	51.873.700,00	48.336.000,00
d	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	338.291.810,00	337.841.376,00
e	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2.120.000,00	2.080.000,00
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa		8.399.414.300,00	8.161.601.125,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
a	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa	94.986.200,00	94.767.488,00
b	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	59.705.200,00	59.648.600,00
c	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.875.318.300,00	5.640.186.317,00
d	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.369.404.600,00	2.366.998.720,00
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		14.242.031.300,00	13.849.684.310,00
a	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	9.353.272.700,00	9.055.964.146,00
b	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	644.854.000,00	606.545.247,00
c	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	4.243.904.600,00	4.187.174.917,00
15	Perhubungan		23.611.358.063,00	21.545.921.310,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.387.099.381,00	4.897.818.418,00
b	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	18.224.258.682,00	16.648.102.892,00
16	Komunikasi dan Informatika		9.247.590.959,00	8.877.787.668,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.088.772.879,00	3.910.544.167,00
b	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.520.656.400,00	1.496.352.118,00
c	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.638.161.680,00	3.470.891.383,00
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		12.142.107.972,00	11.077.984.932,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.112.608.972,00	9.098.720.988,00
b	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	4.375.850,00	2.826.717,00
c	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	17.900.350,00	14.401.161,00
d	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	33.870.900,00	26.081.569,00
e	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	111.564.900,00	106.979.982,00
f	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	227.439.200,00	218.130.085,00
g	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	958.401.200,00	940.854.719,00
h	Program Pengembangan Umkm	Program Pengembangan Umkm	675.946.600,00	669.989.711,00
18	Penanaman Modal		3.968.035.394,00	3.611.023.064,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.966.758.034,00	2.626.318.043,00
b	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199.165.160,00	198.113.443,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
c	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	329.994.900,00	328.630.390,00
d	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	175.004.200,00	173.618.096,00
e	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	265.109.000,00	252.786.356,00
f	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.004.100,00	31.556.736,00
19	Kepemudaan dan Olah Raga		13.999.510.744,00	13.421.131.464,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.369.516.244,00	4.959.751.296,00
b	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	502.113.900,00	459.095.298,00
c	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.759.746.800,00	7.634.259.847,00
d	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	368.133.800,00	368.025.023,00
20	Statistik		76.322.900,00	75.935.548,00
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	76.322.900,00	75.935.548,00
21	Persandian		148.640.500,00	147.627.554,00
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	148.640.500,00	147.627.554,00
22	Kebudayaan		5.660.200.403,00	5.549.904.286,00
a	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	3.451.687.155,00	3.404.534.713,00
b	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	80.007.500,00	79.871.500,00
c	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	700.709.088,00	688.028.800,00
d	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	223.165.960,00	221.398.201,00
e	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	1.204.630.700,00	1.156.071.072,00
23	Perpustakaan		5.899.582.522,00	5.662.762.454,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.333.270.722,00	4.125.099.168,00
b	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	1.541.746.800,00	1.513.200.351,00
c	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	24.565.000,00	24.462.935,00
24	Kearsipan		240.855.300,00	237.375.869,00
a	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	229.035.500,00	225.866.569,00
b	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	11.819.800,00	11.509.300,00
25	Kelautan dan Perikanan		1.156.161.000,00	1.134.229.816,00
a	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	65.771.800,00	65.200.442,00
b	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.007.146.400,00	987.007.774,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
c	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	31.368.500,00	30.810.000,00
d	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	51.874.300,00	51.211.600,00
26	Pariwisata		17.109.434.967,00	10.822.926.130,00
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	16.137.305.167,00	9.871.642.952,00
b	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	818.611.200,00	801.045.104,00
c	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	21.216.100,00	21.139.200,00
d	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	132.302.500,00	129.098.874,00
27	Pertanian		23.505.758.520,00	22.112.082.570,00
a	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.972.454.800,00	13.135.636.425,00
b	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.875.803.500,00	6.850.657.460,00
c	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	160.032.600,00	155.632.763,00
d	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154.209.400,00	151.652.395,00
e	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	2.332.578.220,00	1.807.823.527,00
f	Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.680.000,00	10.680.000,00
28	Perdagangan		5.414.242.340,00	4.843.347.041,00
a	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.398.900.320,00	3.868.620.351,00
b	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	158.392.200,00	151.551.264,00
c	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	720.736.250,00	701.181.020,00
d	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	116.519.750,00	103.327.529,00
e	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	19.693.820,00	18.666.877,00
29	Perindustrian		8.125.553.051,00	7.840.804.728,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.537.616.451,00	7.256.275.002,00
b	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	558.639.600,00	555.497.726,00
c	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	9.580.000,00	9.330.000,00
d	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	19.717.000,00	19.702.000,00
30	Transmigrasi		44.933.200,00	40.393.941,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
a	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	44.933.200,00	40.393.941,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		100.327.723.728,00	94.043.517.659,00
31	Sekretariat Daerah		35.051.497.561,00	34.208.540.858,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.243.586.379,00	38.238.303.378,00
b	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11.361.544.300,00	11.088.138.182,00
c	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	428.912.600,00	426.945.706,00
32	Sekretariat DPRD		60.084.137.349,00	55.805.214.281,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.280.411.840,00	33.198.351.688,00
b	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	23.803.725.509,00	22.606.862.593,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		610.643.360.426,00	522.761.726.005,00
33	Perencanaan		5.992.022.565,00	5.452.159.218,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.619.959.265,00	4.093.018.653,00
b	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	747.462.500,00	739.531.800,00
c	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	624.600.800,00	619.608.765,00
34	Keuangan		597.358.998.089,00	510.302.170.231,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.147.957.610,00	15.084.343.307,00
b	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	574.130.206.627,00	490.973.921.855,00
c	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	854.220.200,00	562.045.334,00
d	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.226.613.652,00	3.681.859.735,00
35	Kepegawaian		5.368.527.392,00	5.117.398.688,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.172.764.322,00	4.104.269.145,00
b	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	1.195.763.070,00	1.013.129.543,00
36	Pendidikan dan Pelatihan		1.053.754.780,00	1.044.424.908,00
a	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.053.754.780,00	1.044.424.908,00
37	Penelitian dan Pengembangan		870.057.600,00	845.572.960,00
a	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	870.057.600,00	845.572.960,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		12.303.443.662,00	12.025.639.275,00
38	Inspektorat		12.303.443.662,00	12.025.639.275,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.037.787.462,00	10.779.770.555,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
b	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	810.715.300,00	794.214.455,00
c	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	454.940.900,00	451.654.265,00
	UNSUR KEWILAYAHAN		72.850.362.665,00	68.736.240.628,00
39	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		72.850.362.665,00	68.736.240.628,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.348.707.165,00	49.606.800.983,00
b	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	315.359.500,00	307.364.012,00
c	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	17.664.833.300,00	17.397.349.803,00
d	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	264.800.600,00	252.362.094,00
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	400.486.300,00	397.624.738,00
f	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	785.060.300,00	728.547.822,00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		11.620.841.237,00	10.302.692.409,00
40	Kesatuan Bangsa dan Politik		11.620.841.237,00	10.302.692.409,00
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.744.719.845,00	2.557.362.218,00
b	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.559.339.700,00	1.434.030.830,00
c	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.828.987.000,00	1.564.713.646,00
d	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.664.719.292,00	3.445.881.056,00
e	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	189.594.600,00	156.165.400,00
f	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.633.480.800,00	1.144.539.259,00
			2.558.567.067.871,00	2.361.944.653.660,00

Sumber : BPKPAD Kab. Purworejo 2026

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, permasalahan pembangunan Kabupaten Purworejo terdiri dari permasalahan daerah yang berhubungan dengan

indikator kinerja utama, permasalahan daerah yang berhubungan dengan sasaran pemerintah daerah, serta permasalahan yang berhubungan dengan program pemerintah daerah. Adapun rincian permasalahan strategis daerah adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama antara lain :

- a) Perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purworejo.
- b) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo.
- c) Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purworejo.
- d) Perlunya Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- e) Perlunya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo.
- f) Indeks Reformasi Birokrasi yang masih perlu ditingkatkan.
- g) Perlunya penurunan Indeks Risiko Bencana.

2) Permasalahan yang Berhubungan dengan Sasaran Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Sasaran Pemerintah Daerah antara lain:

- a) Belum optimalnya rata-rata lama sekolah.
- b) Harapan Lama Sekolah yang belum optimal.
- c) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- d) Masih tingginya kelompok RT 20% berpenghasilan terendah.
- e) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang belum optimal.
- f) Belum optimalnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- g) Belum optimalnya PDRB per Kapita.
- h) Indeks Desa Membangun yang belum optimal.
- i) Masih rendahnya Nilai SAKIP.
- j) Indeks Pelayanan Publik yang masih perlu ditingkatkan.
- k) Belum optimalnya peningkatan Indeks Inovasi Daerah.
- l) Indeks Infrastruktur Daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian karena capaiannya belum optimal.

3) Permasalahan yang Berhubungan dengan Program Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Program Pemerintah Daerah antara lain :

- a) Belum optimalnya Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD.
- b) Belum optimalnya Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar.
- c) Belum Optimalnya Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama.

- d) Perlunya Peningkatan Pengunjung Perpustakaan.
- e) Belum Optimalnya Indeks Pemberdayaan Gender.
- f) Belum optimalnya Tingkat Kesempatan Kerja.
- g) Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan.
- h) Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda.
- i) Masih rendahnya Pertumbuhan PMTB.
- j) Belum Optimalnya Indeks Pelayanan Publik.
- k) Belum Optimalnya Indeks Inovasi Daerah.
- l) Belum Optimalnya Indeks Infrastruktur Daerah.

Dari hasil identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut serta penggalian dari data-data pembangunan dalam 5 tahun terakhir, terdapat lima isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ini, yaitu:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menekan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi perlu semakin dikembangkan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Purworejo seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang dalam beberapa tahun terakhir menyumbangkan proporsi PDRB yang tinggi.

2) Kemiskinan

Usaha untuk mengentaskan kemiskinan terutama di desa/kelurahan prioritas adalah dengan melakukan program “Sanding Erat Desa Kita”. Sanding Erat Desa Kita adalah akronim dari Satu Pendamping Perangkat Daerah di Desa Prioritas untuk Masyarakat “Kita” (Kuat secara ekonomi, Inovatif, Tata tentrem, Ayem lan akur) yang merupakan program adopsi dari Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan program pendampingan desa-desa merah oleh masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin terutama rumah tangga miskin yang berada di ranking kesejahteraan 0-20 menjadi tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Menyediakan akses terhadap jaminan kesehatan, pendidikan, sosial, serta infrastruktur layanan dasar yang layak mencakup air minum, sanitasi, hunian, dan listrik. Dengan demikian diperlukan strategi dan kebijakan terkait penjaminan pemenuhan basic needs access bagi masyarakat miskin dan pengembangan kehidupan ekonomi

berkelanjutan (sustainable livelihood) sehingga dapat menekan beban pengeluaran masyarakat.

3) Kebencanaan dan Pelestarian Lingkungan

Kabupaten Purworejo memiliki nilai indeks risiko bencana sebesar 215,2 dan menjadi kabupaten dengan nilai IRBI tertinggi di Provinsi Jawa Tengah serta nomor 4 tertinggi secara nasional. Upaya untuk mengatasinya dengan peningkatan kapasitas terkait penanggulangan bencana alam, konsep penataan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan. Melihat dari sisi lingkungan, upaya pengelolaan sumber daya alam melalui perlindungan kualitas air, udara, dan tanah. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan dengan sosialisasi terkait upaya preventif dan upaya mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat.

4) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan. Upaya-upaya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan peningkatan nilai IPM dengan:

- a) Meningkatkan mutu dan akses pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan yang berkualitas harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk usia sekolah, peningkatan budaya literasi baik secara digital maupun konvensional serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter juga menjadi tantangan dalam mengatasi isu kualitas sumber daya manusia.
- b) Menurunkan disparitas akses pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan.

5) Tata Kelola Kelembagaan

Tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang berkualitas. Upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur sesuai dengan formasi jabatan dan penguatan kelembagaan.

Selanjutnya, dari isu-isu strategis tersebut, ditentukan tema pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 yakni **“Mewujudkan Purworejo yang Berdaya Saing”**.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025 akan dicapai melalui 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

a. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan

Prioritas daerah Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Pertumbuhan Ekonomi” di Bab II. Prioritas ini diarahkan pada program peningkatan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; program peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan; program peningkatan nilai tambah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; program peningkatan nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; program peningkatan investasi daerah; serta program pembangunan perdesaan. Prioritas pembangunan ini di tahun 2025 difokuskan pada:

- 1) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sebagai sektor dominan di Kabupaten Purworejo yang diukur dengan kenaikan nilai PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan target sebesar 3.086.885,13 (dalam juta rupiah) pada tahun 2025.
- 2) Peningkatan sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Purworejo yang diukur melalui Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan yang ditargetkan sebesar 7,00% pada tahun 2025.
- 3) Peningkatan daya saing sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda yang ditargetkan sebesar 5,76% pada tahun 2025.
- 4) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dan kebudayaan berbasis sumber daya lokal dan mendukung pada pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum dengan target sebesar 6,62% pada tahun 2025.
- 5) Peningkatan investasi daerah direpresentasikan melalui pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan target sebesar 6,20% pada tahun 2025.
- 6) Peningkatan pembangunan perdesaan dengan mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan yang diukur melalui Persentase Desa Mandiri dan Maju dengan target sebesar 74,63% pada tahun 2025.

b. Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana

Prioritas daerah Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Kebencanaan dan Pelestarian Lingkungan”. Prioritas ini diarahkan pada program akses infrastruktur, program pengelolaan lingkungan hidup, serta program penanggulangan dan penanganan bencana. Prioritas pembangunan ini di tahun 2025 difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan permukiman yang meliputi jaringan transportasi, air bersih, air limbah, drainase, energi kelistrikan, telekomunikasi dan persampahan yang diukur melalui Indeks Infrastruktur Daerah dengan target 92,97 pada tahun 2025.
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan target 65,73 pada tahun 2025, yang dapat dijabarkan dalam IKA, IKU, dan IKTL.
- 3) Peningkatan kapasitas daerah serta masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan bencana daerah yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,81 pada tahun 2025.

c. Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Prioritas daerah Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Kualitas Sumber Daya Manusia” di Bab II. Prioritas ini diarahkan pada program pendidikan, program literasi, program kesehatan, program pemenuhan ketersediaan pangan, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, program pemberdayaan gender dan perlindungan anak, serta program pembangunan pemuda dan olahraga. Prioritas pembangunan ini di tahun 2025 difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang diukur dengan persentase partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang pada tahun 2025 ditargetkan masing-masing sebesar 100%.
- 2) Guna menunjang kualitas pendidikan perlu didorong melalui peningkatan minat baca dan literasi masyarakat yang diukur dengan peningkatan pengunjung

perpustakaan ditargetkan sebesar 5% yang pada tahun 2025.

- 3) Pembangunan kesehatan melalui peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan yang diukur dengan peningkatan angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar 75,45 pada tahun 2025.
- 4) Peningkatan ketersediaan pangan utama yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan yang ditargetkan sebesar 256 kilogram per kapita pada tahun 2025.
- 5) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dengan indikator total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total ditargetkan sebesar 1,16 yang pada tahun 2025.
- 6) Peningkatan kesetaraan gender serta pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator indeks pemberdayaan gender yang ditargetkan sebesar 75,22 pada tahun 2025.
- 7) Pembangunan pemuda dan olahraga diukur dengan indikator persentase organisasi kepemudaan dan olahraga yang aktif yang ditargetkan sebesar 100,00% pada tahun 2025.

d. Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas daerah Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Kemiskinan” di Bab II. Prioritas ini diarahkan pada program penanganan PPKS dan program peningkatan kesempatan kerja. Prioritas pembangunan ini di tahun 2025 difokuskan pada:

- 1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2025. Dilakukan pendekatan pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran, sustainable livelihood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Sasaran program ini terutama untuk penduduk miskin dan rentan miskin dan kelompok rentan lainnya.
- 2) Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memperluas kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran terbuka diukur dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97,17%.

e. Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan

Prioritas daerah Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan merupakan tindak lanjut dari isu strategis “Tata Kelola Kelembagaan”. Prioritas ini diarahkan pada program manajemen berbasis risiko, program peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, program peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, program manajemen sumber daya aparatur, program peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program peningkatan inovasi daerah. Prioritas pembangunan ini di tahun 2025 difokuskan pada:

- 1) Peningkatan efektivitas manajemen berbasis risiko dalam pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah yang diukur melalui Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada tahun 2025 ditargetkan 3,035.
- 2) Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah yang diukur indikator pencapaian opini BPK pada tahun 2025 ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang sinergi, sinkron, dan terintegrasi dalam pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang diukur dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 99,25.
- 4) Penguatan manajemen sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan indikator Indeks Sistem Merit ditargetkan sebesar 0,77 pada tahun 2025.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ditargetkan sebesar 4,30 pada tahun 2025.
- 6) Penguatan inovasi daerah melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat diukur dengan indikator Indeks Inovasi Daerah ditargetkan sebesar 70 pada tahun 2025.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Purworejo yaitu:

“Purworejo Berdaya Saing 2025.”

Visi tersebut, dijabarkan kedalam 5 Misi disebut juga “*Panca Daya Saing*”, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan

- keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.
 - 3) Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
 - 4) Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - 5) Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pememerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Guna mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tersebut, Program Pembangunan Daerah beserta indikator dan target kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satua n	Target Tahun 2025	
								RPJM D	RKP D
1			2		3		4	5	6
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul Dalam Arti Luas, Mengedepankan Kompetensi Keahlian dan Keilmuan yang Berbasis pada Religiusitas Masyarakat									
T			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia						
	S		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia						
		P	Program Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD			%	100	100
				Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			%	100	100
				Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama			%	100	100
		P	Program Literasi	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan			%	5	15,00 *
	S		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
		P	Program Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)			tahun	75,45	75,55 *

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	
					RPJMD	RKPD
1	2		3	4	5	6
S	Meningkatnya Ketahanan Pangan					
	P	Program Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	kg/kapita	251	256*
S	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk					
	P	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1	1,16*
S	Terwujudnya Kesenjangan Pembangunan Gender					
	P	Program Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	75,22	75,22
S	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga					
	P	Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	98,81	100,00*
T	Penurunan Angka Kemiskinan					
S	Berkurangnya Penduduk Miskin					
	P	Program Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Tertangani	%	100	100
T	Pengurangan Tingkat Pengangguran					
S	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja					
	P	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,17	97,17
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian dalam Arti Luas yang Sinergi dengan Pengembangan UMKM, Perdagangan, dan Industri						
T	Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
S	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
	P	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	3.086.885,13	3.086.885,13
Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis UMKM, Perdagangan, Industri, serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya						
T	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi					
S	Meningkatnya PDRB Per Kapita					
	P	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	7	7
	P	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	5,76	5,76
	P	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	6,62	9,79*
	P	Program Peningkatan Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	%	6,2	6,2
S	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan					
	P	Program Pembangunan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	35,39	74,63
Misi 4: Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
T	Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia					

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Target Tahun 2025	
						RPJM D	RKP D
1			2	3	4	5	6
	S		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
		P	Program Manajemen Berbasis Risiko	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	2,95	3,035*
		P	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK	opini	WTP	WTP
		P	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	93	99,25*
	S		Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel				
		P	Program Manajemen Sumber Daya Aparatur	Indeks Sistem Merit	indeks	0,73	0,77*
	S		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima				
		P	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,3	4,3
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	indeks	70	70
Misi 5: Meningkatkan Daya Saing Sarana Prasarana dan Infrastruktur yang Didukung Kemajuan Teknologi Informasi							
T			Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan				
	S		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum				
		P	Program Akses Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	92,97	92,97
	S		Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan				
		P	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	65,73	76,04*
	S		Meningkatnya Ketahanan Deaerah terhadap Bencana				
		P	Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,65	0,81*

Keterangan: M = Misi S = Sasaran Daerah
T = Tujuan Daerah P = Program Pembangunan Daerah
Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026
* Perubahan target pada RKPD Tahun 2025

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Untuk meralisasikan target-target program pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah beserta pagu anggarannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.12
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	372.000,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	290.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	89.319.000,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	245.072.300,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.489.466.800,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.245.357.460,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	451.643.000,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	3.783.033.600,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	742.389.700,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.340.800,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	307.870.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25.395.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.613.130.079,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	55.408.000,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	32.434.600,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.733.500,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.741.100,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.730.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.074.137.800,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65.842.050,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	717.014.200,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.713.392.900,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	8.555.015.800,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.431.883.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.489.466.800,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	451.643.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	340.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.074.137.800,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	3.783.033.600,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.515.754.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	742.389.700,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.864.500,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	137.272.800,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25.395.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30.275.645.000,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.981.200,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13.811.400,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	32.434.600,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.733.500,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	717.014.200,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.730.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65.842.050,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.245.357.460,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.431.883.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.545.353.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.001.678.400,00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.419.200.000,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	60.579.500,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.733.500,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	611.900.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.713.392.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	156.027.800,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	95.227.100,00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.855.123.500,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.733.500,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	717.014.200,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.713.392.900,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	28.297.400,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.944.500,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Kegiatan : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.369.200,00
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.307.800,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.470.300,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.950.200,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	25.336.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	668.721.600,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	5.272.058.360,00
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.618.745.203,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	796.500.300,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	474.646.600,00
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.946.613.954,00
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	284.213.760,00
		Pengembangan Rumah Sakit	28.077.749.400,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.163.693.751,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	2.036.600,00
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	107.084.500,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.611.480.900,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.122.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	62.347.550,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	226.143.500,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	504.302.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	52.696.500,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	309.275.700,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.536.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.100.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	202.157.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	354.803.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	23.448.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.418.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	6.869.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.830.728.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	127.877.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	287.201.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	433.892.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.856.000,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	496.540.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	97.130.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.880.000,00
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	8.750.800,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.804.962.800,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	54.450.220.000,00
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	2.708.800,00
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	458.677.700,00
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	26.373.800,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.696.205.800,00
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	110.649.000,00
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3.210.700,00
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60.679.520,00
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	330.664.891,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.467.200,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.807.000,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	640.440.200,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	449.266.000,00
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	178.721.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	127.700.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	313.060.599,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.542.300,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	89.315.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.902.160,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.800.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	83.317.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	859.896.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	357.585.641.619,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	23.132.700,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	oleh Industri Rumah Tangga		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	9.185.140,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.687.025,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	197.093.000,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.460.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50.000.000,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.056.284.425,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	993.001.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	14.773.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	57.019.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	215.000.000,00
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	21.791.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	18.483.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.077.572.900,00
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	599.647.200,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.775.981.298,00
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	108.380.000,00
		Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	36.658.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	89.430.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	77.076.800,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	22.955.400,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	52.565.800,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	635.524.000,00
		Penggantian Jembatan	6.000.000.000,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	2.474.000.000,00
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	400.000.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	183.454.000,00
		Rehabilitasi Jalan	50.741.921.116,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	20.408.372.684,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	37.316.700,00
		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	27.408.900,00
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	94.235.800,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar	67.901.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	170.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	129.250.000,00
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	42.292.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	17.184.000,00
		Penilaian Perwujudan RTR	79.282.000,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	46.360.200,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	222.203.500,00
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	970.781.600,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.855.600,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	3.280.900,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.435.600,00
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.692.900,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan :	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	220.797.700,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.403.400,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.467.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.201.917.200,00
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	11.313.300,00
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.571.012.600,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	43.005.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.185.456.600,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	106.018.700,00
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	136.196.500,00
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	29.684.800,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	239.300.800,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	255.808.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	113.355.900,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	514.666.200,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.935.400,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	447.073.576,00
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	10.990.000,00
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.875.100,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	40.793.400,00
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	21.848.800,00
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	13.335.900,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	336.651.800,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	77.438.600,00
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	242.950.000,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	27.735.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	113.964.300,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	97.630.660,00
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.624.000,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.962.800,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	5.429.800,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	78.170.000,00
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	11.720.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	474.120.400,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	27.402.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	6.600.700,00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	250.723.700,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2.307.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23.160.400,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	525.000.000,00
		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	11.863.000,00
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	111.447.300,00
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.063.132.397,00
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	283.857.700,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	36.693.300,00
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6.339.700,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.965.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Kegiatan : Pengembangan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.776.200,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	7.283.600,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	87.534.500,00
		Penyediaan Sandang	28.318.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.140.000,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	5.510.000,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3.108.000,00
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	12.478.000,00
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	990.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38.119.300,00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.150.800,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	390.912.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	311.440.400,00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.017.700,00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.414.920.000,00
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.255.634.600,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	99.465.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.000.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.669.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	55.806.000,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	103.700.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	9.747.800,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	18.489.200,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	113.770.000,00
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	120.000.000,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.859.030.602,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8.317.700,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	19.922.600,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Kegiatan : Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	43.483.700,00
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	7.000.000,00
		Perluasan Kesempatan Kerja	7.159.800,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	6.890.000,00
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	7.159.800,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Kegiatan :	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	13.009.400,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.379.600,00
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.328.300,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	41.273.800,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.270.800,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.160.700,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.450.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	8.127.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	KELUARGA Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	107.688.400,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	83.755.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	94.304.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	191.822.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	146.385.000,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7.410.500,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	54.054.400,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.675.700,00
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.613.900,00
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7.501.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.019.576.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.004.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10.708.000,00
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.251.300,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.145.555.800,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.100.000,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Kegiatan : Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	124.288.000,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.414.200,00
		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.067.000,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11.131.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	23.835.000,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	3.645.300,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Kegiatan : Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	21.901.300,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.148.708.972,00
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	154.983.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	600.000.000,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	187.792.600,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	102.559.800,00
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3.884.483.196,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Kegiatan : Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	33.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	44.756.200,00
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	718.000.000,00
		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	24.836.490,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	56.879.900,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	53.602.200,00
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	27.679.300,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	92.321.700,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	(RPPLH) Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	41.935.450,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	39.750.000,00
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	10.523.700,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1.600.000,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.398.730.000,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	151.080.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	11.967.000,00
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.952.700,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	320.372.110,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Kegiatan :	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2.120.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Penyusunan Profil Kependudukan		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13.419.000,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.434.025.200,00
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.290.200,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	60.528.100,00
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	51.670.900,00
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	26.576.200,00
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4.891.400,00
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	8.323.600,00
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	23.062.000,00
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	151.074.700,00
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.457.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	44.860.300,00
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6.444.100,00
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	44.244.500,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.969.889.800,00
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	303.965.900,00
	PROGRAM PENATAAN DESA Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	94.986.200,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	20.387.700,00
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	39.317.500,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10.477.600,00
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.590.000,00
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	5.176.000,00
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	286.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18.861.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.779.000.000,00
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.134.800.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	18.304.000,00
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	908.320.000,00
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	361.120.000,00
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.008.000,00
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	46.479.100,00
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	112.377.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.952.000.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	338.800,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.265.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.278.562.800,00
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.217.341.000,00
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39.015.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	244.142.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	4.804.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	80.000.000,00
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.650.000,00
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	362.400.000,00
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	192.000.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan :	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.258.003.900,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6.780.532.717,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	151.340.720,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	260.271.300,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.632.937.600,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68.967.519,00
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	53.700.800,00
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.000.000,00
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57.820.700,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.646.200,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	734.271.826,00
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	26.005.700,00
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	26.238.700,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	4.535.300,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	56.683.700,00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.711.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4.591.000,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	92.138.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	22.898.300,00
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8.350.600,00
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	103.633.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	22.979.300,00
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.292.387.480,00
		Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	8.153.600,00
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	87.620.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	408.389.200,00
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	25.274.000,00
		Pelayanan Informasi Publik	132.285.000,00
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	137.355.200,00
		Diseminasi Informasi	150.000.000,00
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	358.259.000,00
		Penyusunan Konten	300.946.600,00
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	8.147.400,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.044.000,00
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.331.850,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	227.439.200,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	17.571.300,00
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	23.220.500,00
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	630.606.700,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	31.578.400,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	255.424.300,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	111.564.900,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	12.250.500,00
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	5.649.850,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kegiatan :	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	675.946.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33.870.900,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	122.789.000,00
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	1.374.800,00
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	50.840.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32.004.100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	188.654.080,00
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10.511.080,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kegiatan :	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	178.375.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengawasan Penanaman Modal	86.734.000,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	329.994.900,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	3.522.888.300,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.685.749.400,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	318.105.800,00
		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	93.914.200,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2.000.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan :	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	139.089.100,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	67.378.400,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	28.852.800,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	22.372.200,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	27.615.600,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	346.091.800,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	9.803.100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	368.133.800,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Kegiatan :	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	10.446.400,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	65.876.500,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	121.262.800,00
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.031.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.346.700,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	57.282.300,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	126.398.200,00
		Pemanfaatan Cagar Budaya	39.485.460,00
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	700.709.088,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	26.236.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	986.221.400,00
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	192.173.300,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	274.311.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.157.357.425,00
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	20.018.730,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	80.007.500,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Kegiatan : Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	22.365.000,00
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2.200.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.026.000,00
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.312.000,00
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	340.162.800,00
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.770.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.363.000,00
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	13.903.400,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	177.000.000,00
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	292.485.000,00
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.930.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000,00
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	10.726.000,00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.855.000,00
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	223.178.200,00
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	394.785.400,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	61.628.600,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	50.754.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	116.652.900,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Kegiatan : Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	11.819.800,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	31.368.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	7.250.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.260.000,00
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.758.000,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	781.878.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	13.504.800,00
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	20.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	22.193.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	5.331.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	4.743.000,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	7.364.000,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.510.300,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	36.096.100,00
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	550.000.300,00
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	232.514.800,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Pengembangan Sistem Pemasaran	21.216.100,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	KEKAYAAN INTELEKTUAL Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	132.302.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	17.460.200,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14.208.009.067,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.874.875.900,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	36.960.000,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	154.209.400,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	93.383.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	66.649.000,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.349.097.700,00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	66.515.000,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.435.840.400,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	24.350.400,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.525.923.800,00
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	325.880.000,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.888.843.575,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	418.147.500,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.813.659.925,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.357.814.000,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	904.104.220,00
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	58.390.000,00
		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	12.270.000,00
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	10.680.000,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	155.292.950,00
		Pameran Dagang Lokal	565.443.300,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	19.693.820,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Penggunaan Produk Dalam Negeri		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.034.723.020,00
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.327.654.200,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	36.523.100,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	43.996.200,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.986.600,00
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	17.017.400,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	56.392.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	84.803.550,00
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	31.716.200,00
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	19.717.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	9.580.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	146.264.100,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	412.375.500,00
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.324.800,00
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.608.400,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	270.411.100,00
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	17.831.800,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	121.868.600,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.080.121.100,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	21.652.000,00
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	59.448.800,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	138.110.900,00
		Fasilitasi Bantuan Hukum	597.751.500,00
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	35.883.500,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18.465.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	188.382.533,00
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	199.717.800,00
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34.800.000,00
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	789.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	746.776.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	576.776.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40.401.200,00
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.611.900,00
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	101.574.900,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	39.070.000,00
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	77.150.000,00
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	87.896.100,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	18.758.200,00
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2.603.800,00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	21.378.600,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	62.324.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	12.149.200,00
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	41.044.900,00
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	31.072.800,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	26.670.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	19.345.000,00
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	21.000.900,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	170.783.400,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.781.200,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	11.130.000,00
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.189.472.000,00
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	333.670.000,00
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	397.415.500,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	458.376.000,00
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.566.000,00
		Pembahasan APBD	423.253.000,00
		Pembahasan APBD Perubahan	14.897.000,00
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13.600.000,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.125.000,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5.625.000,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5.625.000,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.625.000,00
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.450.000,00
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.590.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	75.494.000,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	1.487.700.000,00
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	276.373.800,00
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	269.143.200,00
		Penyusunan Program Kerja DPRD	2.385.000,00
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	773.255.209,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.350.000,00
		Pelaksanaan Reses	7.296.263.000,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.933.628.800,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18.020.000,00
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.772.693.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.441.366.942,00
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	619.305.000,00
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	68.580.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	176.729.300,00
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.142.720.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN		

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.848.500,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.740.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	19.128.400,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.634.500,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.740.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.920.500,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.712.600,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.300.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	24.149.700,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.982.200,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.650.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	8.827.900,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	212.219.200,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.157.300,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	19.675.600,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.492.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11.853.800,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	21.568.600,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	9.037.000,00
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	170.974.200,00
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	32.272.800,00
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	65.075.000,00
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	41.358.900,00
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	6.931.000,00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	235.483.500,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21.417.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	44.166.700,00
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.321.200,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	19.210.000,00
		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1.260.000,00
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	97.954.600,00
5.02	KEUANGAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	68.034.900,00
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.101.500,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.138.800,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	71.480.800,00
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	116.752.900,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah	514.374.000,00
		Penilaian Barang Milik Daerah	56.338.600,00
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.353.300,00
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4.335.400,00
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2.750.000,00
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3.916.000,00
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.644.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	55.759.400,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	51.556.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	164.175.200,00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	162.674.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	23.943.500,00
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	58.718.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	25.247.000,00
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3.906.000,00
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.051.400,00
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24.213.400,00
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.290.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.913.200,00
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	26.885.000,00
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57.078.500,00
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	35.910.200,00
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	21.090.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	7.579.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.300.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	106.205.000,00
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.590.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1.590.000,00
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.060.000,00
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	12.236.400,00
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	38.650.000,00
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	15.870.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.075.277.906,00
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	15.541.776.737,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	11.586.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.300.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	80.005.550,00
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	606.552.700,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	445.022.700,00
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	329.995.600,00
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	42.402.500,00
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	158.400.000,00
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	151.440.100,00
		Penagihan Pajak Daerah	2.228.241.002,00
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	16.766.700,00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.880.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	97.967.800,00
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	8.639.000,00
5.03	KEPEGAWAIAN		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	231.328.400,00
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	21.594.200,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.421.000,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	217.591.900,00
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.005.300,00
		Pengelolaan Promosi ASN	1.696.800,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	449.962.170,00
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20.150.900,00
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	18.940.500,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.677.600,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	47.136.100,00
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	20.145.600,00
		Pembinaan Disiplin ASN	36.112.600,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	789.788.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	263.966.280,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	88.443.100,00
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.826.900,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	88.443.100,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	88.443.100,00
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	88.443.100,00
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	88.443.100,00
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	88.443.100,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	106.099.500,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	37.541.800,00
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	74.559.000,00
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	18.498.900,00
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	20.872.900,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.704.800,00
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	72.792.700,00
		Reviu Laporan Kinerja	5.335.000,00
		Reviu Laporan Keuangan	32.944.400,00
		Pengawasan Desa	79.044.200,00
		Kerja Sama Pengawasan Internal	23.962.900,00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	251.812.600,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	31.912.900,00
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	242.205.800,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.512.800,00
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.160.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.319.800,00
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	116.351.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	272.084.900,00
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47.512.400,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	154.463.700,00
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	105.466.500,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.870.400,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	244.904.900,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.080.286.400,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72.459.800,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.252.005.200,00
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.015.177.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30.847.000,00
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	82.218.200,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	182.725.500,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	386.786.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	36.582.900,00
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	36.571.000,00
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.200.000,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6.350.000,00
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	44.837.600,00
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.486.800,00
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.194.500,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.294.000,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	204.042.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	24.220.900,00
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.552.200,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	17.964.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	405.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	72.909.200,00
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43.890.200,00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	273.112.900,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.545.459.692,00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	119.259.600,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	124.037.300,00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65.557.300,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	467.189.000,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	KARAKTER KEBANGSAAN Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	76.233.300,00
		Pembentukan Paskibraka	995.482.200,00
		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	20.435.200,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	981.042.400,00
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	652.438.400,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.611.690.700,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
	serta Pemantauan Situasi Politik		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	217.296.300,00
X	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
X.X X	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.026.372.500,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	523.752.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	354.092.700,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	725.228.500,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	405.304.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.032.948.400,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.253.161.000,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.236.523.614.250,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	369.632.000,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	109.256.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.296.905.958,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	59.479.600,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	388.985.000,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	310.681.600,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	992.400,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.178.400,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.127.873.420,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.431.603.250,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.235.491.900,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.327.719.900,00
		Penyediaan Bahan/Material	17.164.764.300,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.784.757.200,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.506.030.000,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.513.032.000,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.997.572.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.575.374.900,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.580.567.500,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.496.536.600,00
		Pemeliharaan Mebel	137.310.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.383.016.700,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.083.704.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	606.033.600,00
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.698.400,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	950.000,00
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.024.000,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	110.987.200,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	175.506.600,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	261.954.375,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.779.038.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.006.848.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	329.803.800,00
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.515.000,00
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	89.876.400,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.901.814.000,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	892.407.600,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	168.223.200,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.978.400,00
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	140.767.677,00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.868.000,00
		Pengadaan Mebel	1.606.958.000,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	322.966.744,00

No	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2025
1	2	3	4
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.578.095.632,00
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	46.470.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.460.301.800,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.343.977.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	851.982.900,00
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.470.000,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.811.200,00
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	529.200,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.475.300,00

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan SPM di Kabupaten Purworejo mendasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” serta dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial”

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM sebagai berikut :

- a. kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan kabupaten menurut pembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar;
- b. ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
- c. keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia;
- d. kesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus-menerus;
- e. keterukuran, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan
- f. ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga Negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait.

Dasar hukum penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Purworejo;
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/44/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai peraturan perundang-undangan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan daerah selama 1

tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal juga harus tertuangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (RKPD dan APBD). Berkaitan dengan masih awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dimana indikator capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum tercantum di dalamnya. Maka komitmen daerah dalam upaya penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.13
Target penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
A.	SPM PENDIDIKAN		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
B.	SPM KESEHATAN		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Prosentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Prosentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di fasilitas Kesehatan	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Prosentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
		sesuai standar di fasilitas Kesehatan	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Prosentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Prosentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lansia	Prosentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Prosentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Prosentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Presentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%
11	Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberculosis	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya	Prosentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS,	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
	Tahan Tubuh Manusia (HIV)	waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standard	
C.	SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air MINUM Sehari- Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
D.	SPM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	100%
E.	SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	100%
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
4	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
F.	SPM SOSIAL		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Presentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten Purworejo	Cakupan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Purworejo	100%

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan %
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,16	75,93	1,02
2	Angka Kemiskinan	10,87	10,06	-7,45
3	Angka Pengangguran	3,89	3,72	-4,37
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,79	5,27	10,02
5	Pendapatan Perkapita	31.194.843,48	33.035.488,41	5,90
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,354	0,298	-15,82

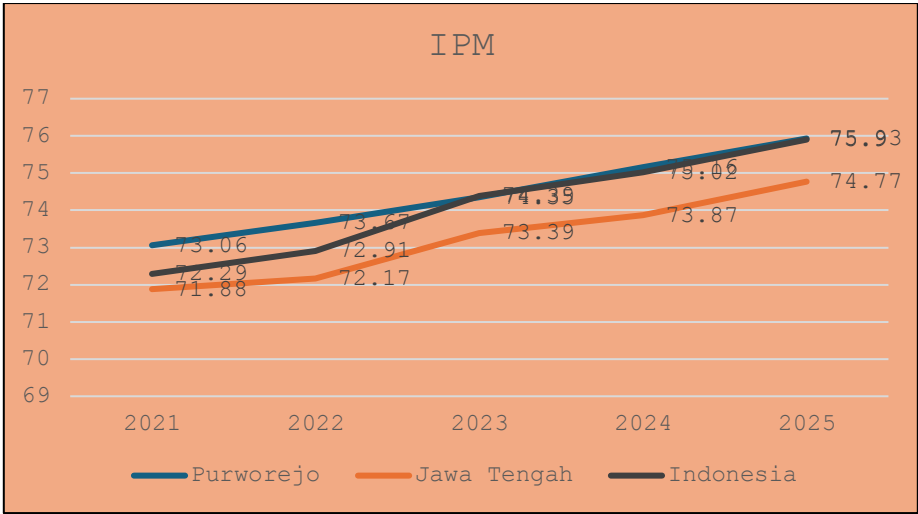
Sumber : BPS Kab. Purworejo, 2026

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. IPM mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, tingkat pengetahuan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita. IPM Kabupaten Purworejo sejak tahun 2021 hingga 2025 terus meningkat dan telah masuk kategori tinggi sejak tahun 2014. IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun, serta selalu berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Capaian IPM Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebesar 75,93 atau naik 1,02%

dari tahun 2024 yang sebesar 75,16. IPM Kabupaten Purworejo tahun 2025 merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Magelang di wilayah Eks Karesidenan Kedu dan menduduki peringkat 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sebagaimana dijabarkan dalam grafik berikut.

Gambar 2.1
Capaian IPM Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2025



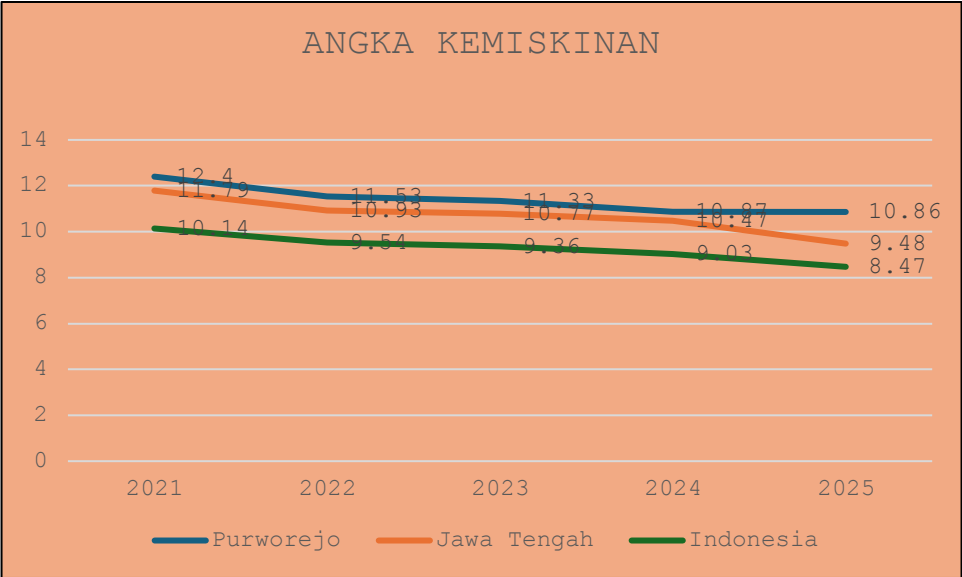
Sumber : BPS Kab. Purworejo, 2026

2.1.2 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo sebesar 10,06 persen, atau menurun 0,81 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,87 persen. Ditinjau dari jumlahnya, penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada 2025 sebanyak 72,18 ribu orang, menurun 5,84 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 78,02 ribu orang. Garis Kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 496.812,00 per kapita/bulan, meningkat sebesar Rp. 37.559,00 per kapita/bulan dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai Rp. 459.253,00 per kapita/bulan. Berbeda dengan Persentase Penduduk Miskin (P0) yang mengalami penurunan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2025 sebesar 1,54, naik 0,46 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya pada yang bernilai sebesar 1,08. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada 2025 sebesar 0,34 naik 0,16 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai sebesar 0,18. Peningkatan harga gabah di level petani tentunya memberikan dampak positif terhadap pendapatan penduduk Kabupaten Purworejo yang mayoritas bergerak di sektor pertanian. Angka

kemiskinan di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2021 – 2025 ditunjukkan grafik berikut ini.

Gambar 2.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kab. Purworejo 2026

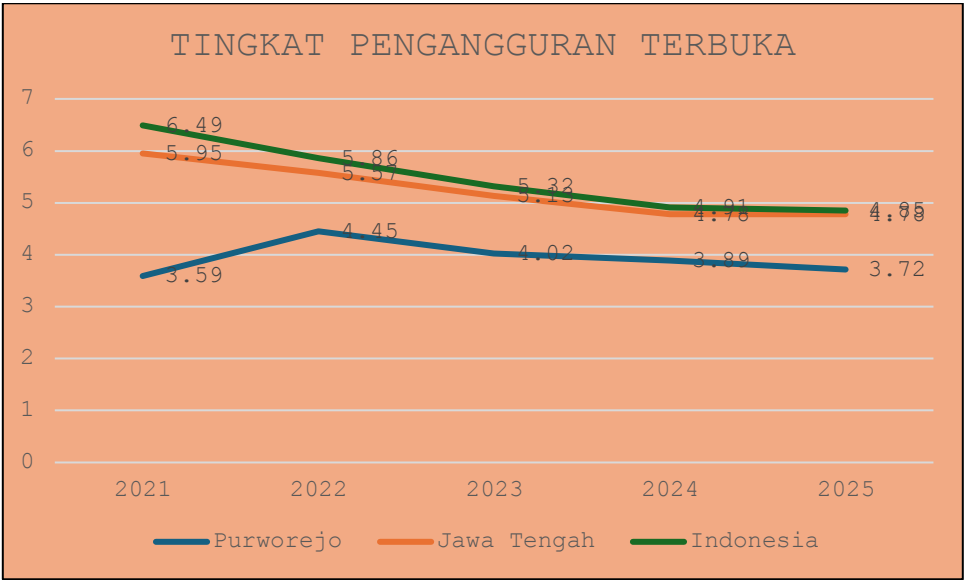
Berbagai macam kegiatan untuk menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian serta pengentasan kemiskinan juga terus digalakkan melalui program pemerintah Kabupaten Purworejo. Disamping itu program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta juga turut memberikan andil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo. Program bantuan sosial, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta sangat berpengaruh, terutama bagi penduduk lapisan bawah, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo menurun sebesar 0,81 persen poin, dari 10,87 persen pada tahun 2024 menjadi 10,06 persen pada tahun 2025.

2.1.3 Angka Pengangguran

Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Angka Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebesar 3,72 persen, turun 017 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Dilihat dari prosentase tersebut dapat disimpulkan bahwa angka

pengangguran di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024.

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2024 sebesar 3,89 persen turun menjadi 3,72 persen pada Agustus 2025. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang pengangguran.

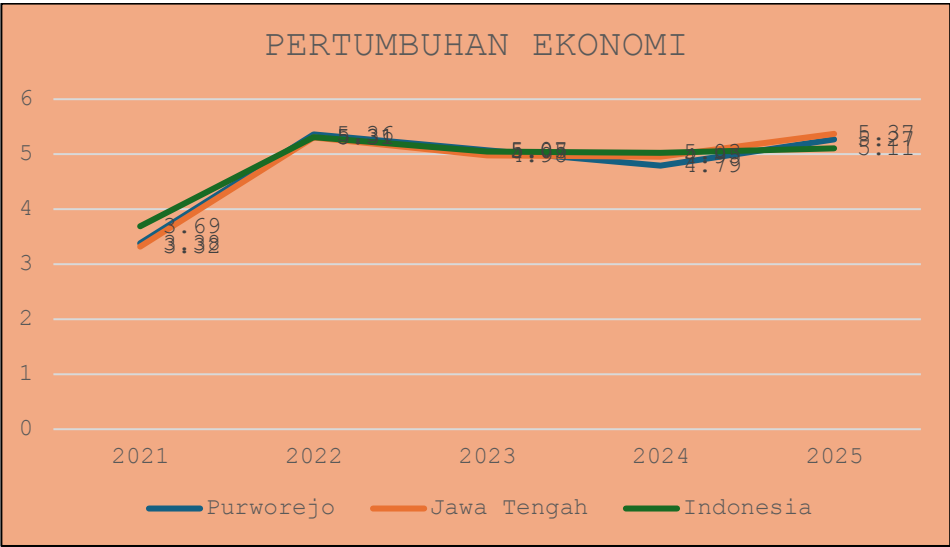
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu tiga tahun sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun di tahun 2024, Kabupaten Purworejo mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan Indonesia (5,03%). Perkembangan positif terjadi pada tahun 2025, yang mana berdasarkan rilis terbaru dari BPS, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo sebesar 5,27%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2024 dengan selisih sebesar 0,48%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan. PDRB atas dasar harga konstan

Kabupaten Purworejo pada tahun 2020–2024 level tertinggi terdapat di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Akan tetapi pada tahun 2025, posisi tersebut diambil alih oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, sebesar 2.978,76 miliar rupiah. Baru kemudian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.927,08 miliar rupiah. Sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2025 terdapat pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 10,88 miliar rupiah. Lebih lanjut, kondisi pertumbuhan ekonomi ini dapat diamati pada Gambar 2.4 berikut ini :

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2026

Perkembangan perekonomian Kabupaten Purworejo terus mengalami perubahan seiring perkembangan aktifitas perekonomian wilayah dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2021- 2025. Perkembangan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADH Berlaku) dan atas dasar harga konstan (ADH Konstan), serta tingkat pertumbuhan pada total PDRB. Sejak 2021 agregasi ekonomi Purworejo telah menembus level di atas 15 triliun rupiah. Pada tahun 2025, nilai ekonomi Purworejo mencapai 26,48 triliun rupiah yang sebagian besar digerakkan oleh Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

2.1.5 Pendapatan Perkapita

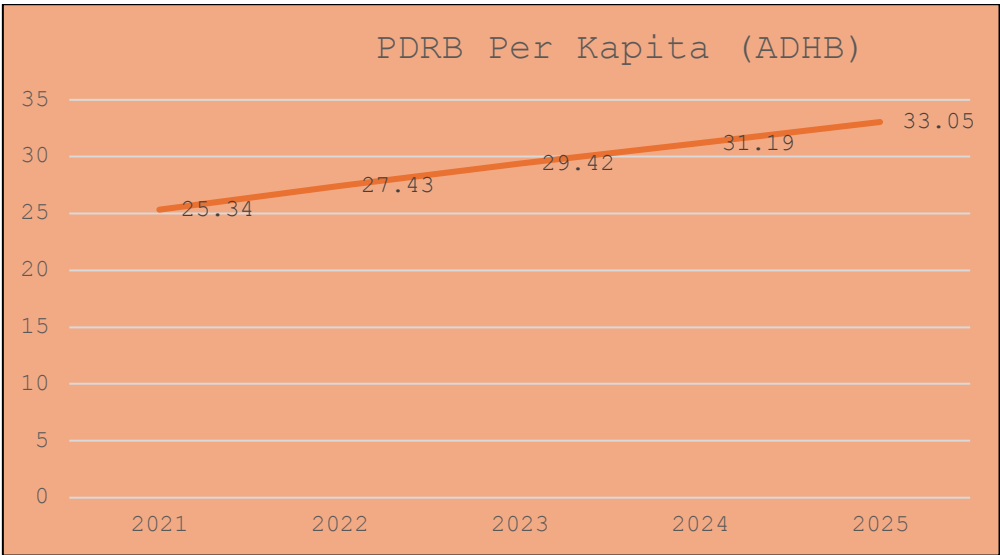
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terjadi pada semua komponen pengeluaran. Ekonomi Kabupaten Purworejo tumbuh sebesar 3,33 persen berdasarkan data triwulan III tahun 2025, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB. Tingkat kemiskinan turun

menjadi 10,06 persen, pengangguran terbuka 3,72 persen, dan IPM mencapai 75,93. UMK Purworejo 2025 ditetapkan Rp2.265.938, naik 6,5% dari tahun 2024, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat namun menjadi tantangan bagi sektor padat karya.

Sektor penting yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi di daerah melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2025-2045 untuk mendukung transformasi ekonomi dan Pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan target pendapatan daerah.

PDRB per kapita Kabupaten Purworejo tersaji pada grafik berikut ini.

Gambar 2.5
PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2025 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

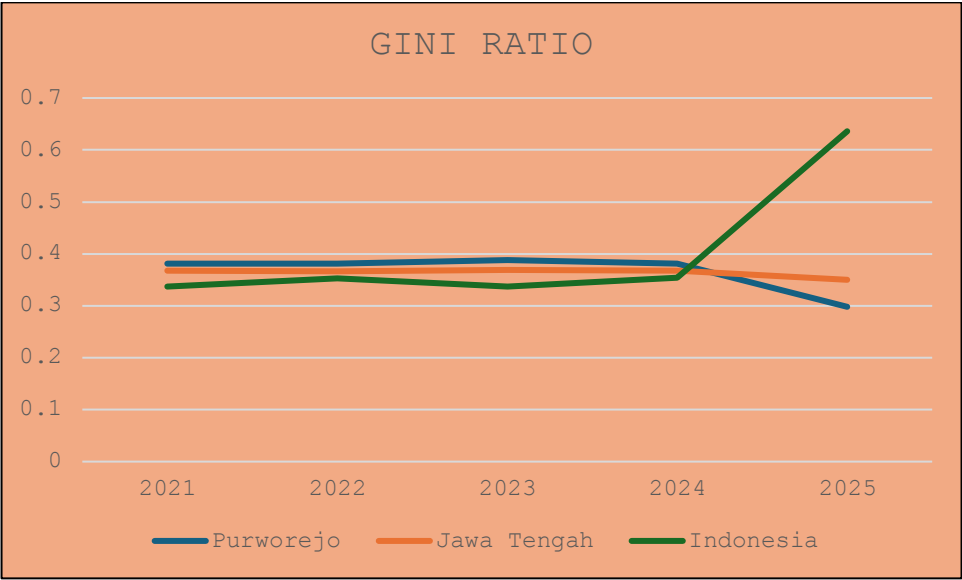
Nilai PDRB Purworejo tahun 2025 mengalami peningkatan sejumlah 1.840.644,93 dari tahun 2024 yang sejumlah 31.194.843,48 menjadi 33.035.488,41 pada tahun 2025. Melambatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten purworejo terjadi pada tahun 2024, dari sisi pengeluaran tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di sektor pertanian (sektor yang memiliki distribusi terbesar), yang mengalami kontraksi sebesar 0,08 persen. Hal ini turut memicu perlambatan pertumbuhan komponen pengeluaran rumah tangga yang terjadi pada tahun 2024.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan

tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. BPS mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4). Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional terlihat pada grafik sebagai berikut.

Gambar 2.6
Indeks Gini Ratio Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025



Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2026

Dari gambar tersebut dilihat bahwa Indeks Gini Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebesar 0,298, atau mengalami penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Purworejo rendah. Nilai indeks gini ratio Kabupaten Purworejo setiap tahunnya bergantian mengalami kenaikan dan penurunan. Secara keseluruhan nilai indeks gini Kabupaten Purworejo terus berada pada kategori sedang. Selain itu, selama 5 tahun indeks gini Kabupaten Purworejo selalu berada di bawah indeks gini Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Kabupaten Purworejo lebih merata dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun tetap memerlukan perhatian dari pemerintah.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
1	PENDIDIKAN	1.a.1	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini	81.73%	DINDIKBUD	
		1.a.2	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	89.08%	DINDIKBUD	
		1.a.3	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	DINDIKBUD	
		1.a.4	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	45.75%	DINDIKBUD	
		1.a.5	Persentase Ruang Kelas SD, SMP dalam Kondisi Baik	43.63%	DINDIKBUD	
2	KESEHATAN	1.b.1	Persentase Kematian Ibu	0.17%	DINKESDA	
		1.b.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	16.25%	DINKESDA	
		1.b.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%	DINKESDA	
		1.b.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100%	DINKESDA	
		1.b.5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%	DINKESDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.b.6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	DINKESDA	
		1.b.7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	54.74%	DINKESDA	
		1.b.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	100%	DINKESDA	
		1.b.9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	DINKESDA	
		1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	DINKESDA	
		1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	DINKESDA	
		1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	DINKESDA	
		1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang. terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	DINKESDA	
		1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	DINKESDA	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.c.1	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67,73%	DPUPR	
		1.c.2	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	63,41%	DPUPR	
		1.c.3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air	98,94%	DPUPR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota			
		1.c.4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	95,94%	DPUPR	
		1.c.5	Persentase Luas Kawasan Organisasi Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	-	DPUPR	Surat Pernyataan nomor 100.1.7/1781/2026, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
		1.c.6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DPUPR	Surat Pernyataan nomor 100.1.7/1781/2026, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
		1.c.7	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100%	DPUPR	
		1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100%	DPUPR	
		1.c.9	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100%	DPUPR	
		1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan kesesuaian pemanfaatan	0%	DPUPR	

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota			
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.d.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	DINPERKIMTAN	
		1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100%	DINPERKIMTAN	
		1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	3,23%	DINPERKIMTAN	
		1.d.4	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100%	DINPERKIMTAN	
5	TRANTIBUMLINMAS	1.e.1	Persentase Dokumen Kebencanaan Yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	100%	BPBD	
		1.e.2	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	SATPOL PP DAMKAR	
		1.e.3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP DAMKAR	
		1.e.4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	BPBD	
		1.e.5	Persentase jumlah Warga Negara Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	BPBD	
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP DAMKAR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
6	SOSIAL	1.f.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	DINSOSDALDUKKB	
		1.f.2	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	DINSOSDALDUKKB	
		1.f.3	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	DINSOSDALDUKKB	
		1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	DINSOSDALDUKKB	
		1.f.5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100%	DINSOSDALDUKKB	
		1.f.6	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	86,40%	DINSOSDALDUKKB	
7	TENAGA KERJA	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DINPERINTRANSNAKER	
		2.a.2	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	1,88%	DINPERINTRANSNAKER	
		2.a.3	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100%	DINPERINTRANSNAKER	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	DPPPAPMD	
		2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	DPPPAPMD	
9	PANGAN	2.c.1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74,78%	DKPP	
10	PERTANAHAN	2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	67.38	DINPERKIMTAN	
		2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	89,35%	DINPERKIMTAN	
		2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	25,00%	DINPERKIMTAN	
11	LINGKUNGAN HIDUP	2.e.1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	75%	DLHP	
		2.e.2	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	22,50%	DLHP	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.f.1	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	100%	DISDUKCAPIL	
		2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	99,54%	DISDUKCAPIL	

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.f.3	Jumlah Data Profil Kependudukan Yang Disusun dan Dipublikasikan	100%	DISDUKCAPIL	
		2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99,44%	DISDUKCAPIL	
		2.f.5	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	DISDUKCAPIL	
		2.f.6	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	DISDUKCAPIL	
		2.f.7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	DISDUKCAPIL	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0%	DPPPAPMD	
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0%	DPPPAPMD	
		2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	0%	DPPPAPMD	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.h.1	Angka kelahiran total (total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur usia 15-49 tahun	99,95%	DINSOSDALDUKKB	
		2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	57,77%	DINSOSDALDUKKB	
		2.h.3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	40,13%	DINSOSDALDUKKB	
15	PERHUBUNGAN	2.i.1	Rasio konektivitas Kabupaten	93,93	DINHUB	
		2.i.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,38	DINHUB	
		2.i.3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	100%	DINHUB	

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DINKOMINFOSTASANDI	
		2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DINKOMINFOSTASANDI	
		2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	62.88%	DINKOMINFOSTASANDI	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	33.89%	DKUKMP	
		2.k.2	Persentase Usaha mikro Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	18,95%	DKUKMP	
18	PENANAMAN MODAL	2.l.1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	72.34%	DPMPTSP	
		2.l.2	Realisasi total Terhadap Target Investasi	144,69%	DPMPTSP	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.m.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1371,74%	DINPORAPAR	
		2.m.2	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,40%	DINPORAPAR	
		2.m.3	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0,24%	DINPORAPAR	
		2.m.4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	24.04%	DINPORAPAR	
20	STATISTIK	2.n	Persentase Kepatuhan Daftar Data Yang Dilaporkan Kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	100%	DINKOMINFOSTASANDI	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
21	PERSANDIAN	2.o	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	87.47%	DINKOMINFOSTASANDI	
22	KEBUDAYAAN	2.p.1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100%	DINDIKBUD	
		2.p.2	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	175,91%	DINDIKBUD	
23	PERPUSTAKAAN	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca (TKM) masyarakat	56,83	DINPUSIP	
		2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	9,36	DINPUSIP	
24	KEARSIPAN	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	83,94%	DINPUSIP	
	URUSAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a.1	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	14,70%	DLHP	
		3.a.2	Produksi penangkapan ikan dan budidaya	101.73%	DLHP	
2	PARIWISATA	3.b.1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	50,82%	DINPORAPAR	
		3.b.2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	1,35%	DINPORAPAR	
		3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	43,57%	DINPORAPAR	
3	PERTANIAN	3.c.1	Presentase Peningkatan produksi tanaman pangan	-0,77%	DKPP	
		3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	-19,76%	DKPP	

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	3,35%	DKPP	
		3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	DKPP	
4	KEHUTANAN		-	-	-	Bukan wewenang Kabupaten/Kota
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					Tidak Dipilih
6	PERDAGANGAN	3.d	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	100	DKUKMP	
7	PERINDUSTRIAN	3.e.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	45,47%	DINPERINTRANSNAKER	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3.e.2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	41,47%	DINPERINTRANSAKER	
		3.e.3	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	48,33%	DINPERINTRANSAKER	
		3.e.4	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	34,05%	DINPERINTRANSAKER	

Sumber : Diolah Bagian Pemerintahan dari perangkat Daerah, Maret 2026

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PERENCANAAN	4.a	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100%	BAPPERIDA	
2	KEUANGAN	4.b.1	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	29,44%	BPKPAD	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	23,04%	BPKPAD	
		4.b.3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	61,87%	BPKPAD	
		4.b.4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	7,60%	BPKPAD	
3	KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.c	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	62,33%	BKPSDM	
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100%	BAPPERIDA	
5	FUNGSI PENGAWASAN	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5 (3.32)	ITDA	
		4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5 (3.11)	ITDA	
		4.e.3	Manajemen risiko Indeks	5 (3.10)	ITDA	
		4.e.4	Persentase Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	100%	ITDA	
6	PENGADAAN	4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35,56	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4.f.2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	21,86	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4.f.3	Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	14,40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
7	HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	SETWAN	
		4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	53,33%	SETWAN	
8	PELAYANAN PUBLIK	4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	1 (Nilai)	DINKOMINFOSTASANDI	

Sumber: Diolah Bagian Pemerintahan, Maret 2026

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan pertanggungjelasn dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengemban amanah dari semua stakeholder melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo, hal ini merupakan bentuk aspek pelaporan agen ke principal untuk memberitahukan atas kinerja keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Melalui pelaporan kinerja diharapkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat monitoring, evaluasi dan pengendalian untuk perbaikan kinerja baik indikator kinerja tujuan, sasaran dan program di tahun-tahun selanjutnya.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh kepala perangkat daerah untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu berdasarkan ekspektasi yang dilakukan dari dialog kinerja, tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi

termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100$$

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025, berisi muatan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/552/2023 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
	Misi I: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,62
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,02
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	75,89
3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	90,73
4.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,26
5.	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,75
6.	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	100
7.	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	28,17
8.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	79,02
	Misi ke II: Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.			
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	Juta Rupiah	3.086.885,13
	Misi ke III: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya			
1.	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	31,56
2.	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7534
	Misi ke IV: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)			
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Skor	3,325
		Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai SAKIP	Nilai	68,00
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,12
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,34
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	70
	Misi ke V: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi			
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	92,97

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
2.	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	76,04
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,841

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2025

Anggaran belanja program dalam rangka mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tersebut tercantum dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, dirinci sebagai berikut ini:

Tabel 2.5
Program dan Anggaran APBD Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.373.375.631.611,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	144.482.039.889,00
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	20.944.500,00
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	662.000,00
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	7.147.300,00
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	28.297.400,00
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.451.687.155,00
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	80.007.500,00
9.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	700.709.088,00
10.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	223.165.960,00
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.204.630.700,00
12.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	134.180.574.788,00
13.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	961.915.160,00
14.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	239.097.865,00
15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	712.007.800,00
16.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.706.152.398,00
17.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	308.583.000,00
18.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-
19.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.106.284.425,00
20.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	993.001.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
21.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.604.579.800,00
22.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	80.843.271.800,00
23.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	152.598.000,00
24.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	664.870.400,00
25.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	238.933.100,00
26.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.239.345.300,00
27.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.571.012.600,00
28.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.213.230.500,00
29.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	65.481.200,00
30.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	124.288.000,00
31.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.822.647.597,00
32.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.002.276.960,00
33.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.175.344.676,00
34.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	16.024.800,00
35.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	990.000,00
36.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	268.640.000,00
37.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.376.924.700,00
38.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	150.088.500,00
39.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	80.270.100,00
40.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	644.854.000,00
41.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.353.272.700,00
42.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.243.904.600,00
43.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	181.705.300,00
44.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	432.511.000,00
45.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	8.127.600,00
46.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	13.450.000,00
47.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	124.707.900,00
48.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191.443.400,00
49.	PROGRAM PENATAAN DESA	94.986.200,00
50.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	59.705.200,00
51.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.875.318.300,00
52.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.369.404.600,00
53.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.019.576.000,00
54.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.231.619.700,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
55.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	61.464.900,00
56.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	24.791.500,00
57.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.972.454.800,00
58.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.875.803.500,00
59.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160.032.600,00
60.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154.209.400,00
61.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	10.680.000,00
62.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.332.578.220,00
63.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	134.257.150,00
64.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	787.592.690,00
65.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.303.692.372,00
66.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	33.000.000,00
67.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	34.966.000,00
68.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	21.901.300,00
69.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81.281.500,00
70.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	56.879.900,00
71.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	3.645.300,00
72.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.774.835.596,00
73.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	65.771.800,00
74.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.007.146.400,00
75.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.368.500,00
76.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	51.874.300,00
77.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.549.810.000,00
78.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	51.873.700,00
79.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	338.291.810,00
80.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.120.000,00
81.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.224.258.682,00
82.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.520.656.400,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
83.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.638.161.680,00
84.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76.322.900,00
85.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	148.640.500,00
86.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	4.375.850,00
87.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	17.900.350,00
88.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.870.900,00
89.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	111.564.900,00
90.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	227.439.200,00
91.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	958.401.200,00
92.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	675.946.600,00
93.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.398.900.320,00
94.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	158.392.200,00
95.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	720.736.250,00
96.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	116.519.750,00
97.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	19.693.820,00
98.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	199.165.160,00
99.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	329.994.900,00
100.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	175.004.200,00
101.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	265.109.000,00
102.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.004.100,00
103.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	502.113.900,00
104.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAN	7.759.746.800,00
105.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	368.133.800,00
106.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	16.137.305.167,00
107.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	818.611.200,00
108.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	21.216.100,00
109.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	132.302.500,00
110.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.541.746.800,00
111.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	24.565.000,00
112.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	229.035.500,00
113.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	11.819.800,00
114.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	13.009.400,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
115.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.887.270.902,00
116.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	71.693.300,00
117.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	262.007.000,00
118.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	558.639.600,00
119.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	9.580.000,00
120.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	19.717.000,00
121.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	44.933.200,00
122.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.361.544.300,00
123.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	428.912.600,00
124.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.803.725.509,00
125.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	747.462.500,00
126.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	624.600.800,00
127.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	870.057.600,00
128.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	574.130.206.627,00
129.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	854.220.200,00
130.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.226.613.652,00
131.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.195.763.070,00
132.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.053.754.780,00
133.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	810.715.300,00
134.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	454.940.900,00
135.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	336.479.000,00
136.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.664.833.300,00
137.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	264.800.600,00
138.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	400.486.300,00
139.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	835.056.300,00
140.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.559.339.700,00
141.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.828.987.000,00
142.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.664.719.292,00
143.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	189.594.600,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
144.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.633.480.800,00
	TOTAL	2.558.067.871,00

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2025

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah digunakan kriteria penilaian berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤100%	Sangat Tinggi
2	76 %≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Data realisasi dan capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Realisasi dan Capaian Kinerja Kepala Daerah

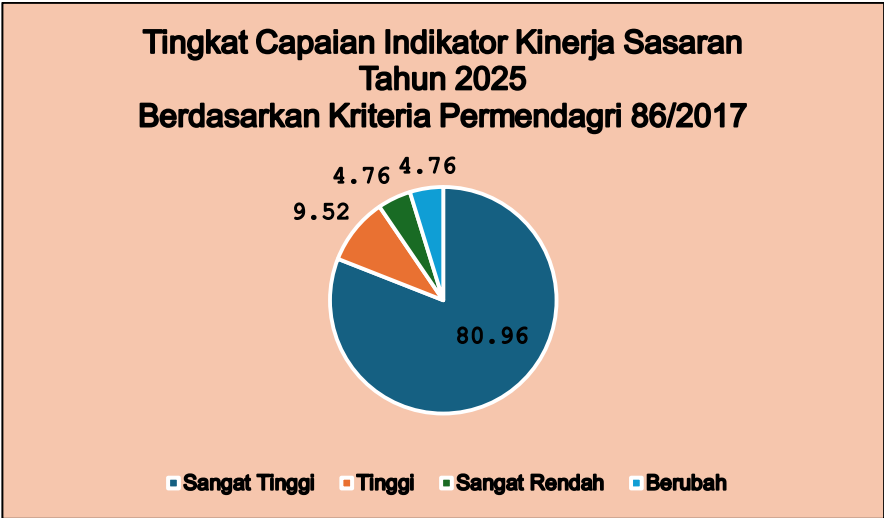
No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Keterangan	Sumber Data
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,62	8,74	90,85	Tinggi	BPS
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,02	13,58	96,86	Sangat Tinggi	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Keterangan	Sumber Data
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	75,89	76,06	100,22	Sangat Tinggi	BPS
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	90,73	90,9	100,19	Sangat Tinggi	DKPP
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,26	0,81	32,10	Sangat Rendah	BPS
5	Terwujudnya Kesenjangan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	95,75	95,24	99,47	Sangat Tinggi	BPS
6	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	100	100	100	Sangat Tinggi	DINPORA PAR
7	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	28,17	20,72	135,96	Sangat Tinggi	DINSOS DALDUKKB
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	79,02	74,98	94,89	Sangat Tinggi	BPS
9	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	juta rupiah	3.086.885,13	5.357.400.000	173,55	Sangat Tinggi	BPS
10	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	31,56	32,96	104,44	Sangat Tinggi	BPS
11	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,7534	N/A	N/A	N/A	KEMEN DESA PDTT
12	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3,325	3,320	99,85	Sangat Tinggi	BPKP
		Opini BPK	opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	BPK
		Nilai SAKIP	nilai	68,00	67,60	99,41	Sangat Tinggi	KEMEN PAN RB
13	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	84,12	83,20	98,91	Sangat Tinggi	BKN
14	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,34	4,41	101,61	Sangat Tinggi	KEMEN PAN RB
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	70	75,45	107,79	Sangat Tinggi	KEMEN DAGRI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Keterangan	Sumber Data
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	92,97	83,22	89,51	Tinggi	BAPPE RIDA
16	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	76,04	76,12	100,11	Sangat Tinggi	DLHP
17	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,841	0,85	101,07	Sangat Tinggi	BPBD

Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan data sebagaimana tersaji pada tabel tersebut di atas, dari 17 Sasaran Strategis dan 21 Indikator Kinerja Sasaran yang diukur pada Tahun 2025, diperoleh hasil sebagai berikut:

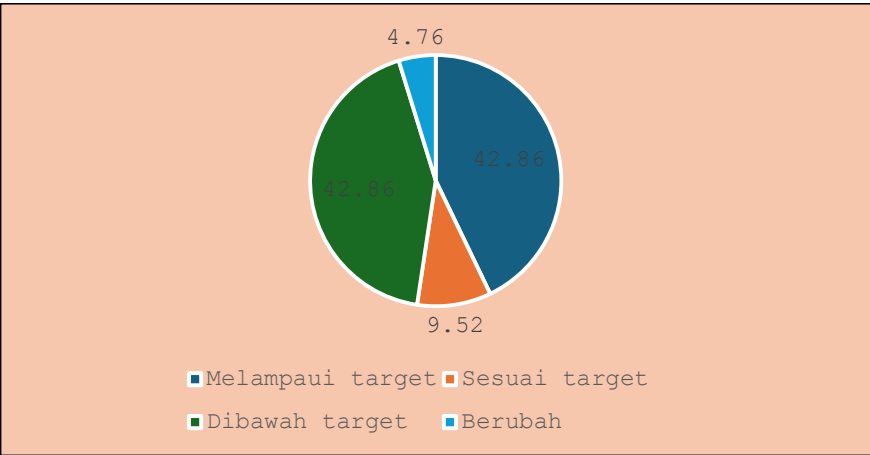
Gambar 2.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran



- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **sangat tinggi** sejumlah 17 indikator atau 80,96%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **tinggi** sejumlah 2 indikator atau 9,52%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **sangat rendah** sejumlah 1 indikator atau 4,76%.
- Terdapat 1 indikator atau 4,76% yang tidak dapat disajikan datanya dikarenakan perubahan penilaian yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang disempurnakan menjadi Indeks Desa (ID) berdasarkan PermendesPDT No. 9 Tahun 2024. IDM fokus pada 3 dimensi (Sosial, Ekonomi, Lingkungan), sedangkan ID mencakup 6 dimensi (Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, Tata Kelola Pemerintahan Desa. ID Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dengan Skor 73,70 dengan kualifikasi Desa Maju.

Selanjutnya apabila data dipilah berdasarkan tingkat ketercapaian realisasi indikator kinerja terhadap target kinerja maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Gambar 2.8
Tingkat Ketercapaian Realisasi Indikator Kinerja



- 1) Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja diatas 100% (**melampaui target**) sejumlah 9 indikator atau 42,86%.
- 2) Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja sama dengan 100% (**sesuai target**) sejumlah 2 indikator atau 9,52%.
- 3) Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **dibawah target** dengan rentang antara 10% s/d 99,99% sejumlah 9 indikator atau 42,86%.
- 4) Terdapat 1 indikator yang berubah penilaiannya atau 4,76%.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Data realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi atau capaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

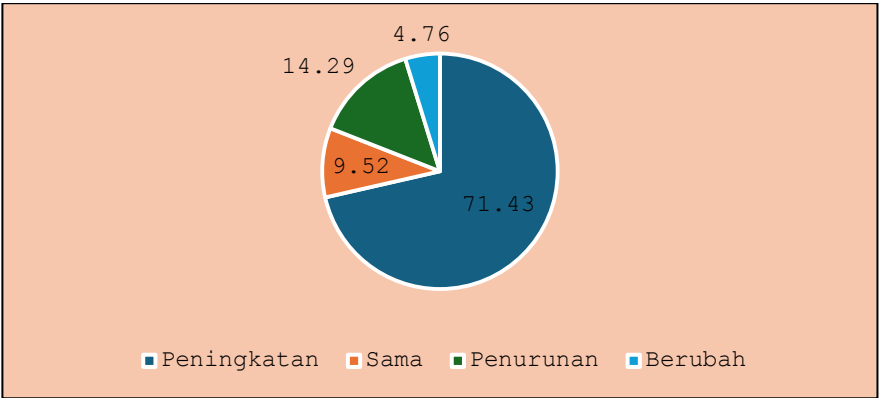
Tabel 2.8
Data Realisasi atau Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Realisasi atau Capaian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,65	8,74	101,04
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,55	13,58	100,22
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	75,64	76,06	100,56

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	90,42	90,9	100,53
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,81	98,77
5	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	95,34	95,24	99,90
6	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	100	100	100
7	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	17,63	20,72	85,09
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73.72	74,98	101,71
9	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	2.906.710	5.357.400.000	184.31
10	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	31,19	32,96	105,67
11	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,7352	NA	NA
12	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3,317	3,320	100,09
		Opini BPK	opini	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	nilai	65,58	67,60	103,08
13	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	82,25	83,20	101,16
14	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,33	4,41	101,85
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	61,72	75,45	122,25
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	82,9	83,22	100,39
16	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	66,33	76,12	114,76
17	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,84	0,85	101,19

Ikhtisar realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi atau capaian kinerja Tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 2.9
Realisasi Atau Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworej
o Pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi atau capaian kinerja
Tahun 2024



- 1) Indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan capaian kinerja sejumlah 15 indikator atau 71,43%.
- 2) Indikator kinerja yang sama dengan capaian kinerja Tahun 2024 sejumlah 2 indikator atau 9,52%.
- 3) Indikator kinerja yang menunjukkan penurunan capaian kinerja sejumlah 3 indikator atau 14,29%.
- 4) Terdapat 1 indikator atau 4,76% yang tidak dapat dibandingkan karena di Tahun 2025 berubah mekanisme penilaiannya yaitu Indeks Desa Membangun.

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Data realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

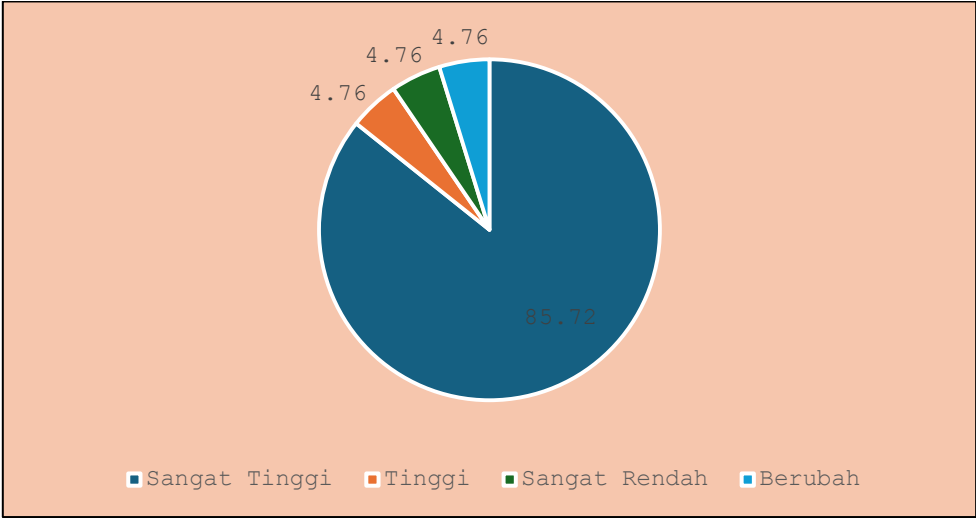
Tabel 2.9
Data Realisasi atau Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RPJMD	Realisasi 2025 terhadap Target RPJMD (%)
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,74	8,94	97,76
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,58	13,99	97,07
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	76,06	75,45	100,81
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	90,9	90,73	100,19
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,26	32,10
5	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	95,24	95,01	100,24
6	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	100	98,81	101,20

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RPJMD	Realisasi 2025 terhadap Target RPJMD (%)
7	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	20,72	28,17	135,96
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,98	79,02	94,89
9	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	5.357.400.000	3.086.885,13	173,55
10	Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	32,96	21,28	154,89
11	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	NA	0,7534	NA
12	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3,320	3,170	104,73
		Opini BPK	opini	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	nilai	67,60	68	99,41
13	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	83,20	80,4	103,48
14	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,41	4,30	102,56
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	75,45	67	112,61
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	83,22	92,97	89,51
16	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	76,12	65,7	115,86
17	Meningkatnya Ketahanan Deaerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,85	0,65	130,77

Ikhtisar realisasi atau capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah, diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 2.10
 Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah



1) Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 18 indikator atau 85,72%.

- 2) Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria tinggi sejumlah 1 indikator atau 4,76 %.
 - 3) Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat rendah sejumlah 1 indikator atau 4,76 %.
 - 4) Terdapat 1 indikator yang tidak dapat dibandingkan nilai capaiannya atau 4,76% dikarenakan perubahan mekanisme penilaian yaitu Indeks Desa Membangun.
- e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai

Pada Sub Bab ini akan menguraikan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai pada setiap sasaran. Adapun uraian pada masing-masing sasaran strategis tersaji sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,29% atau sebesar Rp.39.638.410.891,00 dari anggaran sebesar Rp.748.864.633.337,00 digunakan sebesar Rp.709.226.222.446,00.
- 2) Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,38% atau sebesar Rp.34.213.718.322,00 dari anggaran sebesar Rp.635.542.137.258,00 digunakan sebesar Rp.601.328.418.936,00.
- 3) Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Pangan
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,81% atau sebesar Rp.1.079.940.743,00 dari anggaran sebesar Rp.22.458.077.863,00 digunakan sebesar Rp.21.378.137.120,00.
- 4) Sasaran 4: Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar

berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,36% atau sebesar Rp.335.617.307,00 dari anggaran sebesar Rp.9.998.126.700,00 digunakan sebesar Rp.9.662.509.393,00.

5) Sasaran 5: Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,01% atau sebesar Rp.269.805.086,00 dari anggaran sebesar Rp.5.387.288.474,00 digunakan sebesar Rp.5.117.483.388,00.

6) Sasaran 6: Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,50% atau sebesar Rp.688.675.397,00 dari anggaran sebesar Rp.19.659.711.147,00 digunakan sebesar Rp.18.971.035.750,00.

7) Sasaran 7: Berkurangnya Penduduk Miskin

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,60% atau sebesar Rp.1.033.235.931,00 dari anggaran sebesar Rp.15.666.764.506,00 digunakan sebesar Rp.14.633.528.575,00.

8) Sasaran 8: Berkurangnya Penduduk Miskin Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,32% atau sebesar Rp.29.569.606,00 dari anggaran sebesar Rp.2.233.980.602,00 digunakan sebesar Rp.2.204.410.996,00.

9) Sasaran 9: Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,76% atau sebesar Rp.1.637.165.787,00 dari anggaran sebesar Rp.34.368.071.918,00 digunakan sebesar Rp.32.730.906.131,00.

10) Sasaran 10: Meningkatnya PDRB Per Kapita

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 18,03% atau sebesar Rp.8.628.044.487,00 dari anggaran sebesar Rp.47.852.946.424,00 digunakan sebesar Rp.39.224.901.937,00

11) Sasaran 11: Meningkatnya Pembangunan Perdesaan

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,83% atau sebesar Rp.237.813.175,00 dari anggaran sebesar Rp.8.399.414.300,00 digunakan sebesar Rp.8.161.601.125,00.

12) Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 14,27% atau sebesar Rp.87.874.495.592,00 dari anggaran sebesar Rp.615.654.464.316,00 digunakan sebesar Rp.527.779.968.724,00.

13) Sasaran 13: Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,06% atau sebesar Rp.260.458.576,00 dari anggaran sebesar Rp.6.422.282.172,00 digunakan sebesar Rp.6.161.823.596,00.

- 14) Sasaran 14: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,15% atau sebesar Rp.13.272.725.186,00 dari anggaran sebesar Rp.215.704.464.525,00 digunakan sebesar Rp.202.431.739.339,00.
- 15) Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,98% atau sebesar Rp.5.748.401.838,00 dari anggaran sebesar Rp.144.341.440.470,00 digunakan sebesar Rp.138.593.038.632,00.
- 16) Sasaran 16: Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,36% atau sebesar Rp.1.001.969.370,00 dari anggaran sebesar Rp.18.688.929.270,00 digunakan sebesar Rp.17.686.959.900,00.
- 17) Sasaran 17: Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 9,18% atau sebesar Rp.672.366.917,00 dari anggaran sebesar Rp.7.324.334.589,00 digunakan sebesar Rp.6.651.967.672,00.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai pada Tahun 2025 sebesar 7,68% atau sebesar Rp.196.622.414.211,00 dari anggaran sebesar Rp.2.558.567.067.871,00 digunakan sebesar Rp.2.361.944.653.660,00.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pada Sub Bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja pada sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Adapun uraian pada masing-masing sasaran strategis berdasarkan Indikator, Definisi Operasional, Formula, Satuan dan Sumber data berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/552/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 tersaji sebagai berikut:

1) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan capaian tinggi yaitu sebesar 90,85 dan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian sangat tinggi yaitu sebesar 96,86. Pencapaian sasaran ini didukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 5) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra;
- 6) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 7) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan terdapat orang tua terbebani putra-putrinya bersekolah karena keterbatasan sarana transportasi, biaya transportasi, dan merasa tidak nyaman jika anaknya menuju sekolah yang jauh.
- 2) Masih ada penduduk usia 7-25 tahun yang tidak bersekolah dan putus sekolah yang disebabkan oleh

kondisi ekonomi kurang mampu, Anak berkebutuhan Khusus, kurangnya motivasi dan faktor geografis.

- 3) Terdapat penduduk usia 25 tahun keatas yang tidak mau melanjutkan pendidikannya karena banyak yang sudah bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga dan merasa tidak membutuhkan ijazah.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam pencapaian target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara komprehensif dan peningkatan keterjangkauan akses pendidikan bagi seluruh siswa menuju sekolah serta meningkatkan kolaborasi perpustakaan dengan instansi maupun pihak lain untuk mendukung capaian IPLM serta indikator kinerja lainnya.

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) dengan capaian sangat tinggi yaitu sebesar 100,22. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang selalu ditingkatkan;
- 2) Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui DAK bidang Kesehatan;
- 3) Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan;
- 4) Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan;
- 5) Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan;
- 6) Akses pelayanan kesehatan yang dipermudah.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan dengan:

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan melalui promotif dan preventif.
- 2) Mengoptimalkan kader kesehatan desa.
- 3) Menyediakan sarana kesehatan dengan standar kesehatan.
- 4) Memenuhi tenaga medis dan tenaga paramedis.

3) Meningkatkan Ketahanan Pangan

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) dengan capaian sangat tinggi yaitu sebesar 100,19. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 2) Program Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 3) Program Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan pangan di Kabupaten Purworejo dalam jumlah yang memadai;
- 2) Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Purworejo yang terus meningkat;
- 3) Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan.

Kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo tetap konsisten untuk melakukan peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan.

4) Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian sangat rendah atau sebesar 32,10. Pencapaian sasaran ini didukung Dinas Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
 - 2) Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:
- 1) Tingginya angka kehamilan di usia 15-19 tahun dengan data realisasi ASFR 17,5 dari target sebesar 14;
 - 2) Tingginya kehamilan yang tidak diinginkan di angka 31,2% dari target sebesar 13,8%;
 - 3) Tingginya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dengan data realisasi Unmet Need KB 14,8 dibanding target 9,25;
 - 4) Belum adanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)
 - 5) Tingginya angka kelahiran usia 15–19 tahun, kehamilan tidak diinginkan, dan unmet need KB masih berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran apabila tidak ditangani secara intensif

Kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo harus fokus dalam melakukan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan:

- 1) Penguatan pelayanan KB termasuk peningkatan cakupan MKJP dan pelayanan jemput bola;
- 2) Penurunan unmet need melalui pemetaan pasangan usia subur;
- 3) Intensifikasi konseling pranikah dan pasca persalinan untuk menekan kehamilan yang tidak diinginkan;
- 4) Penguatan Program Generasi Berencana (Genre), PIK-R, dan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) guna menurunkan angka kelahiran usia 15-19 tahun;
- 5) Peningkatan pembinaan ketahanan dan kualitas keluarga untuk mempertahankan capaian lbangga;
- 6) Sinkronisasi dan pemantauan data migrasi masuk dan keluar bekerja sama dengan Disdukcapil dan DIperintransnaker;
- 7) Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai arah kebijakan jangka menengah dan panjang;

- 8) Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk.
- 5) Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender
 - a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 99,47. Pencapaian sasaran ini didukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Program Perlindungan Perempuan;
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - 4) Program Perlindungan Khusus Anak;
 - 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
 - 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 2) Diimplementasikannya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui GAP (*Gender Analisis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*) pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo tetap konsisten melakukan peningkatan kesetaraan gender serta pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dengan mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender melalui GAP (*Gender Analisis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*) pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Perlu menyusun Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
Menyusun *grand desain* analisis gender Kabupaten Purworejo.

6) Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga
a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga dengan indikator Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 100. Pencapaian sasaran ini didukung Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 3) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 5) Program Pembinaan Sejarah;
- 6) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 7) Program Pengelolaan Permuseuman;
- 8) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Kinerja KONI yang semakin baik sebagai mitra kerja DINPORAPAR.
- 2) Optimalisasi penggunaan Stadion Sarwo Edi Wibowo.
- 3) Penyelenggaraan PORKAB untuk mendapatkan bibit-bibit atlet yang unggul daerah.
- 4) Penyelenggaraan POPDA yang berjenjang mulai dari SD s.d. SMA.
- 5) Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung program pemberdayaan dan pembinaan pemuda serta organisasi kepemudaan;
- 6) Partisipasi aktif pemuda dalam organisasi;
- 7) Terjalinnnya kerjasama lintas sektor yang baik;
- 8) Tersedianya pendanaan dan fasilitas.

Pemerintah Kabupaten Purworejo kedepan tetap konsisten meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan melalui:

- 1) Meningkatkan event olahraga untuk masyarakat penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
- 2) Meningkatkan jumlah kewirausahaan pemuda;
- 3) Meningkatkan jumlah pemuda pelopor kabupaten;
- 4) Meningkatkan peran pemuda dalam event budaya daerah dan menumbuhkan kesenian tradisional;
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana;
- 6) Pelatihan pelatih;
- 7) Melakukan pemutakhiran data pemuda dan organisasi kepemudaan secara berkala;
- 8) Menerapkan sistem pelaporan berbasis digital;
- 9) Menetapkan kriteria organisasi aktif yang terukur (jumlah kegiatan, kepengurusan aktif, dan laporan tahunan);
- 10) Koordinasi aktif antara dinas dengan pemuda/organisasi kepemudaan sebagai objek pemberdayaan/pembinaan.

7) Berkurangnya Penduduk Miskin

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Berkurangnya Penduduk Miskin dengan indikator Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 135,96. Pencapaian sasaran ini didukung Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- 2) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 4) Program Pemberdayaan Sosial;
- 5) Program Rehabilitasi Sosial;
- 6) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial yang diberikan (PKH, BPNT, dan Bantuan Sosial lain) bersumber dari pusat.
- 2) DINSOSDALDUKKB Kabupaten Purworejo dalam rangka program penuntasan kemiskinan terus melakukan pembaharuan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) .
- 3) Peningkatan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo.
- 4) Terpenuhinya kuota transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi/provinsi atau daerah (Dinperintrasnaker)

Pemerintah Kabupaten Purworejo kedepan harus lebih fokus pada:

- 1) Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan;
- 2) Integrasi bansos dengan program graduasi KPM menuju kemandirian ekonomi;
- 3) Peningkatan akurasi dan pemutakhiran DTKS/DTSEN secara berkala berbasis by name by address;
- 4) Penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam forum TKPKD untuk intervensi terpadu (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan)
- 5) Pengembangan program padat karya dan pemberdayaan berbasis potensi lokal;
- 6) Monitoring dan evaluasi penerima bansos untuk memastikan tepat sasaran dan mencegah ketergantungan;
- 7) Integrasi program penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan;
- 8) Penguatan intervensi pada kelompok miskin ekstrim dan rentan miskin;
- 9) Peningkatan taraf hidup dan kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional dengan membawa semangat masyarakat Purworejo ke tanah harapan dan membangun masa depan yang lebih sejahtera dengan mengusulkan kuota transmigran ke Kementerian Transmigrasi sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan.

8) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 94,89. Pencapaian sasaran ini didukung Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 4) Program Hubungan Industrial.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Jumlah lowongan kerja yang terisi dan peningkatan penempatan tenaga kerja dari tahun sebelumnya;
- 2) Memfasilitasi penyampaian lowongan kerja melalui berbagai media dan memfasilitasi tempat perekrutan tenaga kerja di Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja;
- 3) Adanya inovasi baru terkait sarana dan prasarana kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat yaitu pelatihan perhotelan.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam menyiapkan sumber daya manusia masyarakatnya yang mampu bersaing dibidang tenaga kerja yang handal, dengan melatih masyarakat sebagai tenaga terampil melalui BLK dan menyelenggarakan *job fair* dan pendidikan sekolah yang berorientasi pada *link and match* dengan dunia usaha.

9) Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan indikator PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 173,55, pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 6) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 7) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 9) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 10) Program Penyuluhan Pertanian.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Produksi dan produktivitas hasil pertanian terus meningkat.
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana pertanian, pengendalian hama dan penyakit pertanian, pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok tani.
- 3) Kebijakan pemerintah melalui subsidi pupuk dan Luas Tambah Tanam (LTT).

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas, perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian hama dan penyakit, serta penyuluhan kepada kelompok tani.

10) Meningkatnya PDRB Per Kapita

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya PDRB Per Kapita dengan indikator PDRB Per Kapita dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 104,44. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- 6) Program Pengembangan Ekspor;
- 7) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
- 8) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 9) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 10) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- 11) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 12) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- 13) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
- 14) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- 15) Program Pengembangan UMKM;
- 16) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 17) Program Pemasaran Pariwisata;
- 18) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 19) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- 20) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 21) Program Promosi Penanaman Modal;
- 22) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 23) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 24) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 25) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 26) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- 27) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 28) Program Pengembangan Perumahan;
- 29) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 30) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Kecil,

Menengah dan Perdagangan;

31) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia yang dimiliki Industri Kecil Menengah (IKM) kurang kompeten;
- 2) Akses pasar dan promosi produk IKM yang terbatas
- 3) Kurangnya investasi baru karena kurangnya promosi investasi yang masif dan terarah;
- 4) Keterbatasan infrastruktur penunjang investasi (jalan, air bersih, listrik, internet)
- 5) Adanya kendala penyediaan lahan siap investasi;
- 6) Masih terdapat keterbatasan koordinasi lintas sektor dalam optimalisasi pemanfaatan lahan produktif.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam:

- 1) Menyiapkan peningkatan kompetensi melalui bimtek dan pelatihan;
- 2) Dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pemasaran produk IKM melalui pameran, business matching, e-commerce dan pengembangan pasar ekspor;
- 3) Mengoptimalkan penyusunan IPRO dan pemanfaatannya untuk media promosi untuk mendatangkan investor baru;
- 4) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta optimalisasi peran gugus tugas investasi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan bagi calon investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Purworejo;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Bapperida dan perangkat daerah teknis untuk sinkronisasi program pendukung pertumbuhan ekonomi;
- 6) Digitalisasi pelayanan perizinan pertanahan untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi;
- 7) Monitoring dampak ekonomi program melalui indikator antara lain jumlah izin, luas lahan produktif, dll.

11) Meningkatnya Pembangunan Perdesaan

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Pembangunan Perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) berubah penilaiannya yang disempurnakan menjadi Indeks Desa (ID) berdasarkan PermendesPDT No. 9 Tahun 2024. IDM fokus pada 3 dimensi (Sosial, Ekonomi, Lingkungan), sedangkan ID mencakup 6 dimensi (Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, Tata Kelola Pemerintahan Desa. ID Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dengan Skor 73,70 dengan kualifikasi Desa Maju, pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 2) Program Penataan Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) ketersediaan anggaran pembangunan yang memadai untuk desa melalui Dana transfer diantaranya Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ke desa dan Alokasi Dana Desa.
- 2) Ketersediaan Sarjana Pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
- 3) Kesadaran yang tinggi dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan desanya dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pertanggungjawaban pembangunan.
- 4) Terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi desa BUMDes.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten fokus dalam pendampingan desa dalam pelaksanaan dana desa dan APBDes, meningkatkan fasilitasi kerjasama antar desa, meningkatkan pembinaan BUMD serta fasilitasi untuk meningkatkan Desa Mandiri dan Maju.

12) Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Maturitas SPIP, Opini BPK, Nilai SAKIP dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 99,85 untuk indikator Maturitas SPIP, 100 untuk indikator Opini BPK dan 99,41 untuk indikator Nilai SAKIP. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Daerah dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;
- 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 6) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 7) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja SPIP Perangkat Daerah.
- 2) Pendampingan Penyusunan Indikator Tujuan Sasaran, Pohon Kinerja, Cascading, dan Penyusunan LKjIP dari Tim KEMENPAN RB RI;
- 3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan;
- 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah;
- 5) Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi SAWIJI.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam pencapaian target sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan berbagai hal yaitu :

- 1) Pemantapan Kebijakan dan SOP terkait SPIP maupun Manajemen Risiko;
- 2) Pelatihan intensif dan berkala tentang SPIP untuk seluruh pegawai, terutama yang terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern. Fokus pada penguatan pemahaman lima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan proses Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi)
- 3) Melakukan bimtek regular yang melibatkan ahli SPIP untuk memberikan solusi terhadap masalah spesifik yang dihadapi organisasi;
- 4) Mendorong pejabat dan pegawai untuk mendapatkan sertifikasi terkait SPIP dari lembaga yang berwenang seperti BPKP;
- 5) Meningkatkan kesadaran pendokumentasian dokumen setiap kegiatan/digitalisasi dokumen pada seluruh Perangkat Daerah;
- 6) Inspektorat Daerah melakukan audit internal secara teratur untuk menilai efektivitas implementasi SPIP dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret;
- 7) Terapkan mekanisme evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan SPIP untuk memetakan area yang masih perlu penguatan.
- 8) Mengoptimalkan fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju Good Governance;
- 10) Meningkatkan gerakan revolusi mental melalui reformasi birokrasi meliputi integritas, budaya kerja dan kerjasama di kalangan birokrasi;
- 11) Peningkatan kompetensi sumber daya perencana;
- 12) Workshop perencanaan dan penganggaran yang terpadu.
- 13) Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel
 - a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 98,91. Pencapaian sasaran ini

didukung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Kepegawaian Daerah;
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia'
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1) Tersedianya pelatihan dan pengembangan SDM ASN dalam satu tahun.
- 2) Informasi pelatihan dan pengembangan SDM ASN mudah diakses.
- 3) Administrasi data dukung pelatihan dan pengembangan SDM ASN telah terdokumentasi dengan baik oleh masing-masing ASN.
- 4) Pemanfaatan Aplikasi SIJEMPOL dan SIBANGKODIR.
- 5) Meningkatnya kesadaran ASN untuk pemenuhan pelatihan dan pengembangan SDM ASN dalam satu tahun.

Kedepan untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang memiliki ASN yang berkompeten dalam kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini.

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan (Diklat Manajerial, Diklat Fungsional Dan Diklat Teknis) bimbingan teknis dan kursus-kursus teknis.
- 2) Melakukan integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian secara menyeluruh yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian.
- 3) Melaksanakan Manajemen Talenta sebagai salah satu penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
- 4) Melaksanakan sistem pengembangan SDM ASN berdasarkan Pola Karier yang jelas.
- 5) Membuka peluang peningkatan Pendidikan formal kepada semua PNS di lingkungan Kabupaten Purworejo.

14) Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 101,61 untuk indikator Indeks Pelayanan Publik dan sebesar 107,79 untuk indikator Indeks Inovasi Daerah. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 3) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 4) Program Pendaftaran Penduduk;
- 5) Program Pencatatan Sipil;
- 6) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 7) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- 8) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- 9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 10) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
- 11) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- 12) Program Pengelolaan Arsip;
- 13) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
- 14) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- 15) Program Perekonomian Dan Pembangunan;
- 16) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 17) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- 18) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- 19) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- 20) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum;

- 21) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - 22) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
 - 23) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - 24) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 25) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
 - 26) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
 - 27) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - 28) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 29) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 30) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 31) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah;
 - 32) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 33) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 34) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan.
- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:
- 1) Inovasi Perangkat Daerah menjadi salah satu Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Pemanfaatan Mall Pelayanan Terpadu secara optimal.
 - 3) Meningkatkan kesadaran Organisasi Pelayanan Publik untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik.

- 4) Perangkat Daerah menganalisis dan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi alat untuk perbaikan pelayanan.
- 5) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri oleh seluruh Perangkat Daerah, Kelurahan, UPT, Puskemas, SMPN dan sebagai SDN.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam pencapaian target pelayanan publik yang prima melalui optimalisasi Mall Pelayanan Terpadu, perbaikan pelayanan dengan menggunakan kajian analisis hasil SKM, meningkatkan berbagai kegiatan inovasi daerah dan krenova dengan bekerjasama dengan *stakeholder pentahelik*. Pemerintah Kabupaten Purworejo harus menyusun Peraturan Bupati pelaksanaan dari peraturan daerah tentang inovasi daerah.

15) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum dengan indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan capaian rendah atau sebesar 51,01. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Kawasan Permukiman;
- 2) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 7) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- 9) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 11) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penghambat Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Pendanaan pembangunan infrastruktur publik kurang dari 40% dari total belanja APBD;
- 2) Pendanaan pembangunan infrastruktur publik masih sangat bergantung pada sumber dana DAK;
- 3) Keterbatasan fiskal daerah mempengaruhi percepatan pemerataan infrastruktur.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten fokus dalam:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur umum dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur umum yang dibutuhkan masyarakat.
- 3) Konsisten memenuhi *mandatory spending* infrastruktur sebesar 40% dari total APBD.
- 4) Optimalisasi sumber pendanaan alternatif;
- 5) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat;
- 6) Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

16) Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

- a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 100,11. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 9) Program Pengelolaan Persampahan;
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan limbah domestik.
- 2) Mulai tertibnya pengolahan air limbah oleh penghasil limbah industri.
- 3) Meningkatnya konservasi lahan kritis dan gerakan Indonesia Hijau.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam:

- 1) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan melalui pembinaan dan sosialisasi secara kontinyu;
- 2) Penerapan teknologi lingkungan tepat guna yang dapat diaplikasi langsung kepada masyarakat;
- 3) Pengendalian sumber pencemaran yang masuk ke sumber air baik dari limbah domestik, sampah, dan aktifitas lahan pertanian;
- 4) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
- 5) Mendorong optimalisasi program penghijauan dan konservasi yang dapat dilakukan pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat;
- 6) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, memberikan sanksi terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah beroperasi tetapi tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, meningkatkan konservasi lahan kritis dan gerakan Indonesia Hijau.

17) Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana

a) Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan capaian sangat tinggi atau sebesar 101,07. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Penanggulangan Bencana;
- 2) Program Penanganan Bencana;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendukung Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan semakin meningkat.
- 2) Dukungan Desa Tangguh Bencana.
- 3) Dukungan dari TAGANA dan BNPB.
- 4) Adanya rencana *kontijensi* bencana.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam penanganan bencana dan siap dengan berbagai situasi dan kondisi dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan guna pemenuhan *response time* kebencanaan. Penerapan *Early Warning System* (EWS) untuk menghadapi bencana di daerah. Membuat Peta Prioritas penempatan EWS berdasarkan tingkat risiko. Melaksanakan cek EWS Rutin di setiap bulan, melaksanakan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat di tempat terpasangnya EWS, meningkatkan kapasitas TRC dan kapasitas kawasan untuk pelatihan penanggulangan bencana, memanfaatkan radio di setiap desa yang telah terbentuk destana untuk memantau perkembangan lokasi kejadian guna percepatan *reponse time* kebencanaan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 tidang menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal ini berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo dan data dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Purworejo dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara usia 5-6 tahun dalam 1 (satu) tahun
- b. Pendidikan Dasar Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara usia 7-15 tahun dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pendidikan Kesetaraan Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara usia 7-18 tahun dalam 1 (satu) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian

Pada Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Purworejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian SPM dari jumlah warga negara yang harus diayani sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Dan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA						ANGGARAN (RP.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	20.887	Des 2025	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80.88	Des 2025	8,597,458,500
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	73,16		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Sekolah Dasar (SD/Mi / SMP / Mts)	96.874	Des.2025	Sekolah Dasar		Des.2025	23,821,526,500
					Angka partisipasi kasar	99,46		
					Angka partisipasi sekolah	99,46		
					Kemampuan literasi SD	69,49		
					Kemampuan numerasi SD	57,57		
					Indeks iklim keamanan SD	77,73		
					Indeks iklim kebinekaan SD	73,83		
					Indeks iklim inklusivitas SD	60,22		
					Sekolah Menengah Pertama			5.665.366.650
					Kemampuan literasi SMP	81,51		
					Kemampuan numerasi SMP	69,91		
					Indeks iklim keamanan SMP	71,31		
					Indeks iklim kebinekaan SMP	71,58		
					Indeks iklim inklusivitas SMP	60,69		
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesenjangan	586	Des 2025	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	16,66	Des 2025	662.000

4.1.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini;	20.887	20.887	100%	8.597.458.500	7.665.238.795	89.16%
2	Pendidikan Dasar;	96.874	96.874	100%	29.486.893.150	26.105.485.448	88,53%
3	Pendidikan Kesetaraan;	586	586	100%	662.000	662.000	100%
	total				38,085,013,650	33,771,386,243	88,67%

b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu

Hasil capaian SPM Bidang Pendidikan pada tabel diatas, dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar, pada masing-masing jenis pelayanan dasar yaitu:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian IP SPM penerima layanan Pendidikan Anak Usia Dini (AUD) setelah pembobotan adalah 80%, sedangkan capaian IP mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	20.887	20.887	100,00%	80,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu yang harus dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	90,2	90,2	100.00 %	20
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80,52	80,52	100.00 %	20
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	73,16	73,16	100.00 %	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

2) Pendidikan Dasar

Capaian IP SPM penerima layanan Pendidikan Dasar setelah pembobotan adalah 80%, sedangkan capaian IP mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Dasar
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Pendidikan Dasar	96.874	96.874	100,00%	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Sekolah Dasar				
1	Angka partisipasi sekolah	99,46	99,46	100,00%	20,00
2	Kemampuan literasi	69.49	69.49	100,00%	20,00
3	Kemampuan numerasi	57.57	57.57	100,00%	20,00
4	Indeks iklim keamanan	77.73	77.73	100,00%	20,00
5	Indeks iklim kebinekaan	73.83	73.83	100,00%	20,00
6	Indeks iklim inklusivitas	60.22	60.22	100,00%	20,00

TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Sekolah Menengah Pertama				
1	Angka partisipasi sekolah	99,46	99,46	100,00%	20,00
2	Kemampuan literasi	81.51	81.51	100,00%	20,00
3	Kemampuan numerasi	69.91	69.91	100,00%	20,00
4	Indeks iklim keamanan	71.31	71.31	100,00%	20,00
5	Indeks iklim kebinekaan	71.58	71.58	100,00%	20,00
6	Indeks iklim inklusivitas	60.69	60.69	100,00%	20,00
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00

3) Pendidikan Kesetaraan

Capaian IP SPM penerima layanan Pendidikan Dasar Kesetaraan setelah pembobotan adalah 80%, sedangkan capaian IP mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
3	Pendidikan Kesetaraan	586	586	100,00	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jas a Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi sekolah	16,66	16,66	100,00%	20,00
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00

c. Capaian IP SPM

Capaian IP SPM pendidikan pada tiap jenis pelayanan dasar diperoleh dengan menjumlahkan IP layanan dan IP mutu sehingga diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.6
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar	TOTAL IP	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Dasar	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
3	Pendidikan Kesetaraan	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
TOTAL IP BIDANG PENDIDIKAN		80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna

Adapun capaian IP SPM Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata tiga indikator pelayanan dasar sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemda yang bersumber dari APBD, APBN & Sumber lain yang sah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Alokasi anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo
Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp. 000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		8.597.458.500	
2	Pengelolaan Pendidikan Dasar			
a	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		23.821.526.500	
b	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		5,665,366,650	
3	Pendidikan Kesetaraan;		662.000	
	Total Anggaran		38,085,013,650	

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Berikut penjelasannya :

Tabel 4.8
Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo
Tahun 2025

No	Jenjang Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Pendidikan Anak Usia Dini;	1.935
2	Pendidikan Dasar;	6.170
3	Pendidikan Kesetaraan;	98

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	Alokasi Anggaran	Alokasi untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal ruang kelas, alat peraga siswa, fasilitas perpustakaan, dan laboratorium	Usulan anggaran tahun berikutnya
II	EKSTERNAL		
1	Pendataan	Belum semua operator satuan pendidikan melakukan pembaruan data secara berkala sehingga terjadi selisih data sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik yang dilaporkan	Sosialisasi entry aplikasi dapodik
2	Pelaksanaan Kegiatan	Adanya penundaan pelaksanaan 3 (tiga) subkegiatan (Pengadaan TIK, Pengadaan DED dan Pengadaan Aplikasi Pendidikan) dikarenakan subkegiatan tersebut dianggarkan pada perubahan anggaran sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk pemilihan penyedia dan pengiriman barang	Usulan anggaran tahun berikutnya

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
3	Capaian SPM	Realisasi capaian SPM bidang pendidikan tahun 2025 berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2025 yang sampai akhir tahun belum dirilis oleh Kemendikdasmen sehingga daerah kesulitan dalam mencantumkan realisasi capaian SPM tahun 2025, Untuk sementara capaian SPM bidang Pendidikan tahun 2025 memakai capaian rapor pendidikan tahun 2024	Koordinasi dengan pusdatin Kemendikdasmen terkait rilis hasil sementara pada tahun berjalan
4	Data Perhitungan	Hasil capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan rapor pendidikan Kemendikdasmen sehingga daerah kesulitan menyajikan data cara penghitungannya bila diminta menyajikan data oleh Inspektorat Daerah	Koordinasi dengan pusdatin Kemendikdasmen terkait data perhitungan capaian SPM bidang Pendidikan

4.2 Urusan Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah ibu hamil dalam 1 (satu) tahun.
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah ibu bersalin dalam 1 (satu) tahun.

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah bayi baru lahir dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pelayanan kesehatan balita indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah balita dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara usia pendidikan dasar dalam 1 (satu) tahun.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif dalam 1 (satu) tahun.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut dalam 1 (satu) tahun.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas dalam 1 (satu) tahun.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas dalam 1 (satu) tahun.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga

- negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat dalam 1 (satu) tahun.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat dalam 1 (satu) tahun.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dalam 1 (satu) tahun.

4.2.2 Target Pencapaian

Dari jenis pelayanan dasar tersebut, Kabupaten Purworejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian SPM Kesehatan yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.10
Target Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/ kota yang mendapat pelayanan / jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/ kota	100% (3757 Ibu hamil)	Setiap tahun	Vaksin Tetanus Dipteri (TD	475	Des - 2025	Rp. 2.254.855.900
					Tablet tambah darah	676260		
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil	3757		
					Test Kehamilan, Pemeriksaan HB	3757		
					Pemeriksaan Golongan Darah	3757		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemeriksaan Glukoprotein Urin	570		
					Skrining Triple Eliminasi (Hepatitis, Sifilis & Sifilis	3757		
					Kartu ibu/rekam medis ibu	3757		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3757		
					Media Promosi Komunikasi	27		
					Gel USG	260		
					Tenaga Dokter	89		
					Tenaga Perawat	1281		
					Tenaga Bidan	784		
					Tenaga Kefarmasian	250		
					Tenaga Gizi	76		
					Kunjungan 6 Kali	6709		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan / jumlah ibu bersalin	100% (3645 Ibu bersalin)	Setiap tahun	Formulir Partograf	3645	Des - 2025	Rp.4.122.400
					Kartu ibu (rekam medis)	3645		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Media promosi	3645		
					komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	27		
					Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	89		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					Tenaga Kefarmasian	250		
					Tenaga Gizi	76		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan / Jumlah bayi baru lahir	100% (3647 bayi)	Setiap tahun	Vaksin Hepatitis B0	3647	Des - 2025	Rp. 62.347.550
					Vitamin K1 injeksi	3647		
					Salep/tetes mata antibiotic	3647		
					Formulir bayi baru lahir	3647		
					Formulir Manajemen	3647		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terpadu Bayi Muda (MTBM)			
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3647		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3647		
					Dokter/dokter spesialis Anak	91		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					Kefarmasian	250		
					Tenaga Promosi	42		
					Tenaga gizi	76		
					Kader Kesehatan	6525		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah balita usia 12 - 59 bulan	100% (25340 balita)	Setiap tahun	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	25340	Des - 2025	Rp. 121.303.500
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	25340		
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	25340		
					Vitamin A Biru	10349		
					Vitamin A Merah	14991		
					Vaksin imunisasi : BCG	25340		
					Polio Tetes	25340		
					IPV	25340		
					DPT HB Hib	25340		
					Campak rubella	25340		
					Imunisasi Lanjutan : DPT HB Hib	25340		
					Campak Rubella	25340		
					BHP	25340		
					Peralatan Anafilatik	27		
					Formula gizi buruk	12		
					Tenaga Dokter	89		
					Tenaga bidan	784		
					Tenaga gizi	76		
					Guru PAUD	1365		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kader Kesehatan	6687		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan / Jumlah anak usia pendidikan dasar	100% (56535 anak)	Setiap tahun	Buku raport kesehatananku	56535	Des - 2025	Rp. 474.542.800
					Buku pemantauan Kesehatan	56535		
					Kuesioner skrining Kesehatan	56535		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	56535		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	56535		
					Tablet tambah darah	9422		
					Alat pemeriksaan HB	27		
					Strip Hb	9422		
					Media promosi			
					Vaksin Campak Rubella DT, Td Untuk BIAS	3360		
					Dokter/Dokter gigi	229		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					Tenaga Gizi	76		
					Tenaga Kefarmasian	250		
					Tenaga Kesmas	47		
					Tenaga Non Kesehatan (Guru) terlatih	1157		
					Tenaga Non Kesehatan	6687		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten atau kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standart / Jumlah	100% (277743orang)	Setiap tahun	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27	Des - 2025	Rp. 49.276.500
					Alat ukur LILA	494		
					Tensimeter	494		
					Glukometer	494		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		orang usia 15 - 59 tahun			Alat pemeriksaan Hb	27		
					Tes tip gla darah, lancet,kapas alcohol	277743		
					KIT IVA Tes	27		
					Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	277743		
					Kit Ophthalmologi Masyarakat	1		
					Kuisisioner PUMA	277743		
					Alat pelayanan KB			
					Set pemasangan dan pencabutan alat kotrasepsi dalam Rahim (AKDR)	27		
					Set pemasangan dan pencabutan implan	27		
					Formulir pencatatan dan pelaporan (SIPTM)	1		
					Vaksin TD	4572		
					Dokter	176		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					Ahli Gizi	76		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	47		
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)	6687		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan / Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas	100% (64783 orang)	Setiap tahun	Alat pemeriksaan deteksi dini	494	Des - 2025	Rp. 387.655.700,-
					Glukometer	494		
					Alat Pemeriksaan kolesterol	494		
					BMHP	64783		
					Instrumen Skrining	64783		
					Buku Kesehatan	64783		



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Lansia Sederhana (SKILAS)			
					Media KIE	27		
					Dokter	176		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					Ahli Gizi	76		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	47		
					Kader Kesehatan terlatih	6687		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan / Jumlah penderita hipertensi	100% (74865 orang)	Setiap tahun	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi,	74865	Des - 2025	Rp.6.536.800,-
					Edukasi (KIE)	27		
					Obat Hipertensi	74865		
					Tensimeter	494		
					Formulir SIPTM	74865		
					Dokter	176		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					Tenaga Gizi	76		
					Tenaga Promosi	42		
					Tenaga Kefarmasian	250		
					Tenaga Kesmas	47		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (11511 orang)	Setiap tahun	Obat Diabetes Mellitus	11511	Des - 2025	Rp. 3.100.000,-
					Fotometer atau Glukometer	27		
					BMHP	11511		
					Formulir SIPTM, ASIK	11511		
					Media KIE	27		
					Dokter	176		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					Tenaga Kefarmasian	250		
					Tenaga Kesmas	47		
					Ahli Gizi	76		
					ATLM	115		
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100% (2363 orang)	Setiap tahun	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ	27	Des - 2025	Rp. 183.707.000,-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jiwa sesuai standar				III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			
					Penyedia Psikofarmaka	2363		
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2363		
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan (SIK)	2363		
					Media KIE	27		
					Tenaga Dokter	176		
					Tenaga Lain yang terlatih dan mempunyai kompetensi	27		
					Tenaga terlatih lainnya	27		
					Tenaga Profesional Lainnya	27		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (5122 orang)	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	27	Des - 2025	Rp. 319.750.600,-
					Reagen Zn TB	27		
					Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	5122		
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunse n, Ose/Lidi), Rak pengering	5122		
					Catridge tes cepat molekuler	750		
					Formulir pencatatan dan pelaporan	27		
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	7		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tuberkulin	750		
					Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis Paru	15		
					Perawat	1281		
					Kefarmasian	250		
					Tenaga Kesmas	47		
					ATLM	115		
					Radiografer	36		
					Kader Kesehatan	135		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	100% (5832 orang)	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	27	Des -2025	Rp. 29.255.400
					Tes Cepat HIV/RDT	5832		
					BMHP	5832		
					Rekam Medis	5832		
					Tenaga Dokter	192		
					Bidan	784		
					Perawat	1281		
					ATLM	115		
					Tenaga Kesmas	47		
					Tenaga Non Kesehatan	135		

4.2.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian SPM

Capaian penerapan SPM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel. 4.11
Realisasi Pelayanan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			ANGGARAN (RP.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kesehatan ibu hamil	3757	3757	100	2.254.855.900	2,085,382,008	92,48
2	Kesehatan ibu bersalin	3645	3645	100	4.122.400	4,117,400	99,88
3	Kesehatan bayi baru lahir	3647	3647	100	62.347.550	58,307,555	93,52
4	Kesehatan balita	25340	25340	100	121.303.500	117,194,810	96,61

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			ANGGARAN (RP.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar	56535	56535	100	474.542.800	460,829,422	97,11
6	Kesehatan usia produktif	277743	277743	100	49.276.500	48,428,098	98,28
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	64783	64783	100	387.655.700	365,944,311	94,40
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74865	74865	100	6.536.800	5,931,800	90,74
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11511	11511	100	3.100.000	3,100,000	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	2363	2363	100	183.797.000	178,676,999	97,21
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	5122	5122	100	319.750.600	203,514,540	63,65
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	2363	2363	100	29.255.400	23,206,400	79,32

- b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Hasil capaian SPM Bidang Kesehatan pada tabel diatas, dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar pada masing-masing jenis pelayanan dasar yaitu:
- 1) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil masing-masing tercapai sebesar 80 % dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.12
 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3757	3757	100,00	80
NO		PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	

	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
1	2	3		5	6
1	Vaksin Tetanus Dipteri (TD)	475	475	100,00	20
2	Tablet tambah darah	676260	676260	100,00	20
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil	3757	3757	100,00	20
4	Test Kehamilan, Pemeriksaan HB	3757	3757	100,00	20
5	Pemeriksaan Golongan Darah	3757	3757	100,00	20
6	Pemeriksaan Glukoprotein Urin	570	570	100,00	20
7	Skrining Triple Eliminasi (Hepatitis, Sifilis & Sifilis	3757	3757	100,00	20
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	3757	3757	100,00	20
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3757	3757	100,00	20
10	Media Promosi Komunikasi	27	27	100,00	20
11	Gel USG	260	260	100,00	20
12	Tenaga Dokter	89	89	100,00	20
13	Tenaga Perawat	306	306	100,00	20
14	Tenaga Bidan	546	546	100,00	20
15	Tenaga Kefarmasian	45	45	100,00	20
16	Tenaga Gizi	47	47	100,00	20
17	Kunjungan 6 Kali	7306	7306	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan ibu hamil					20

2) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3645	3645	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Formulir Partograf	3645	3645	100,00	20
2	Kartu ibu (rekam medis)	3645	3645	100,00	20
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Media promosi	3645	3645	100,00	20

NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
4	komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	27	27	100,00	20
5	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	89	89	100,00	20
6	Bidan	784	784	100,00	20
7	Perawat	1281	1281	100,00	20
8	Tenaga Kefarmasian	250	250	100,00	20
9	Tenaga Gizi	76	76	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan ibu bersalin					20

3) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3647	3647	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Vaksin Hepatitis B0	3647	3647	100,00	20
2	Vitamin K1 injeksi	3647	3647	100,00	20
3	Salep/tetes mata antibiotic	3647	3647	100,00	20
4	Formulir bayi baru lahir	3647	3647	100,00	20
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	3647	3647	100,00	20
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3647	3647	100,00	20
7	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3647	3647	100,00	20
8	Dokter/Dokter spesialis Anak	91	91	100,00	20
9	Bidan	784	784	100,00	20
10	Vaksin Hepatitis B0	3647	3647	100,00	20
11	Vitamin K1 injeksi	3647	3647	100,00	20
12	Salep/tetes mata antibiotic	3647	3647	100,00	20
13	Formulir bayi baru lahir	3647	3647	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					20

4) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Balita Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.15
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Balita	25340	25340	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	25340	25340	100,00	20
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	25340	25340	100,00	20
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	25340	25340	100,00	20
4	Vitamin A Biru	10349	10349	100,00	20
5	Vitamin A Merah	14991	14991	100,00	20
6	Vaksin imunisasi : BCG	25340	25340	100,00	20
7	Polio Tetes	25340	25340	100,00	20
8	IPV	25340	25340	100,00	20
9	DPT HB Hib	25340	25340	100,00	20
10	Campak rubella	25340	25340	100,00	20
11	Imunisasi Lanjutan : DPT HB Hib	25340	25340	100,00	20
12	Campak Rubella	25340	25340	100,00	20
13	BHP	25340	25340	100,00	20
14	Peralatan Anafilatik	27	27	100,00	20
15	Formula gizi buruk	12	12	100,00	20
16	Tenaga Dokter	89	89	100,00	20
17	Tenaga bidan	784	784	100,00	20
18	Tenaga gizi	76	76	100,00	20
19	Guru PAUD	1365	1365	100,00	20
20	Kader Kesehatan	6687	6687	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan balita					20

5) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.16
 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada
 Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	56535	56535	100,00	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Buku raport kesehatanku	56535	56535	100,00	20
2	Buku pemantauan Kesehatan	56535	56535	100,00	20
3	Kuesioner skrining Kesehatan	56535	56535	100,00	20
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	56535	56535	100,00	20
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	56535	56535	100,00	20
6	Tablet tambah darah	9422	9422	100,00	20
7	Alat pemeriksaan HB	27	27	100,00	20
8	Strip Hb	9422	9422	100,00	20
9	Media promosi			100,00	20
10	Vaksin Campak Rubella DT, Td Untuk BIAS	3360	3360	100,00	20
11	Dokter/Dokter gigi	229	229	100,00	20
12	Bidan	784	784	100,00	20
13	Perawat	1281	1281	100,00	20
14	Tenaga Gizi	76	76	100,00	20
15	Tenaga Kefarmasian	250	250	100,00	20
16	Tenaga Kesmas	47	47	100,00	20
17	Tenaga Non Kesehatan (Guru) terlatih	1157	1157	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					20

6) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.17
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada
Usia Produktif Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	277743	277743	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27	27	100	20
2	Alat ukur LILA	494	494	100	20
3	Tensimeter	494	494	100	20
4	Glukometer	494	494	100	20
5	Alat pemeriksaan Hb	27	27	100	20
6	Tes tip gla darah, lancet,kapas alcohol	277743	277743	100	20
7	KIT IVA Tes	27	27	100	20
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	277743	277743	100	20
9	Kit Ophthalmologi Masyarakat	1	1	100	20
10	Kuisisioner PUMA	277743	277743	100	20
11	Alat pelayanan KB			100	20
12	Set pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)	27	27	100	20
13	Set pemasangan dan pencabutan implan	27	27	100	20
14	Formulir pencatatan dan pelaporan (SIPTM)	1	1	100	20
15	Vaksin TD	4572	4572	100	20
16	Dokter	176	176	100	20
17	Bidan	784	784	100	20
18	Perawat	1281	1281	100	20
19	Ahli Gizi	76	76	100	20
20	Tenaga Kesehatan Masyarakat	47	47	100	20
21	Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)	6687	6687	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan pada usia produktif					20,00

7) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.18
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	64783	64783	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Alat pemeriksaan deteksi dini	494	494	100	20
2	Glukometer	494	494	100	20
3	Alat Pemeriksaan kolesterol	494	494	100	20
4	BMHP	64783	64783	100	20
5	Instrumen Skrining	64783	64783	100	20
6	Buku Kesehatan Lansia Sederhana (SKILAS)	64783	64783	100	20
7	Media KIE	27	27	100	20
8	Dokter	176	176	100	20
9	Bidan	784	784	100	20
10	Perawat	1281	1281	100	20
11	Ahli Gizi	76	76	100	20
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat	47	47	100	20
13	Kader Kesehatan terlatih	6687	6687	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					20

8) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.19
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74865	74865	100,00	20

NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi,	27	27	100	20
2	Edukasi (KIE)	27	27	100	20
3	Obat Hipertensi	74865	74865	100	20
4	Tensimeter	494	494	100	20
5	Formulir SIPTM	74865	74865	100	20
6	Dokter	176	176	100	20
7	Bidan	784	784	100	20
8	Perawat	1281	1281	100	20
9	Tenaga Gizi	76	76	100	20
10	Tenaga Promosi	42	42	100	20
11	Tenaga Kefarmasian	250	250	100	20
12	Tenaga Kesmas	47	47	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					20,00

9) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11511	11511	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Obat Diabetes Mellitus	11511	11511	100	20
2	Fotometer atau Glukometer	27	27	100	20
3	BMHP	11511	11511	100	20
4	Formulir SIPTM, ASIK	11511	11511	100	20
5	Media KIE	27	27	100	20
6	Dokter	176	176	100	20

NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
7	Bidan	784	784	100	20
8	Perawat	1281	1281	100	20
9	Tenaga Kefarmasian	250	250	100	20
10	Tenaga Kesmas	47	47	100	20
11	Ahli Gizi	76	76	100	20
12	ATLM	115	115	100	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus					20,00

10) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.21

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2363	2363	100,00	80,00
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	27	27	100,00	20
2	Penyedia Fsikofarmaka	2363	2363	100,00	20
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2363	2363	100,00	20
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan (SIK)	2363	2363	100,00	20
5	Media KIE	27	27	100,00	20
6	Tenaga Dokter	176	176	100,00	20
7	Tenaga Lain yang terlatih dan mempunyai kopetensi	27	27	100,00	20
8	Tenaga terlatih lainnya	27	27	100,00	20
9	Tenaga Profesional Lainnya	27	27	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					20,00

11) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan Kesehatan pada orang terduga *tuberkulosis* capaian masing-masing tercapai sebesar 80.% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.22
Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis berat Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5122	5122	100,00	20
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	27	27	100,00	20
2	Reagen Zn TB	27	27	100,00	20
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	5122	5122	100,00	20
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	5122	5122	100,00	20
5	Catridge tes cepat molekuler	750	750	100,00	20
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	27	27	100,00	20
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	7	7	100,00	20
8	Tuberkulin	750	750	100,00	20
9	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis Paru	15	15	100,00	20
10	Perawat	1281	1281	100,00	20
11	Kefarmasian	250	250	100,00	20
12	Tenaga Kesmas	47	47	100,00	20
13	ATLM	115	115	100,00	20
14	Radiografer	36	36	100,00	20
15	Kader Kesehatan	135	135	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis					20

12) Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh

manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) capaian masing-masing tercapai sebesar 80% dan 20% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.23
Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	5832	5832	100,00	20

NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	27	1511	100,00	20
2	Tes Cepat HIV/RDT	5832	6931	100,00	20
3	BMHP	5832	7244	100,00	20
4	Rekam Medis	5832	5782	100,00	20
5	Tenaga Dokter	192	68	100,00	20
6	Bidan	784	540	100,00	20
7	Perawat	1281	298	100,00	20
8	ATLM	115	38	100,00	20
9	Tenaga Kesmas	47	44	100,00	20
10	Tenaga Non Kesehatan	135	307	100,00	20
Total Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					20,00

- c. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Capaian IP SPM kesehatan pada tiap jenis pelayanan dasar diperoleh dengan menjumlahkan IP layanan dan IP mutu sehingga diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.24
 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS SPM (IP LAYANAN + IP MUTU)	KATEGORI INDEKS SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan kesehatan balita;	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100	Tuntas Paripurna
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	100	Tuntas Paripurna
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	100	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	Tuntas Paripurna
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan		100	Tuntas Paripurna

4.2.4 Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.25
 Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN		
		APBN	APBD	SUMBER LAIN YANG SAH
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil		Rp. 2.254.855.900,-	
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin		Rp. 4.122.400,-	
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir		Rp. 62.347.550,-	
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita		Rp. 121.303.500,-	
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Rp. 474.542.800,-	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN		
		APBN	APBD	SUMBER LAIN YANG SAH
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif		Rp. 49.276.500,-	
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut		Rp. 387.655.700,-	
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi		Rp. 6.536.800,-	
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita DM		Rp. 3.100.000,-	
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Rp. 183.797.000,-	
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp. 319.750.600,-	
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp. 29.255.400,-	
	Total		Rp. 3.896.544.150,-	

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk Pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada Tahun 2025 dibutuhkan Sumber Daya Personil Pelaksana Pelayanan sebagai berikut :

Tabel. 4.26
Sumber Daya Personil Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SDM YANG TERLIBAT	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter/dokter spesialis kebidanan	89
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Tenaga Kefarmasian	250
		Tenaga Gizi	76
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter/dokter spesialis kebidanan	89
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Tenaga Kefarmasian	250
		Tenaga Gizi	76
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter/dokter spesialis kebidanan	89
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Tenaga Kefarmasian	250
		Tenaga Gizi	76
		Tenaga Promosi Kesehatan	42
		Kader Kesehatan	6525
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter	89
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Ahli Gizi	76
		Guru PAUD	1365
		Kader Kesehatan	6687

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SDM YANG TERLIBAT	JUMLAH
1	2	3	4
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter/Dokter gigi	229
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Ahli Gizi	76
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	47
		Guru	1157
		Kader Kesehatan	6687
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter	176
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Ahli Gizi	76
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	47
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	6687
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter	176
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Ahli Gizi	76
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	47
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	6687
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter	176
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Tenaga Gizi	76
		Tenaga Promosi Kesehatan	42
		Tenaga Kefarmasian	250
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	47
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter	176
		Bidan	784
		Perawat	1281
		Tenaga Kefarmasian	250
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	47
		Ahli Gizi	76
		ATLM	115
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter	176
		Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi	27
		Tenaga lain yang terlatih kesehatan jiwa	27
		Tenaga professional lainnya	27
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	15
		Perawat	1281
		Kefarmasian	250
		Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	115
		Penata Rontgen	36
		Tenaga kesehatan masyarakat	47
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	135
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	192
		Perawat	1281
		Bidan	784
		Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	115

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SDM YANG TERLIBAT	JUMLAH
1	2	3	4
	Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Tenaga kesehatan masyarakat	47
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	135

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalah dan solusi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025, baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.27
 Permasalahan Dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	Internal		
1	Sumber Daya Manusia	- Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan SPM sehingga beban kerja menjadi berat krn jumlah sasaran banyak (rasio) - SDM di puskesmas kebanyakan tugas rangkap - Belum semua SDM memiliki kompetensi sesuai standard - Keterbatasan anggaran dalam peninkatan mutu SDM - Mutasi SDM sangat berpengaruh pada layanan SPM	- Efisiensi pembagian kerja - Mengusulkan renbut SDM - Peningkatan Kapasitas SDM melalui orientasi dan pelatihan - Pengusulan Anggaran
2	Pembiayaan	- Penyusunan biaya belum mengacu pada sistem pembiayaan SPM (<i>costing</i> SPM) - Keterbatasan anggaran dalam peninkatan mutu SDM - Alokasi anggaran belum sesuai besaran sasaran - Efiseensi anggaran yang cukup besar akan sangat berpengaruh pada pencapaian target - Pembiayaan SPM belum mengakomodir semua warga negara yang berhak mendapat layanan dasar hanya berfokus pada sasaran prioritas saja.	- Pelatihan dan penerapan <i>costing</i> SPM dalam perencanaan - Pengusulan Anggaran - Menentukan skala prioritas
3	Pemenuhan Kebutuhan mutu barang	- Pemenuhan mutu barang masih kurang dikarenakan sasaran yang sangat besar terutama buku raport	- Advokasi ke lintas sektor untuk pemenuhan mutu barang

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Kesehatan dan buku pemantauan Kesehatan lansia - Pemenuhan kebutuhan mutu barang belum mengakomodir semua sasaran yang berhak mendapat layanan.	
4	Pengumpulan Data	- Adanya Perbedaan persepsi dalam penentuan sasaran SPM serta perhitungan pencapaian	Peningkatan surveylans data
5	Pelayanan SPM	- Pelaksanaan pelayanan belum seluruhnya secara masif dan intergrasi lintas program - Standart layanan yang cukup panjang mengakibatkan pencapaian belum bisa optimal	Meningkatkan cakupan pelayanan dengan sinergitas antar program Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelayanan Kesehatan sesuai standar
II	Eksternal		
NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Masyarakat	- Angka partisipasi masyarakat untuk mengakses pelayanan kurang - Adanya penolakan vaksinasi baik pada ibu hamil maupun bayi - Kesadaran Masyarakat yang belum optimal dikarenakan merasa dirinya baik baik saja tidak memeriksakan secara dini	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelayanan Kesehatan sesuai standar Koordinasi dengan lintas sektor terkait kehalalan vaksin
2	Lintas Sektor	- Keterlibatan lintas sektor dalam penggerakan masyarakat dan pemenuhan mutu layanan masih kurang - Pemberdayaan Masyarakat yang belum optimal	Koordinasi dengan Pemda dan lintas sektor untuk meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam penggerakan masyarakat dan pemenuhan mutu layanan. Mengoptimalkan kader Kesehatan untuk membantu melakukan sosialisasi serta mengaktifkan Masyarakat untuk peduli tentang pentingnya Kesehatan atau deteksi dini sebelum terjadi sakit.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023, jenis pelayanan dasar dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal (SPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum meliputi :

- a. penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Pekerjaan Umum memuat :

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten Purworejo berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

4.3.2 Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Indikator, target, anggaran, dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dapat dijelaskan menurut tabel berikut:

Tabel 4.28
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 orang	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	100%	Setiap Tahun	308.583
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	25 SR		
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	25 SR		
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	- Rumah Tangga		
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	- Rumah Tangga		
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.644 orang	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	100%	Setiap Tahun	916.784,425
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses	661 Rumah Tangga		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					pengolahan air limbah domestik)			
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	- Rumah Tangga		
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	661 Rumah Tangga		
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	- Rumah Tangga		
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan).	- Rumah Tangga		

Sumber : DPUPR Kab. Purworejo Tahun 2025

4.3.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah *selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya*. Realisasi capaian SPM bidang pekerjaan umum

tahun 2025 Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu APBN, APBD, dan Dana Lain	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 orang atau 25 SR	100 orang atau 25 SR	100,00	308.583.000	301.454.847	97,69
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.644 orang atau 661 Rumah Tangga	2.644 orang atau 661 Rumah Tangga	100,00	7.916.784.425	7.295.645.474	92,15

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2025 dalam hal target penerima layanan dasar SPM, DPUPR mampu mencapai target yang sudah ditentukan (100% tercapai). DPUPR dalam pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum dengan jenis pelayanan dasar terkait penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100 %; sedangkan terkait penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar 100 %.

Sedangkan untuk pencapaian akses layanan air minum se-Kabupaten Purworejo yang dihitung dari akumulasi perhitungan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.30
Rekapitulasi Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/ KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	280.688	277.703	2.985	98,94

Sedangkan untuk pencapaian akses layanan air limbah domestik se-Kabupaten Purworejo yang dihitung dari akumulasi perhitungan akses sanitasi layak ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.31
Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Purworejo Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/ KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	280.688	269.302	11.386	95,94

Dari tabel 4.30 dan 4.31 hasil penghitungan, total KK tahun 2025 sebesar 280.688 KK, total akses air minum ada 277.703 KK (98,94 %) dengan rincian 89.093 KK (31,74 %) jaringan perpipaan dan 188.610 KK (67,20 %) bukan jaringan perpipaan. Ada 2.985 KK (1,06 %) yang belum memiliki akses air minum layak yang menjadi target pemenuhan di tahun-tahun berikutnya. Dari tabel 4.30 dan 4.31 hasil penghitungan, total KK tahun 2025 sebesar 280.688 KK, akses sanitasi layak 269.302 KK (95,94 %). Ada 11.386 KK (4,06 %) yang belum memiliki akses sanitasi layak yang menjadi target pemenuhan di tahun-tahun berikutnya. Hasil tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Purworejo dalam hal pemenuhan akses sanitasi layak **mampu memenuhi** target dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo, serta Renstra dan Renja DPUPR Kabupaten Purworejo. Dalam DPA termuat indikator target persentase Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di tahun 2025 sebesar 95,80 %.

Sedangkan dalam hal pemenuhan akses air minum layak Kabupaten Purworejo **belum mampu memenuhi** target dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo, serta Renstra dan Renja DPUPR Kabupaten Purworejo. Dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan DPA termuat indikator target persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di tahun 2025 sebesar 100 %.

Target akses Air Minum yang tidak tercapai karena pada tahun 2025 tidak ada program DAK Air Minum, penurunan jumlah pelanggan KP-SPAMS di desa (karena perubahan kondisi debit air baku dan pengelolaan SPAM yang kurang maksimal) dan intervensi penyediaan infrastruktur kecil, tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk. Jadi meskipun ada peningkatan jumlah jaringan perpipaan dari PDAM dan peningkatan jumlah SR yang mendapat akses air minum, tetapi karena jumlah penduduknya meningkat, menyebabkan pembagiannya bertambah dan persentase akses air minum tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan target 100% akses air minum layak belum dapat tercapai karena masih ada warga di beberapa lokasi yang kesulitan air bersih. Warga kesulitan air bersih sebab tidak mempunyai sumber air sendiri dengan debit yang stabil/cukup sehingga harus mengambil air pada lokasi yang relatif jauh dan mengandalkan bantuan dari BPBD Kabupaten Purworejo maupun dari para relawan.

- b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu
 - 1) Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah sebagai berikut :

Tabel 4.32

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Layanan dan Mutu Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100,00	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah Mutu yang terlayani (Rumah Tangga)		
1	2	3	4	5	6
	JARINGAN PERPIPAAN				
	Kuantitas SPAM: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	25	25	100,00	20%
	Kualitas SPAM: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	25	25	100,00	20%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
	Kuantitas SPAM: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	0	100,00	20%
	Kualitas SPAM: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	0	0	100,00	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (TOTAL KOLOM 5/JUMLAH MUTU)				100,00	20%

2) Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33

Capaian Indeks Pencapaian (IP) layanan dan mutu pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar(5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2644	2644	100,00	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah Mutu yang terlayani (Rumah Tangga)		
1	2	3	4	5	6
	Kuantitas SPALD: Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	661	661	100,00	
	Kualitas SPALD-T: Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	0	0	100,00	
	Kualitas SPALD-S: 1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	661	661	100,00	
	Kualitas SPALD-S: 2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	0	0	100,00	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (TOTAL KOLOM 5/JUMLAH MUTU)				100,00	20,00

c. Capaian IP SPM

Tabel 4.34
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	Tuntas Paripurna
	Rata-Rata Indeks SPM Bidang Pekerjaan Umum	100	Tuntas Paripurna

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah baik bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lain yang sah. Alokasi anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN (RP.000)					
		APBN TUGAS PEMBAN TUAN	APBD DAU	APBD DAK	APBN (DEKON SENTRASI)	SUMBER LAIN YANG SAH	TOTAL
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0	308.583	0	0	0	308.583
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	800.000	284.805,425	6.821.479	0	10.500	7.916.784,425
	TOTAL	800.000	593.388,425	6.821.479	0	10.500	8.225.367,425

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.36
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang
Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suranto, S.T., S.Sos., MPA.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Gunarto, S.T.	Sekretaris Dinas	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Riski Khozari, S.T.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Anawati Soewarno, S.P.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Sekretaris
5.	Hana Norma Rakhmawati, S.T.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
6.	Katarina Widhyanti, S.T.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
7.	Aditiya Dimas Rakasiwi, S.T.	Pengelola Jasa Konstruksi	Anggota
8.	Sukma Adi Pratama, A.Md.T	Pengelola Jasa Konstruksi	Anggota
9.	Suyanto	Insinyur Rancang Bangun	Anggota
10.	Hari Purnomosidi	Pengemudi	Anggota
11.	Muh. Mukhlas	Pramu Kebersihan	Anggota

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh. Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diperlukan dapat dijelaskan menurut tabel berikut:

Tabel 4.37
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Pengumpulan data	Banyaknya jumlah desa/kelurahan (494) menjadikan pendataan holistic banyaknya rumah, jumlah rumah tangga, sumber air baku, kapasitas intake, kapasitas produksi, idle capacity, jenis SPAM, dan jenis bangunan sanitasi yang dimiliki di Kab. Purworejo membutuhkan waktu lama dan melibatkan peran aktif desa.	Pembuatan sistem berbasis internet yang digunakan untuk input data pembangunan secara holistik. Dimana pemerintah desa berperan langsung dalam pengisian aplikasi
2	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan aktual jumlah rumah/KK, jaringan perpipaan, bukan perpipaan, dan jumlah bangunan sanitasi harus selalu dapat dilakukan pembaruan secara berkala sehingga memerlukan waktu yang lama karena banyaknya desa di Kabupaten Purworejo dan	Penghitungan kebutuhan didasarkan pada data sekunder terbaru dari instansi pemerintah yang dapat dipercaya. Ketika aplikasi pengumpulan data siap, hasil data sekunder dan aplikasi dapat dikomparasikan untuk

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		memerlukan banyak data sekunder dari pihak terkait lainnya.	menghasilkan keakuratan data yang lebih baik
	Penghitungan Kebutuhan	Dalam tabel penghitungan kebutuhan terdapat data nama KK dan NIK tiap KK yang tentunya membutuhkan proses yang lama dan kerja sama dengan pihak terkait selama kurun waktu tertentu. Data NIK jika diupload dalam website spm bangda menjadi sesuatu yang rawan akan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Bekerja sama dengan pihak desa dalam pemenuhan data tersebut. Data NIK penerima layanan air minum dan sanitasi juga tidak perlu diupload pada website spm bangda.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Anggaran yang ada (APBN, Provinsi, dan Kabupaten) belum dapat memenuhi kebutuhan penyediaan/ peningkatan sarana SPAM dan pengelolaan air limbah untuk mencapai target 100% akses air minum dan sanitasi layak.	Optimalisasi segala sumber pedanaan baik dari pemerintah maupun CSR dalam pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi
4	Pelaksanaan	Data yang sulit didapatkan secara lengkap sehingga menghambat pembuatan laoporan SPM dan lampirannya.	
II	Eksternal		
5	Keakuratan data	Data sekunder belum dapat dipastikan tingkat keakuratannya terutama pada penghitungan jaringan perpipaan yang dihibahkan kepada KP-SPAMS karena sulitnya koordinasi kepada KP-SPAMS. Data terkait air minum bukan jaringan perpipaan juga sulit kita dapatkan data sekundernya.	Adanya koordinasi yang baik antara KP-SPAMS dan dinas, peningkatan kapasitas KP-SPAMS dalam pengelolaan data SR, dan bantuan pendanaan bagi KP-SPAMS untuk menunjang pendataan yang lebih baik.

- 4.4

Urusan Perumahan Rakyat

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo

4.4.1

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dasar pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah:
- LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
- 209

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat kewenangan kabupaten/kota yang meliputi :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan jasa sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dalam 1 (satu) tahun.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang dan jasa sesuai dengan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dalam 1 (satu) tahun.

4.4.2 Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 tahun termasuk perhitungan pembiayaannya. Target capaian SPM Kabupaten Purworejo tahun 2025 pada 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah ditetapkan melalui SK Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/761/2025 tentang Penetapan Target Capaian SPM Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, ditargetkan 20 warga negara (terdiri dari 6 rumah) berhak menerima layanan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupate/kota melalui pemukiman kembali. Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025 Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan menurut tabel berikut

Tabel 4. 38.
Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dalam 1 (satu) tahun	20 orang	Desember 2025	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	Desember 2025	0
					2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0		0
					3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	6		240.000.000
					4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0		0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dalam 1 (satu) tahun.	0	Desember 2025	1. Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	Desember 2025	0
					2. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni	0		0

Sumber : Dinperkimtan 2025

4.4.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025 Kabupaten Purworejo dibagi menjadi 2 uraian. Uraian pertama adalah capaian SPM yang menjelaskan pemberian layanan dasar menurut penerima dan mutu barang. Uraian kedua adalah realisasi anggaran untuk pengumpulan data. Realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4. 39.

Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD Prov. Jawa Tengah	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	20	20	100	240.000.000	240.000.000	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	100	-	-	100

Sumber : Dinperkimtan, 2025

Pada tahun 2025, jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi **100%** yaitu dari rencana penerima layanan sejumlah 20 orang dan mutu barang 6 unit rumah, dapat terealisasi seluruhnya yaitu penerima layanan 20 orang dan mutu barang 6 unit rumah. Serapan anggaran pada jenis layanan SPM tersebut sebesar Rp. 240.000.000,- atau 100% dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain, dalam hal serapan anggaran kegiatan pendataan SPM sebesar Rp 10.990.835,- atau 97,57%.

Sedangkan pada jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupate/Kota, dikarenakan tidak adanya SK Kepala Daerah tentang penetapan daerah yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten Purworejo, maka tidak ada target yang harus direalisasikan dan capaian dinilai 100%.

b. Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Layanan Dasar

Hasil capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada realisasi capaian SPM diatas dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar pada masing-masing jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat. Hasil penghitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Capaian IP penerima layanan dasar dan IP mutu minimal layanan dasar untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota masing-masing telah terpenuhi yaitu sebesar 80% dan 20%. Berikut penjelasannya.

Tabel 4. 40

Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	20	20	100	80
Total Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencan Kabupaten/Kota					80

No		Penerima Pelayanan Dasar	Persentase	
----	--	--------------------------	------------	--

	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	(4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	-	-	-
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	-
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	6	6	100	20
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-
Total Indeks Pencapaian Mutu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencan Kabupaten/Kota					20

Sumber : Dinperkimtan, 2025

2) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar untuk Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing telah terpenuhi yaitu sebesar 80% dan 20%. Dikarenakan tidak adanya SK Kepala Daerah tentang penetapan daerah yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten Purworejo, maka tidak ada target yang harus direalisasikan dan capaian dinilai 100%. Berikut penjelasannya.

Tabel 4.41.

Capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	-	-	100	80
Total Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-
2	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni	-	-	-	-
Total Indeks Pencapaian Mutu Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					20

Sumber : Dinperkimtan, 2025

c. Capaian Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM)

Hasil capaian IP Penerima Layanan Dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar pada tabel diatas dijabarkan kembali melalui penghitungan IP SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.42.
Capaian IP SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Penerima Layanan Dasar + IP Mutu Minimal Layanan Dasar)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	80 + 20 = 100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	80 + 20 = 100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinperkimtan, 2025

Dari hasil penghitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian IP SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo tahun 2025 pada dua jenis pelayanan dasar adalah 100,00% dengan kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah baik bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lain yang sah. Alokasi anggaran pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025 sebesar Rp. 251.265.000,- dimana Rp. 11.265.000,- atau 4,48% bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo untuk kegiatan pengumpulan data dan Rp. 240.000.000,- atau 95,52% bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pemukiman kembali (pembangunan baru di lokasi lain yang lebih aman) rumah terdampak bencana sebanyak 6 unit. Sedangkan layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota tidak ada alokasi anggaran pada tahun 2025.

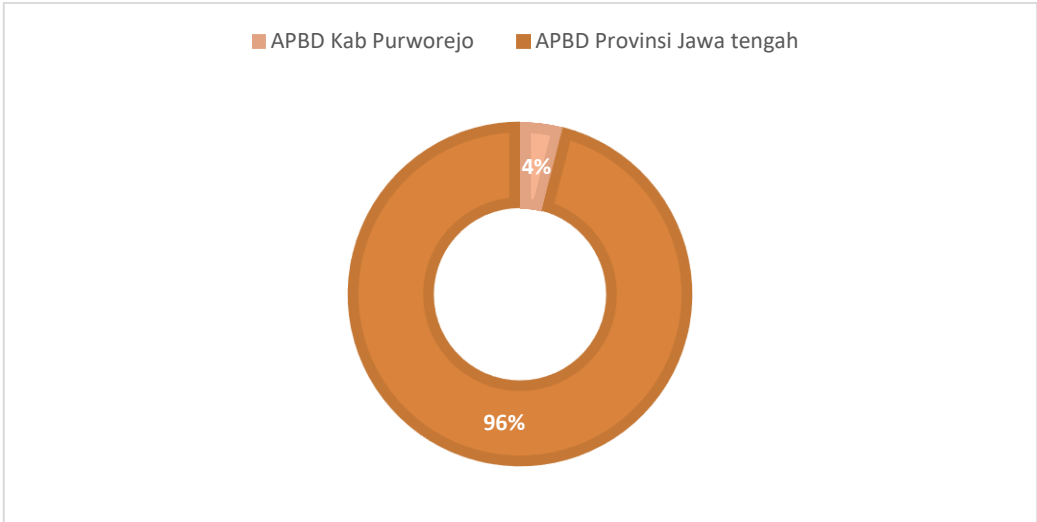
Tabel 4.43.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			
		APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Baznas
1	Pendataan SPM	-	-	11.265.000,-	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	-	240.000.000,-	-	-
3	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	-	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			
		APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Baznas
	relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota				
	JUMLAH	Rp. 251.265.000,-			

Sumber : Dinperkimtan, 2025

Gambar 4.1.
 Persentase Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat
 Tahun 2025



Sumber : Dinperkimtan, 2025

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025 dapat dijelaskan menurut tabel berikut.

Tabel 4. 44.
 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
 Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah SDM yang Terlibat dalam Penerapan SPM	OPD
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Pegawai ASN dan Non ASN Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat berjumlah 6 orang	Dinperkimtan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Pegawai ASN dan Non ASN Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat berjumlah 6 orang	Dinperkimtan

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025,

kendala yang dihadapi dan solusi yang diperlukan dapat dijelaskan menurut tabel berikut.

Tabel 4. 45.
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Pengumpulan Data	Belum tersedianya data pada jenis Layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Penganggaran segera untuk pelaksanaan kegiatan pendataan dalam mendukung Layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
2	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan penanganan dan verifikasi telah dilaksanakan, namun kejadian bencana selalu bertambah baru setiap tahunnya.	Perhitungan kebutuhan program tiap tahun harus didukung dengan <i>update</i> data berkala terhadap kejadian bencana.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan anggaran jika mengacu pada rencana aksi ideal tahunan. Anggaran penanganan fisik masih terkena efisiensi.	Peningkatan alokasi anggaran SPM Perumahan rakyat sesuai rencana aksi. Menghindarkan anggaran SPM dari efisiensi/ refocusing.
4	Pelaksanaan	Kendala pemenuhan surat penetapan status bencana dan/atau surat penetapan bahwa daerah tersebut termasuk dalam program relokasi pemda dari kepala daerah	Apabila surat penetapan kepala daerah tidak dapat terbit, maka dilakukan usulan penanganan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
II	Eksternal		
	Perencanaan dan Penganggaran	Belum optimalnya koordinasi antar OPD, desa, masyarakat, maupun swasta dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat	Intensifikasi koordinasi lintas pihak guna membentuk kesepahaman, perencanaan terpadu dan pelaksanaan yang terkoordinir demi terwujud penanganan korban bencana/relokasi yang cepat dan merata.

Sumber : Dinperkimtan, 2025

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat terbagi menjadi 3 sub urusan yaitu:

1. Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum)
2. Sub Urusan bencana
3. Sub Urusan kebakaran

Adapun dalam prakteknya ketiga sub urusan dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana

Di Kabupaten Purworejo Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan Oleh :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis dan indikator untuk pelayanan dasar Urusan Pemerintahan bidang trantibumlinmas dilihat dari penerima pelayanan dasar dan mutu minimal pelayanan dasar, yaitu:

- a. Sub Urusan Trantibum :
 - 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun yang memuat :
 - a) Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 - b) Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - c) Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat; dan
 - d) Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.
- b. Sub Urusan Bencana
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dalam 1 (satu) tahun. Yang terdiri dari :
 - a) Penusunan Kajian Risiko Bencana
 - b) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :
 - a) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - c) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
 - d) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
 - e) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - f) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :
 - a) Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - c) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - d) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

- e) Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit

c. Sub Urusan Kebakaran

- 1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam 1 (satu) tahun, memuat:
 - a) Tingkat waktu tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 - b) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - c) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - d) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia;
 - e) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
 - f) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100%

- a. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum Kabupaten Purworejo.

Target Pencapaian SPM Bidang Tranntibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memuat:

- 1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten
 - a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 - b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.

2. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten
- a. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba di Lokasi dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi;
 - b. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 - c. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 - d. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Sumber Daya Manusia;
 - e. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran; dan
 - f. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- 1. Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada;
- 2. Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Dari jenis pelayanan dasar tersebut, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian SPM yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.46
Target Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran
Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 Orang	12 Bulan	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	268 Unit	12 Bulan	812.033.400,00
					2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	12 Dokumen	12 Bulan	
					3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** <i>(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</i>	34 Orang	12 Bulan	
					4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2 Dokumen	12 Bulan	
					5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil <i>(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</i>	2 Orang	12 Bulan	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan <i>(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)</i>	2 Orang	12 Bulan	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	50 Orang	12 Bulan	1. Tingkat waktu tanggap <i>(response time)</i> 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	38 Layan an	12 Bulan	774.665.400,00
					2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6 Doku men	12 Bulan	
					3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	520 Unit	12 Bulan	
					4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	38 Orang	12 Bulan	
					5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	40 Orang	12 Bulan	
					6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	40 Orang	12 Bulan	

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Target Pencapaian dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.47
Target Pencapaian Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten Purworejo tahun 2025

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Targ et	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200 jiwa	Des 2025	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana			43.005
					a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1 Dokue men	Des 2025	
					b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1 Doku men	Des 2025	
					2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
					1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			
					a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	200 Ekse mplar	Des 2025	
					b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	10 Desa	Des 2025	
					c. Tersedianya Narasumber/Fasilit ator (sesuai dengan kebutuhan)	5 Orang	Des 2025	
					d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	10 Orang	Des 2025	
					2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
					a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0 media	Des 2025	
					b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0 buah	Des 2025	
					c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	0 unit	Des 2025	
					d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	0 orang	Des 2025	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0 orang	Des 2025	
					3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
					a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0 buah	Des 2025	
					b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	0 buah	Des 2025	
					c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	0 orang	Des 2025	
					d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	0 orang	Des 2025	
					e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	0 orang	Des 2025	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500	Des 2025	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			2.065.821,3
					a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	1 Dokumen	Des 2025	
					b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada	1 Dokumen	Des 2025	
					2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
					a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	2 Dokumen	Des 2025	
					b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	2 Dokumen	Des 2025	
					c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	8 orang	Des 2025	
					d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	7 Orang	Des 2025	
					3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Targ et	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5 paket	Des 2025	
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5 paket	Des 2025	
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 buah	Des 2025	
					d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 buah	Des 2025	
					e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	7 Orang	Des 2025	
					f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	8 orang	Des 2025	
					2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5 paket	Des 2025	
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5 paket	Des 2025	
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 buah	Des 2025	
					d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	7 Orang	Des 2025	
					e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	8 Orang	Des 2025	
					4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					1) . Simulasi Dalam Ruangn (Table-Top Exercise)			
					a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1 Doku men	Des 2025	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Targ et	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Des 2025	
					c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	10 Orang	Des 2025	
					1) Gladi Lapangan			
					a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1 Dokumen	Des 2025	
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Des 2025	
					c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	8 Orang	Des 2025	
					5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365 hari	Des 2025	
					b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	8 pertemuan	Des 2025	
					c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1 orang	Des 2025	
					d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	10 orang	Des 2025	
					e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	10 orang	Des 2025	
					2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Targ et	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	6 Unit	Des 2025	
					b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	8 unit	Des 2025	
					c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1 Unit	Des 2025	
					d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1 Unit	Des 2025	
					3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
					a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	0 paket	Des 2025	
					b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	0 paket	Des 2025	
					4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
					a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	20 paket	Des 2025	
					b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	20 paket	Des 2025	
					6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Des 2025	
					b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Des 2025	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Targ et	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Des 2025	
					e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	11 unit	Des 2025	
3	Pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Tidak Terjad i Benca na	Des 2025	990.540,276
TOTAL								3.175.344,676

4.5.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian

- Realisasi Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibun dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.4 Realisasi *Capaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025* sebagai berikut:

Tabel 4.48
Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar				Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	123	+23	100%	812.033.400	783.893.710	96,53%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	50	53	+3	100%	774.665.400	685.486.063	88,49%

Sumber : Satpol PP dan Damkar, Desember 2025

- Realisasi capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.49
Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	200	200	100%	43.005.000	42.964.900	99.91%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	500	500	100%	2.065.821.300	1.973.325.024	95.52%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tidak Terjadi Bencana	Tidak Terjadi Bencana	100%	990.540.276	753.793.521	87.26%

- b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu
- Dalam upaya pencapaian target tersebut di atas, hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas pada tabel diatas, dijabarkan Kembali melalui perhitungan IP penerima layanan dasar dan IP mutu minimal layanan dasar pada masing masing jenis pelayanan dasar.
- 1) Sub Urusan Trantibun dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diuraikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 4.50

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Trantibum Kabupaten Purworejo Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (6 x 80%)
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani		
		Jumlah Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Yang Terlayani (Orang)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	100	123	+23	100%	80%

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (6 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	268 Unit	268 Unit	0	100%	20%
2.	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	0	100%	20%
3.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** <i>(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan</i>	34 Orang	34 Orang	0	100%	20%

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (6 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
1	2	3	4	5	6	7
	Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
4.	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2 Dokumen	2 Dokumen	0	100%	20%
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2 Orang	2 Orang	0	100%	20%
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	2 Orang	2 Orang	0	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/ jumlah mutu)						20%

Pada tahun anggaran 2025, pelaksanaan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rincian analisis sebagai berikut:

- a. Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar: Realisasi IP Pelayanan Dasar pada tahun 2025 telah berhasil terpenuhi sesuai target, yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dan jangkauan pelayanan dasar trantibum kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal.
- b. Indeks Pencapaian (IP) Mutu Layanan: Terkait dengan mutu layanan, khususnya pada mutu layanan pemenuhan standar pelayanan bagi warga negara yang terkena dampak

gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material maupun pelayanan pengobatan, tercatat tidak ada aduan masyarakat sepanjang periode pelaporan Januari hingga Desember 2025. Nihilnya aduan ini mencerminkan bahwa tindakan penegakan hukum di lapangan dilakukan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur.

Meskipun tidak terdapat kejadian/aduan yang memerlukan penanganan kerugian, IP Mutu Minimal Layanan Dasar tetap dinyatakan terpenuhi sebesar 20%. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan instansi terhadap standar minimal penyediaan sarana, prasarana, dan prosedur kesiapsiagaan dalam merespons dampak penegakan regulasi daerah.

Tabel 4.51
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Kebakaran
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					Tuntas Paripurna 100%	
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Yang Terlayani (Orang)			
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	50	53	+3	100%	80%

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	38 Layanan	49 Layanan	+11	100%	20%
2.	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6 Dokumen	6 Dokumen	0	100%	20%
3.	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	520 Unit	520 Unit	0	100%	20%

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	38 Orang	38 Orang	0	100%	20%
5.	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	40 Orang	40 Orang	0	100%	20%
6.	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	40 Orang	40 Orang	0	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/ jumlah mutu)						20%

Sumber : Satpol PP dan Damkar, Desember 2025

Pada tahun anggaran 2025, Indeks Pencapaian (IP) untuk jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran telah berhasil memenuhi target kumulatif sebesar 100%. Adapun rincian pencapaian berdasarkan indikator penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar: Realisasi IP Pelayanan Dasar tercapai sebesar 80% sesuai dengan target. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan instansi dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penyelamatan serta evakuasi bagi seluruh korban terdampak kebakaran di Kabupaten Purworejo.
- b. Indeks Pencapaian (IP) Mutu Layanan Dasar: Realisasi IP Mutu Layanan Dasar tercapai sebesar 20% sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 (lima belas) menit sejak diterimanya informasi/laporan kejadian kebakaran sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur operasional, kualitas peralatan dan standar teknis aparatur, sebagaimana diatur dalam regulasi SPM Kebakaran. Meskipun demikian, diakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek pada sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Hal ini menjadi komitmen instansi untuk terus dioptimalkan guna menjamin keberlanjutan mutu layanan yang prima di masa mendatang.

2) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diuraikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel.4.52
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Informasi Rawan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	200	200	100%	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana				
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dam bentuk kajian dan album peta	1	1	100%	20%
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang telah siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100%	20%
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
	1). Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamphlet dll sesuai jumlah peserta	200	200	100%	20%
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	10	10	100%	20%
	c. Tersedianya Narasumber/ Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100%	20%
	d. Tersedianya Penyelenggaraan Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan	10	10	100%	20%
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
	e. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)					20%

Tabel.4.53

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	500	500	100%	80%

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	4	5	6	7
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	1	1	100%	
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkara	1	1	100%	
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)				
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi	2	2	100%	

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	4	5	6	7
	(sesuai dengan kebutuhan				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	4	4	100%	
	c. Tersedianya Personil penyusunan Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100%	
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi				
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	100%	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100%	
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	100%	

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	4	5	6	7
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan	8	8	100%	
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100%	
	2) Gladi Lapangan				
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100%	
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	100%	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100%	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	100%	

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	4	5	6	7
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan Kebutuhan)	10	10	100%	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100%	
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100%	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100%	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100%	
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	20	20	100%	
	b. Tersedianya Alat Komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	20	20	100%	
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan				

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	4	5	6	7
	Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	a) Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	b) Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	c) Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100%	
	d) Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	11	11	100%	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)					20%

Tabel.4.54

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerimaan Layanan Dasar dan Mutu penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
3	penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tidak Terjadi Bencana	Tidak Terjadi Bencana	100%	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)					20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Ja sa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Ja sa Yang Tersedia		
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100%
1	PENDATAAN				
	Form 5.A.1 Daftar warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				100%
	Form 5.A.2 Daftar kerawanan tempat tinggal individu warga negara				100%
	Form 5.A.3 Rekapitulasi kelompok warga negara berdasarkan kelompok kerawanan desa				100%
	Form 5.A.4 Rekapitulasi aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana				100%
	Form 5.A.5 Daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi penugasan				100%
	Form 5.A.6 Rekapitulasi warga negara wajib latih				100%
	Form 5.A.7 Daftar ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana				100%
	Form 5.A.8 Daftar ketersediaan stok logistik pengungsian				100%
	Form 5.A.9 Daftar warga negara yang menjadi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana				100%
	Form 5.A.10 Daftar status korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)				100%
	Form 5.A.11 Daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)				100%
	Form 5.A.12 Daftar kejadian bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)				100%
2	PERHITUNGAN				
	Form 5.B.1 Penghitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan terhadap bencana				100%
	Form 5.B.2 Penghitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)				100%
3	PERENCANAAN				
	Form 5.C.1 Rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100%
	Form 5.C.2 Rencana proyeksi kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 5/jumlah mutu)					100%

Pada Tahun 2025 di Kabupaten Purworejo tidak terjadi Bencana Alam sehingga tidak ada kegiatan untuk pemenuhan mutu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, namun demikian upaya pemenuhan Mutu Pencapaian SPM telah dilakukan dengan: Pendataan, Perhitungan, dan Perencanaan sehingga mencapai 100%

- c. Capaian IP SPM
- 3) Hasil capaian SPM Sub Urusan Trantibumlinmas pada tabel diatas, dijabarkan kembali melalui penghitungan IP Penerima Layanan Dasar dan IP mutu minimal layanan dasar, sehingga diperoleh IP SPM BidangTrantibumlinmas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.55
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabu[atn Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Sub Urusan Trantibun	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
2	Sub Urusan Bencana Daerah	80%	20%	100,%	Tuntas Paripurna
3	Sub Urusan Kebakaran	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
	IP TRANTIBUMLINMAS			100%	Tuntas Paripurna

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Sub Urusan Trantibun dan Sub Urusan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.56.
Alokasi Anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lainnya yang Sah
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	812.033.400,00	-
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	-	774.665.400,00	-

Alokasi anggaran Tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana berjumlah Rp 3.175.344.676 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.57
Alokasi Anggaran BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (RP)		
		APBN	APBD	Sumber Lainnya yang Sah
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	43.005.000	-
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	2.065.821.300	-
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	990.540.276	-
		TOTAL	3.175.344.676	

4.5.5 Dukungan Personil

- a. Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.58
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	PNS Satpol PP	PPPK Satpol PP		Jumlah
			Penuh Waktu	Paruh Waktu	
1.	S2	6	0	0	6
2.	S1	9	0	0	9
3.	D4	3	0	0	3
4.	D3	6	0	0	6
5.	SMA/SLTA	17	16	1	34
6.	SMP	1	0	0	1
7.	SD	0	1	0	1
Jumlah					60

No.	Jenjang Pendidikan	PNS Damkar	PPPK Damkar		Jumlah
			Penuh Waktu	Paruh Waktu	
1.	S2	0	0	0	0
2.	S1	4	0	0	4
3.	D4	0	0	0	0
4.	D3	2	1	0	3
5.	SMA/SLTA	3	38	0	41
Jumlah					48
Total Pegawai					108

b. Sub Urusan Bencana

Jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana ada 62 orang yang terdiri dari 22 ASN dan 32 Non-ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.59.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	40
2	Perempuan	15
JUMLAH		55

Tabel 4.60
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
berdasarkan Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	4
2	S1	20
3	DIII	10
4	SLTA/ sederajat	21
JUMLAH		55

Tabel 4.61
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Berdasarkan
Jabatan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah Saat ini	Kebutuhan berdasarkan Anjab ABK	Kekurangan
1	Jabatan Manajerial			
	Kepala Pelaksana	1	1	0
	Kepala Sekretariat	1	1	0
	Kepala Bidang	3	3	0
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
	Kasubbag Keuangan	1	1	0

No	Jabatan	Jumlah Saat ini	Kebutuhan berdasarkan Anjab ABK	Kekurangan
2	Jabatan Fungsional			
	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	2	2	0
	Perencana Ahli Muda	1	1	0
	Terampil Arsiparis	1	1	0
	Analisis Bencana	3	3	0
	Bendahara	1	1	0
	Penyuluh Bencana	1	1	0
	Pengadministrasian Umum	2	2	0
	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	2	2	0
	Verifikator Keuangan	1	1	0
	Pengadministrasian Keuangan	1	1	0
3	Operator Layanan Operasional	32	32	0
4	Tenaga Kebersihan	1	1	0

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas terdapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik Internal maupun Eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.62
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
a	URUSAN TRANTIBUM		
1.	Pengumpulan data	Belum dapat dilaksanakan pendataan secara maksimal terkait dengan rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda dan Perkada dikarenakan: a. Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah personil yang terbatas; b. Tidak semua warga yang menjadi sasaran pendataan berkenan memberikan data identitasnya kepada petugas, dengan alasan terkait dengan keamanan data dsb (kesulitan dalam pemenuhan data by name by address berupa NIK dan KK karena data bersifat rahasia); c. Dari Dinas Dukcapil tidak berkewenangan untuk memberikan data dikarenakan adanya regulasi baru sehingga data yang diperoleh belum maksimal.	1. Memaksimalkan personil yang ada pada saat melaksanakan kegiatan/ penegakan perda dan perkada; 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dan mengusulkan kebutuhan personil melalui pengadaan ASN.

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
2.	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan Kebutuhan pada Pelayanan Dasar Warga Negara yang Terkena Dampak sudah dilaksanakan akan tetapi pada Penganggaran dalam pemberian pelayanan dasar (biaya perbaikan atau pelayanan pengobatan) belum bisa dirinci secara riil dalam Dokumen Anggaran karena sifatnya “belum terjadi” sehingga belum diketahui kebutuhan /jenis belanja apa, masih dalam perkiraan; kemudian untuk Pelayanan Dasar Warga yang terkena dampak hingga saat ini belum ada aduan terkait dengan kerugian baik materil maupun pengobatan oleh warga negara akibat penegakan perda dan perkada.	1. Akan lebih dicermati lagi dalam perencanaan; 2. Mempertahankan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP untuk meminimalisir/ mencegah kerugian dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material maupun pelayanan pengobatan.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	1. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan Sarpras dan Personil 2. Kurangnya SDM yang sudah diklat Satpol PP dan bimtek yang sesuai regulasi SPM; 3. Penganggaran dalam pemberian pelayanan dasar (biaya perbaikan atau pelayanan pengobatan) belum bisa dirinci secara riil dalam Dokumen Anggaran karena sifatnya “belum terjadi” sehingga belum diketahui kebutuhan /jenis belanja apa, masih dalam perkiraan	1. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; 2. Peningkatan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Trantibum serta menghindarkan anggaran yang berkaian dengan penunjang SPM dari efisiensi/ refocusing.
4.	Pelaksanaan	1. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasaran dan pemenuhan personil dalam menunjang SPM sub urusan Trantibum; 2. SDM yang ada belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi dan standar pelayanan minimal; 3. Tidak terserapnya anggaran pada beberapa realisasi anggaran dikarenakan adanya pemberlakuan aturan perjalanan dinas (at cost) pada komponen Belanja Perjalanan Dinas	1. Memaksimalkan Sarparas dan personil yang ada; 2. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; 3. Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP; 4. Koordinasi terkait dengan penambahan personil penunjang kegiatan dengan BKPSDM.
B	SUB URUSAN KEBAKARAN		
1.	Pengumpulan data	Belum maksimal dalam melaksanakan penyusunan database jumlah Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran Kabupaten/Kota dikarenakan keterbatasan personil/ tenaga ahli yang membidangi terkait dengan pendataan dan investigasi kejadian kebakaran, sehingga data yang diperoleh untuk mencukupi hal tersebut belum maksimal.	1. Memaksimalkan personil yang ada pada saat melaksanakan kegiatan; 2. Pengusulan Penambahan personil/ tenaga ahli yang membidangi terakit dengan pendataan dan investigasi kejadian kebakaran melalui seleksi ASN; 3. Pembinaan dan Pelatihan personil; d. Akan melaksanakan MoU dengan Dinas/ instansi terkait untuk identitas warga.
2.	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan sudah dilaksanakan akan tetapi mekanisme dalam pengisian perhitungan pada form-form perhitungan kebutuhan tersebut belum dapat dipahami secara maksimal	1. Memperhitungkan kebutuhan dan mengusulkan kepada TAPD; 2. Mengusulkan agar dapat dilakukan sosialisasi mekanisme perhitungan pada form-form perhitungan kebutuhan tersebut.

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan Personil serta belum terpenuhinya jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam pemenuhan layanan Respon Time	1. Penggadaan sarpras; 2. Pembentukan Relawan Kebakaran; 3. Sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Kebakaran; d. Peningkatan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran, serta menghindarkan anggaran yang berkaitan dengan penunjang SPM dari efisiensi/ refocusing;
4.	Pelaksanaan	1. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasaran dan pemenuhan personil dalam menunjang SPM sub urusan Kebakaran; 2. Tidak terserapnya anggaran pada beberapa realisasi anggaran dikarenakan adanya pemberlakuan aturan perjalanan dinas (at cost) pada komponen Belanja Perjalanan Dinas.	1. Memaksimalkan Sarparas dan personil yang ada; 2. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; 3. Koordinasi terkait dengan penambahan personil penunjang kegiatan dengan BKPSDM.

Tabel 4.63
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Internal: 1. Kesulitan dalam merekap data warga di daerah rawan Bencana terutama menggunakan NIK 2. KRB yang sudah disusun belum mencantumkan daerah rawan bencana secara keseluruhan dan terperinci. Hanya berisi jumlah di setiap kecamatan dan tidak menyebutkan nama daerah/ desa	1. Meminta bantuan disdukcapil untuk mendapatkan data warga di daerah rawan bencana 2. Data daerah rawan bencana kolaborasi KRB baru dan KRB lama
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Internal: 1. Kesulitan dalam merekap data warga dan aparaturnya yang dilatih di daerah rawan Bencana terutama menggunakan NIK 2. Belum bisa menentukan daerah mana yang akan dilatih, karena KRB yang dibuat belum menyebutkan secara terperinci daerah rawan bencana hanya jumlah di setiap kecamatan	1. Meminta bantuan disdukcapil untuk mendapatkan data warga di daerah rawan bencana 2. Data daerah rawan bencana kolaborasi KRB baru dan KRB lama
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Internal: 1. Terdapat banyak data korban yang masuk belum benar dan masih berubah ubah 2. Dalam pemberian bantuan logistik tidak menyebutkan jumlah orang yang dibantu melainkan hanya paket 3. Mendata korban bencana tidak sampai ke NIK korban. Hanya sebatas nama, umur dan jenis kelamin 4. Perkiraan cuaca yang di luar prediksi BMKG yang sebelumnya musim kemarau	1. Memvalidasi data sebelum data diaporkan 2. Membuat SOP pemberian bantuan logistik 3. Meminta bantuan disdukcapil untuk mendapatkan data lengkap korban

4.6. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Pada Kabupaten Purworejo urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, sesuai Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis dan indikator untuk pelayanan dasar bidang sosial dilihat dari penerima pelayanan dasar dan mutu minimal pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dalam 1 (satu) tahun.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan

sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Sedangkan mutu minimal adalah terpenuhinya barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.

4.6.2 Target Pencapaian

Dari jenis pelayanan dasar tersebut, Kabupaten Purworejo menetapkan target dan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.64
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis	Setiap tahun	

						yang akan dipenuhi)		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara)	Setiap tahun	

4.6.3 Realisasi

a. Realisasi Capaian

Dari target capaian dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran diperoleh capaian sebagai tabel berikut

Tabel 4.65
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	50	50	100%	203.165.000	190.457.000	93,74
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	75	75	100%	393.581.000	392.132.194	99,63
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	20	20	100%	7.000.000	5.611.000	80,15
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	35	35	100%	55.836.000	51.078.664	91,52
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencaana bagi Korban Bencana Daerah.	250	250	100%	134.502.500	108.143.941	80,4

b. Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Tabel 4.66
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	50	50	100%	100%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosia	12	12	100%	100%
2	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	2	2	100%	100%
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	25	25	100%	100%
4	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	20	20	100%	100%
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat	40	40	100%	100%

	penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)				
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100%	100%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	35	35	100%	100%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	30	30	100%	100%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	25	25	100%	100%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	15	15	100%	100%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	5	5	100%	100%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	8	8	100%	100%
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	6	6	100%	100%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.67.
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	75	75	100%	100%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	6	6	100%	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	5	5	100%	100%
3	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	35	35	100%	100%
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	12	12	100%	100%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100%	100%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym;	8	8	100%	100%

	bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	10	10	100%	100%
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	15	15	100%	100%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	10	10	100%	100%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	4	4	100%	100%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	3	3	100%	100%
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	4	4	100%	100%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.68.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	20	20	100%	100%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x10 0%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	4	4	100%	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	4	4	100%	100%
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	10	10	100%	100%
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	4	4	100%	100%
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	12	12	100%	100%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100%	100%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah	12	12	100%	100%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	6	6	100%	100%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	5	5	100%	100%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	4	100%	100%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	4	4	100%	100%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	3	3	100%	100%
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	3	3	100%	100%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant

Tabel 4.69.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant	35	35	100%	100%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	7	7	100%	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	6	6	100%	100%
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	6	6	100%	100%
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	5	5	100%	100%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100%	100%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	5	5	100%	100%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan	7	7	100%	100%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	5	100%	100%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	4	100%	100%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	4	4	100%	100%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	4	4	100%	100%
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	5	5	100%	100%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah

Tabel 4.70
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Purworejo 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah	250	250	100%	100%

	tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah				
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan permakanaan	200	200	100%	100%
2	Penyediaan sandang	35	35	100%	100%
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3	3	100%	100%
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	35	35	100%	100%
5	Pelayanan dukungan Psikososial	30	30	100%	100%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

c. Indeks Pencapaian (Ip) Spm Bidang Sosial Tahun 2025
Tabel 4.71.

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (4 x 20%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80	20	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	80	20	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	80	20	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	80	20	100	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	80	20	100	Tuntas Paripurna

4.6.4 Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.72
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		Sumber Lain yang sah
		APBN	APBD	
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	-	203.165.000	5.000.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	-	393.581.000	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	-	7.000.000	-
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geladangan dan Pengemis di Luar Panti.	-	55.836.000	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	-	134.502.500	-

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut

Tabel 4.73
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas (Esselon II)	1
2	Sekertaris Dinas (Esselon III)	1
3	Kepala Bidang Rehabsos (Ess III)	1
4	Kepala Bidang Dayasoslinjamsos (Ess III)	1
5	Fungsional Pekerja Sosial Muda	1
6	Satuan Bhakti Peksos Anak	3
7	Pelaksana PNS Rehabsos	2
8	Pelaksana PNS Dayasoslinjamsos	2
9	PPPK Rehabsos	3
10	PPPK Dayasoslinjamsos	2
11	Fungsional Pekerja Sosial Pertama	2
	Jumlah	19

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.74
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Sosial Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
		Pengampu SPM kesulitan menentukan kriteria penerima layanan dasar (PGOT diluar panti yang mendapatkan bantuan/ warga miskin)	Adanya sumber Data yang akurat.
		Pengampu SPM kurang memahami mutu layanan dasar	Diadakanya Sosialisasi Penyusunan SPM.
		Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.	Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
		Kelompok Jabatan Fungsional khusus sesuai dengan Struktur Organisasi yang belum terisi.	Adanya tambahan Pegawai untuk mengisi formasi jabatan umum/ fungsional
		Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam Pelayanan Kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.	Diadakanya Pelatihan bagi ASN/ personil yang menangani Kegiatan Pencapaian SPM.
II	Eksternal		
		Kurangnya Komunikasi dengan Instansi /Dinas lain dalam hal pencapaian SPM.	Menjalin komunikasi dengan Instansi/Dinas terkait
		Kurangnya Anggaran	Anggaran Tahun 2025 di tambah

Hasil Capaian IP SPM di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.75.
Indek Pencapaian SPM pada masing-masing Bidang
di Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar	TOTAL IP	Kategori Indeks SPM
----	-----------------------	--	--	----------	---------------------

1	2	3	4	5	6
1	Bidang Urusan Pendidikan	80	20	100	Tuntas paripurna
2	Bidang Urusan Kesehatan	80	20	100	Tuntas paripurna
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	80	20	100	Tuntas paripurna
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	80	20	100	Tuntas paripurna
5	Bidang Urusan Trantibumlinmas	80	20	100	Tuntas paripurna
6	Bidang Urusan Sosial	80	20	100	Tuntas paripurna
	Total IP Kabupaten Purworejo	80	20	100	Tuntas paripurna

4.7. Program dan Kegiatan

Penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2025 telah menggunakan kodefikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rincian penganggaran pada masing-masing bidang SPM dijabarkan sebagai berikut.

4.7.1. Urusan Pendidikan

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Purworejo tahun 2021 – 2026 dan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif tahun 2021 - 2026.

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator Program Prioritas bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo.

Dalam mengatasi isu tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan misi ke empat yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang baik guna mewujudkan *good governance* melalui program inovasi diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dapat berjalan dengan cara cara baru dan inovatif. *One Agency One Innovation* adalah konsep yang

dirancang untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik di setiap perangkat daerah.

Pada tahun 2021–2026 Dinas Pendidikan akan mengembangkan inovasi pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan Pendidikan.

Untuk mencapai visi misi pembangunan kabupaten Purworejo khususnya bidang Pendidikan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan
- a. Program Pengembangan Kurikulum

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
2. Urusan Kebudayaan
- a. Program Pengembangan Kebudayaan

b. Program Pembinaan Sejarah

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

d. Program Pengelolaan Permusiuman

Adapun pelaksanaan program / kegiatan / sub keggiatan pada tahun anggaran 2025 yang mendukung urusan bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.76
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8,597,458,500
		1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,430,000,000
		2 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8,526,500
		3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	611,900,000
		4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	5,545,353,600

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
		Satuan Pendidikan PAUD	
		5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1,001,678,400
2	Pelayanan Dasar Pendidikan dasar	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	29.486.893.150
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.821.526.500
		Angka Partisipasi Sekolah	
		1 Penyediaan Biaya . Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	8,555,015,800
		2 Koordinasi, . Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14,122,800
		3 Pembangunan Ruang . Kelas Baru	980,000,000
		4 Rehabilitasi . Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10,223,701,900
		Literasi	
		1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2,294,383,400
		2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5,340,800
		3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	307,870,000
		4 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	18,623,200
		5 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,741,100
		6 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	47,037,800

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
		7 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	395,674,200
		Numerasi	
		1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	5,340,800
		2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	307,870,000
		3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	18,623,200
		4 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,741,100
		5 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	395,674,200
		6 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	47,037,800
		Keamanan	
		1 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	47,037,800
		2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	18,205,000
		Inklusifitas	
		1 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	47,037,800

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
		2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	18,205,000
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.665.366.650
		Angka Partisipasi Sekolah	
		1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3,515,754,000
		2 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10,065,000
		3 Pembangunan Ruang Kelas Baru	750,000,000
		Literasi	
		1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	137,500,000
		2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8,864,500
		3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	137,272,800
		4 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13,811,400
		5 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	13,811,400
		6 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	305,001,000
		7 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	18,804,250

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
		Numerasi	
		1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	8,864,500
		2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	137,272,800
		3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	13,811,400
		4 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	305,001,000
		5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	137,500,000
		6 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13,811,400
		7 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	18,804,250
		Keamanan	
		1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13,811,400
		2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	18,804,250
		3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7,190,000
		Kebhinekaan	
		1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13,811,400
		2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	18,804,250

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
		3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7,190,000
		Inklusifitas	
		1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13,811,400
		2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	18,804,250
		3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7,190,000
3	Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	662.000
		Angka Partisipasi Sekolah	
		1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	372.00
		.2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	290.000
TOTAL			38,085,013,650

4.7.2. Urusan Kesehatan
 Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator Program Prioritas bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan penerapan SPM bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.77
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TERKAIT PELAYANAN DASAR	ANGGARAN
I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 3.896.544.150,-
a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 2.254.855.900,-
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 4.122.400,-
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 62.347.550,-
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 121.303.500,-
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 474.542.800,-
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 49.276.500,-
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TERKAIT PELAYANAN DASAR	ANGGARAN
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 387.655.700,-
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 6.536.800,-
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 3.100.000,-
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 183.797.000,-
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 319.750.600,-

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TERKAIT PELAYANAN DASAR	ANGGARAN
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 29.255.400,-

4.7.3. **Urusan Pekerjaan Umum**

Dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 serta penerapan SPM yang menjadi tupoksi DPUPR, maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam tahun perencanaan 2021 - 2026. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dimaksud dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.78.
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran APBD, DAK, dan dana lainnya
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	308.583.000
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	308.583.000
		a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	14.773.000
		b Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	57.019.000
		c Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	215.000.000
		d Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	21.791.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.916.784.425
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234	7.106.284.425
		a Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50.000.000
		b Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.056.284.425
		2 Tambahan di Luar DPA	810.500.000
		a Baznas DPUPR Jamban Sehat	10.500.000
		b SANIMAS SPALD-S	800.000.000
		TOTAL DANA PAGU SPM	

4.7.4. **Urusan Perumahan Rakyat**

Dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 serta penerapan SPM yang menjadi tupoksi Dinperkimtan, maka

dialokasikan anggaran tahun 2025 untuk penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat. Program dan kegiatan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.79.
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
A	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota a) Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan b) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana c) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota d) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota a) Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana b) Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.265.000,- 1.855.600,- 3.280.900,- 2.435.600,- 3.692.900,- Dioptimalkan dari sumber pendanaan lain yang sah
B	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	-	-

4.7.5. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

- a. Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 pada masing- masing Sub Urusan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Tabel 4.80
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		812.033.400,00
		1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	287.033.400,00
		a.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0
		b.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
		c.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp27.402.000,00
		d.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp6.600.700,00
		e.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp250.723.700,00
		f.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2.307.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
		2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	525.000.000,00
			a. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0
			b. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Rp525.000.000,00
			c. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0
			d. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0
			e. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	0
			f. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0
		3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0
			a. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	0
			b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	0
			c. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		774.665.400,00
		1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	684.775.400,00
			a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp336.651.800,00
			b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp77.438.600,00
			c. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp242.950.000,00
			d. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp27.735.000,00
			e. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0
			f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
			g. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0
		2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0,00
			a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0
		3	Investigasi Kejadian Kebakaran	0,00
			a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	0
		4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	89.890.000,00
			a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp78.170.000,00
			b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp11.720.000,00

Sumber: Satpol PP dan Damkar, Desember 2025

b. Sub Urusan Bencana

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Tabel 4.81
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
1		2	4	5
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana		42.964.900
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	orang	42.964.900
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana		1.973.325.024
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	unit	1.142.652.300
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	orang	101.790.029
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	132.529.700
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	29.684.800
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	dokumen	224.657.800
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	246.780.805
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	kawasan	95.229.590
3		Program Penanggulangan Bencana		753.793.521

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	447.105.746
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2.932.800
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	Orang	248.475.875
		Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	10.685.600
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	14.593.500
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana		71.643.609
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	0
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	36.531.109
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Orang	0
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	21.846.000
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	13.266.500

Sumber : BPBD Purworejo 2025

4.7.6. Urusan Sosial

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen penuh untuk dapat melaksanakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan baik jenis pelayanan dasar, mutu dan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas yang dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.82
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Sub Kegiatan : -Penyediaan Permakanan -Penyediaan Alat Bantu -Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial -Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	203.165.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	Sub Kegiatan : -Penyediaan Permakanan -Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak -Penyediaan Alat Bantu -Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	393.581.000
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Sub Kegiatan : -Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis -Penyediaan Alat Bantu	7.000.000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah	Sub Kegiatan : -Penyediaan Permakanan -Penyediaan Sandang -Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan -Pelayanan Dukungan Psikososial	134.502.500

Sumber : DINSOSDALDUKKB Kab. Purworejo Tahun 2025

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan uraian dalam LPPD ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator makro Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagai berikut :
 - a. Indikator makro Kabupaten Purworejo secara makro menunjukkan peningkatan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan 1,02% dari tahun 2024 sebesar 75,16 naik menjadi 75,93 pada tahun 2025.
 - b. Angka Kemiskinan menurun dari tahun 2024 sebesar 10,87 turun - 7,45% menjadi 10,06% pada Tahun 2025.
 - c. Angka Pengangguran menurun sebesar -0,37 dari tahun 2024 yang sebesar 3,89 menjadi 3,72 pada tahun 2025.
 - d. Pertumbuhan Ekonomi mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,27 dari yang semula sebesar 4,79 pada tahun 2024, dan mengalami pertumbuhan positif 10,02% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini meningkat pada sektor industri pengolahan dan disusul usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
 - e. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terjadi pada semua komponen pengeluaran. Ekonomi Kabupaten Purworejo tumbuh sebesar 3,33 persen berdasarkan data triwulan III tahun 2025, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB.
 - f. Indikator Kinerja Outcome dilaporkan dari 24 urusan wajib dan 7 urusan pilihan serta 8 urusan penunjang pemerintahan.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjiP) terdiri atas 17 Sasaran strategis dan 21 indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah.
3. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak terdapat Tugas Pembantuan, namun demikian pelaksanaan kegiatan Pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
4. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Purworejo dengan Indeks Pencapaian (IP) 100% atau Kategori Tuntas Utama untuk rincian Indeks Pencapaian (IP) setiap urusan adalah sebagai berikut:
 - a. Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan tercapai 100% dengan Kategori Tuntas Paripurna;
 - b. Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan tercapai 100% dengan Kategori Tuntas Paripurna;

- c. Indek Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum tercapai 100% dengan Katagori Tuntas Paripurna;
- d. Indek Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat tercapai 100% dengan Katagori Tuntas Paripurna;
- e. Indek Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tercapai 100% dengan Katagori Tuntas Paripurna;
- f. Indek Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial tercapai 100% dengan Katagori Tuntas Paripurna.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan capaian yang tertuang dalam komponen sistematika LPPD dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai dengan visinya yaitu Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif (Berseri) akan berupaya semaksimal mungkin untuk terwujudnya masyarakat yang maju dan berdaulat serta terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dapat memberikan gambaran atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat dikaji dan dievaluasi sehingga memberikan informasi yang akurat sampai sejauh mana pencapaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun anggaran.

Purworejo, 30 Maret 2026

